



## **WALIKOTA BALIKPAPAN**

### PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2014

#### TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sehingga pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Balikpapan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renja-SKPD) adalah rencana kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai:
  - a. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015;
  - b. Pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.

#### Pasal 3

Uraian Penjelasan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Mei 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
· ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE

NIP 196108061990031004

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Sistematika RKPD	I-8
1.5 Maksud dan Tujuan	I-9
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>II-1</b>
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-5
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-14
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-18
2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Hingga tahun 2012 dan Realisasi RPJMD 2011 - 2016	II-31
<b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-17
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-20
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-21
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-21
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.	III-32
3.2.2.3 Pembiayaan Daerah	III-35
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015	IV-8
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>VI-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### BAB II TABEL

2.1	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)	II-2
2.2	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan	II-2
2.3	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2013	II-3
2.4	Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kelompok Umur	II-3
2.5	Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	II-4
2.6	Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2013	II-5
2.7	PDRB Kota Balikpapan Tahun 2012-2013	II-6
2.8	Indikator Makro Kota Balikpapan	II-10
2.9	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008 s.d 2012	II-14
2.10	Tabel. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2012	II-15
2.11	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012	II-15
2.12	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2013 Kota Balikpapan	II-16
2.13	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan 2013	II-16
2.14	Jumlah unit usaha PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2013 Kota Balikpapan	II-17
2.15	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2013 Kota Balikpapan	II-17
2.16	Angka Konsumsi Rumah Tangga (Ruta) perkapita Kota Balikpapan Tahun 2008 s.d 2012 dan proyeksi 2013	II-18
2.17	Rekapitulasi Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2012	II-23
2.18	Arahan Non Budidaya / Lindung Kota Balikpapan	II-26
2.19	Jumlah dan Luas Pemakaman Umum Kota Balikpapan	II-28

### BAB III TABEL

3.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Balikpapan Tahun 2008-2012 dan Proyeksi 2013-2014	III-2
3.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstandi Kota Balikpapan Tahun 2008-2012 dan Proyeksi 2013-2014	III-3
3.3	Pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan Tahun 2008-2012 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-14 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (dalam satuan persen)	III-4
3.4	Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Balikpapan Tahun 2008-2012 dan Proyeksi 2013-2014 (%)	III-5
3.5	menggambarkan peranan ketiga kelompok sektor tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota	III-6

	Balikpapan, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan.	
3.6	Struktur Perekonomian Pembentuk PDRB Berdasar Kelompok Sektor Ekonomi di Kota Balikpapan atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2008- 2012 dan proyeksi Tahun 2013-2014 (dalam Rp juta dan persen)	III-10
3.7	Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBDPemerintah Kota Balikpapan Tahun 2010-2012 Target 2013 dan Proyeksi 2014 (dalam rupiah dan persen)	III-25
3.8	Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBDPemerintah Kota Balikpapan Tahun 2006-2011	III-29
3.9	Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Balikpapan Target Tahun 2012 dan Proyeksi 2014 (dalam Satuan Rupiah)	III-29

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun dokumen RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2006-2011) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, sedang RPJMD Tahap II (2011-2016) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat : visi, misi dan program prioritas Walikota terpilih dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Walikota terpilih yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari SKPD (Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/RKPD. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2011-2016.



RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

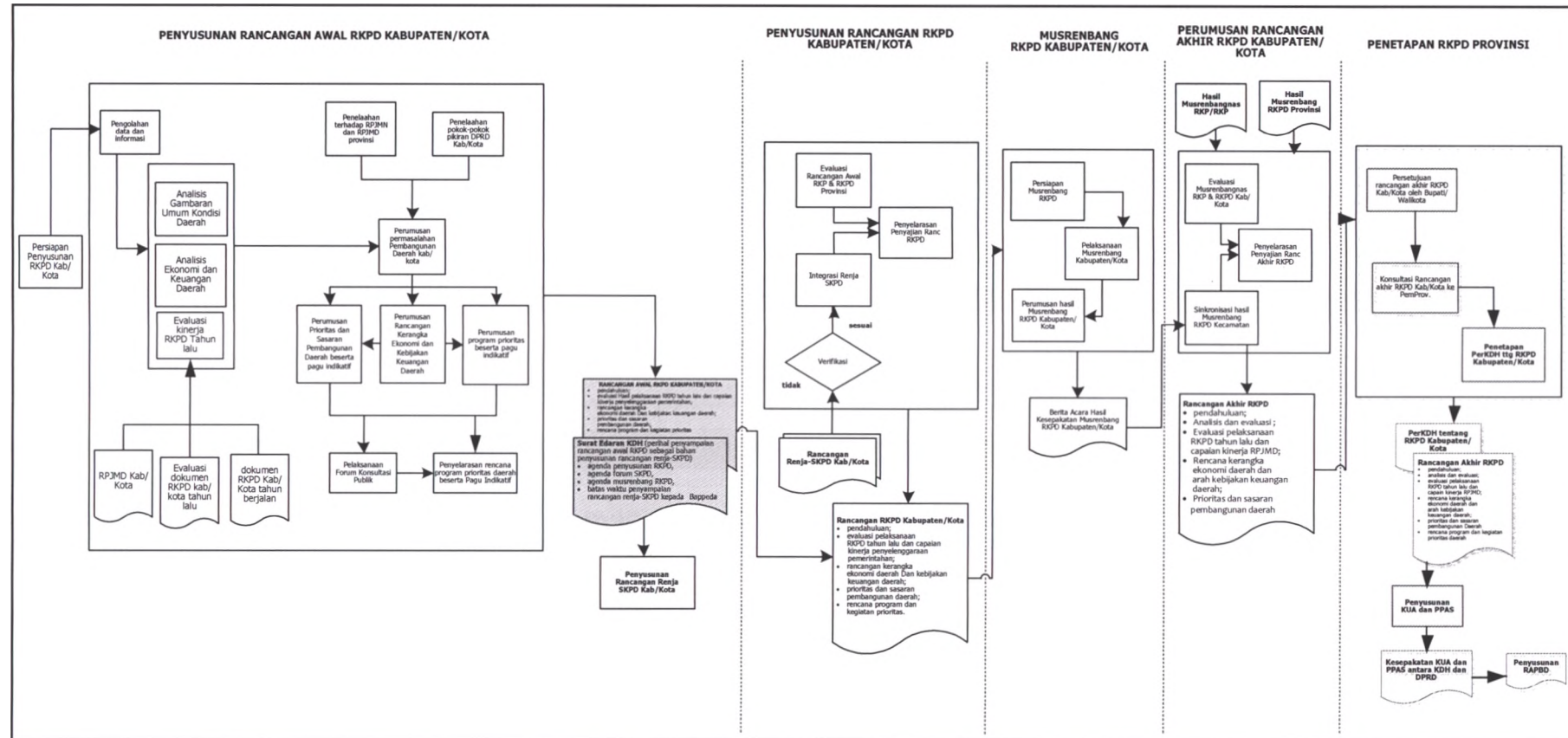
Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2015, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan

agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Rencana Kerja SKPD pada SKPD terkait.

Proses perumusan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016.

## **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD kota yang berpedoman pada RPJMD kota tersebut juga mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Balikpapan tahun 2015 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2011-2016, mengacu pada RPJM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018, serta RPJM Nasional Tahun 2010-2015.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut:

### **1) RPJM Nasional**

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada tanggal 15 Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 5 2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan", (ii) Buku II dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan", dan (iii) Buku III dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah".

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Instruksi Presiden ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (justice for all); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs).

### **2) RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembahasan rancangan akhir, akan tetapi berdasarkan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, rencana pembangunan Kota Balikpapan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan diantaranya:

- a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2015, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2013 dan mengacu Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 bagi Kabupaten/Kota;

- b. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018, tahun 2015 merupakan Tahun kedua dari tahapan Mewujudkan Kalimantan Timur sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agro industri dan energi ramah lingkungan;
- c. Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional Tahun 2015 secara adil dan merata, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang *pro poor*, *pro job*, dan *pro growth* serta *pro environment* perlu ditingkatkan, dengan memperhatikan kebijakan *Millenium Development Goals* (MDG's) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).

### **3) RPJMD Kota Balikpapan**

RPJM Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016; memuat visi, misi dan program prioritas Walikota terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016. Tema dasarnya adalah Pembulatan Pelaksanaan RPJMD 2011-2016.

### **4) RENJA – SKPD**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2015, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2015, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2015;

- b. mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011-2016, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- e. memasukan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
- f.

#### **1.4. Sistematika RKPD**

Sistematika RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

##### **PERATURAN WALIKOTA**

##### **DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

### **BAB VI PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Balikpapan, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

## **LAMPIRAN**

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk:



- a. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
- b. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.

## **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan RKPD Kota Balikpapan adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha.

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)**

No	Ketinggian mdpl	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13
2.	>10-20	17.260,00	34,7
3.	>20-100	26.090,57	51,66
<b>Jumlah</b>		<b>50.330,57</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2012*

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

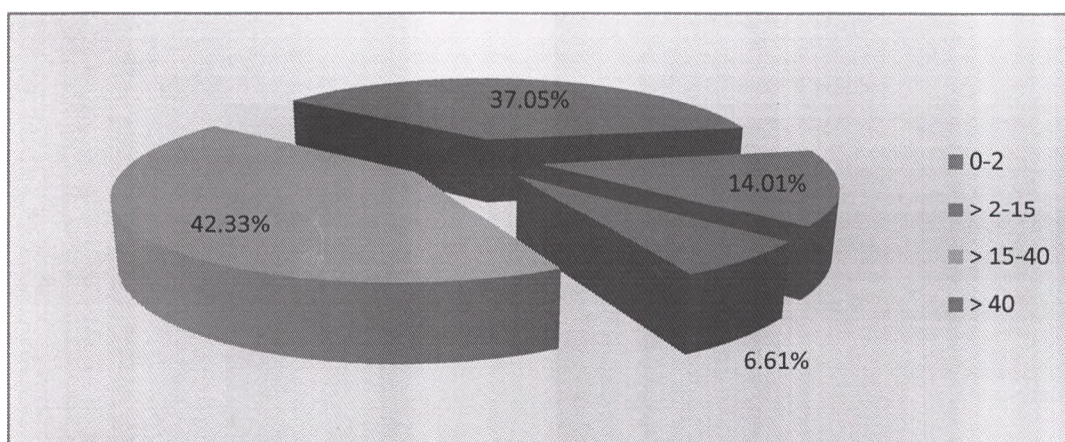
Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan**

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	14.01
2	> 2-15	3.325,00	6.61
3	> 15-40	21.305,57	42.33
4	> 40	18.650,00	37.05
<b>Jumlah</b>		<b>50.330,57</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2012*

**Gambar 2.1**  
**Diagram Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan**



*Sumber : Analisis Penyusun Revisi RTRW Kota Balikpapan, 2012*

Perkembangan pendudukan di Kota Balikpapan selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 614.681 jiwa menjadi sebanyak 639.031 jiwa pada tahun 2011 dan akan tetapi mengalami penurunan menjadi 635.199 pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 660.437 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 503,3 km<sup>2</sup> sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2013 adalah 1.312 jiwa per km<sup>2</sup>. Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kota Balikpapan dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2013**

KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN/Km <sup>2</sup>
BALIKPAPAN SELATAN	47,95	132.527	2763,86
BALIKPAPAN BARAT	179,95	99.373	552,23
BALIKPAPAN TIMUR	132,16	74.826	566,18
BALIKPAPAN TENGAH	11,07	114.668	10358,45
BALIKPAPAN UTARA	132,17	142.808	1080,49
BALIKPAPAN KOTA	-	96.235	-
<b>JUMLAH</b>	<b>503,3</b>	<b>660.437</b>	<b>1312,21</b>

*Sumber: Disdukcapil Balikpapan*

Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan struktur usia dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0 - 4	38.213	40.283	42.252	44.794	37.012	49.205
5 - 9	53.920	55.468	54.520	56.657	57.896	61.059
10 - 14	52.445	53.640	53.272	54.923	56.544	59.156
15 - 19	46.140	47.421	48.177	50.551	52.156	54.641
20 - 24	56.410	55.870	54.138	54.529	53.896	56.199
25 - 29	72.724	72.416	68.530	69.030	65.501	64.858

30 - 34	69.466	72.166	69.763	71.954	71.943	73.245
35 - 39	58.346	60.291	58.724	62.548	62.383	64.537
40 - 44	45.592	48.387	47.225	49.609	51.888	53.564
45 - 49	36.916	38.477	38.543	40.722	40.355	42.470
50 - 54	28.269	29.607	31.007	31.387	32.945	34.051
55 - 59	18.666	21.202	21.211	23.253	23.825	25.396
60 - 64	9.702	11.043	11.845	12.878	14.640	16.080
65 +	14.583	15.591	15.364	16.196	16.465	7.862
Jumlah	601.392	621.862	614.571	639.031	637.448	662.323
<i>Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan</i>						

Selanjutnya struktur penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2013 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Kecamatan					
	Balikpapan Barat	Balikpapan Utara	Balikpapan Timur	Balikpapan Tengah	Balikpapan Selatan	Balikpapan Kota
Belum Bekerja	52.884	70.799	41.621	48.135	62.006	43.152
Pelajar/ Mahasiswa	15.312	23.102	10.116	22.366	26.055	18.207
Pegawai Negeri	723	2.286	677	1.497	2.865	1.607
Karyawan	13.933	26.759	9.742	27.457	28.623	19.510
Buruh	7.693	6.290	3.778	5.508	4.947	3.769
Tukang	205	327	140	320	141	115
Pedagang	3.521	1.925	1.262	2.394	1.767	2.477
Petani	213	2.017	2.343	112	533	52
Edukasi	577	1.417	548	995	1.020	705
Profesi	488	866	191	378	332	227
Medis	127	526	95	308	489	368

Lain-Lain	3.860	6.490	3.684	4.468	3.961	3.521
Jumlah	99.536	142.804	74.197	113.938	132.739	93.710
<i>Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.</i>						

Sedangkan komposisi penduduk sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menurut tingkat pendidikan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2008-2013**

Pendidikan	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tidak/Belum Sekolah	8.690	8.541	120.293	126.131	124.940	138.084
Tidak/Belum Tamat SD	47.509	55.501	-	-	13.865	24.514
Tamat SD	83.754	80.749	146.995	148.908	140.452	132.928
Tamat SLTP	76.126	80.404	88.241	90.209	94.170	96.521
Tamat SLTA	149.021	140.008	185.444	196.037	202.964	212.525
Tamat Perguruan Tinggi	46.274	51.030	55.002	58.554	61.057	42.480
<i>Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan</i>						

## **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **a. Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Balikpapan tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**PDRB Kota Balikpapan Tahun 2012-2013**

No	Lapangan Usaha	Atas dasar harga konstan				Atas dasar harga berlaku			
		(juta Rp)				(juta Rp)			
		2012		2013***		2012		2013***	
1	Pertanian	486.828,36	3,66	492.273,55	3,40	776.321,93	2,94	785.035,47	2,72
2	Pertambangan dan Penggalan	7.435,29	0,06	7.890,33	0,05	31.660,68	0,12	33.633,14	0,12
3	Industri Pengolahan	311.346,45	2,34	317.592,46	2,19	575.997,36	2,18	587.544,78	2,04
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	189.907,11	1,43	204.531,98	1,41	471.116,06	1,78	653.259,34	2,27
5	Bangunan	3.820.302,90	28,76	4.460.203,64	30,80	9.356.005,53	35,44	10.925.943,25	37,89
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4.863.573,67	36,61	5.048.482,28	34,86	7.820.840,35	29,62	7.897.607,90	27,39
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.549.892,58	19,20	2.861.850,17	19,76	3.884.037,42	14,71	4.294.445,21	14,89
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	547.363,87	4,12	577.692,77	3,99	1.905.199,15	7,22	2.007.642,71	6,96
9	Jasa-jasa	507.399,67	3,82	512.448,32	3,54	1.578.769,15	5,98	1.649.594,08	5,72
	TOTAL	13.284.049,88	100	14.482.965,50	100	26.399.947,62	100	28.834.705,87	100

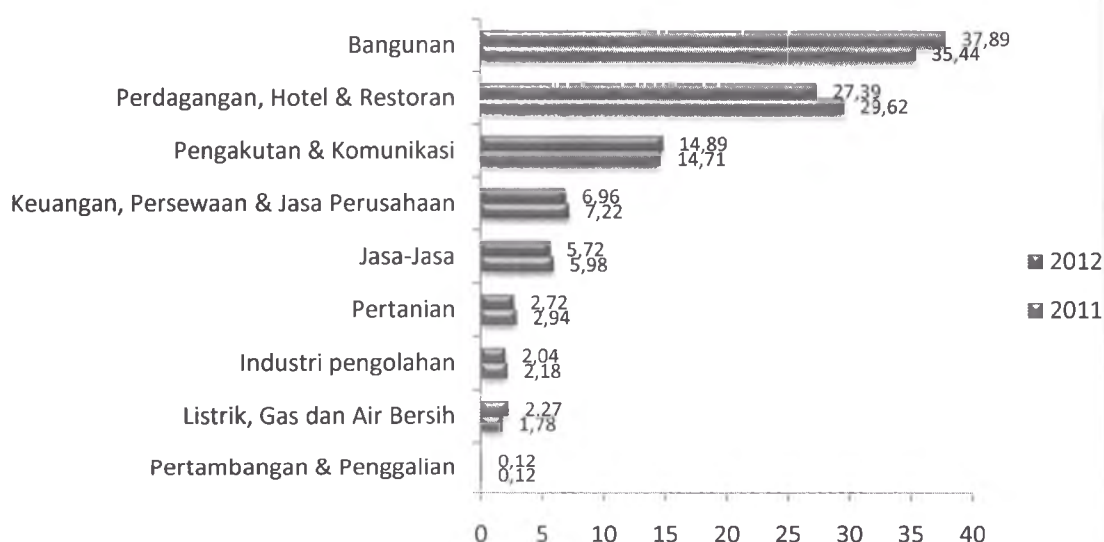
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah \*\*\*) Angka Proyeksi

Dari tabel tersebut dapat dilihat kontribusi dari PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 bahwa kontribusi sektor bangunan memberikan 37,89 % hal ini menggambarkan bergeliatnya pembangunan di kota Balikpapan, yang menyebabkan sumbangan kontribusi bangunan mengalami peningkatan dari tahun 2012 adalah pelaksanaan pembangunan bandara internasional sepinggan tahap akhir dan menggeliatnya pertumbuhan properti di Kota Balikpapan

Kontribusi sektor terbesar kedua pada tahun 2013 berdasarkan harga berlaku adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan salah satu sektor unggulan Kota Balikpapan. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2013, sebesar 27,39 % terhadap perekonomian Kota Balikpapan dan mengalami sedikit penurunan kontribusi dibanding tahun 2012 sebesar 29,62%. Sedangkan, kontribusi sektor terbesar ketiga disumbangkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2013 mencapai 14,71%.

Grafik berikut menggambarkan kontribusi sektoral PDRB di Kota Balikpapan selama periode 2012-2013 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (sektor Bangun) hingga nilai kontribusi terkecil (sektor Pertambangan dan Penggalian) dengan menggunakan harga berlaku.

**Grafik 2.1**  
**Kontribusi Sektoral PDRB Kota Balikpapan Periode 2012-2013 (Harga Berlaku)**

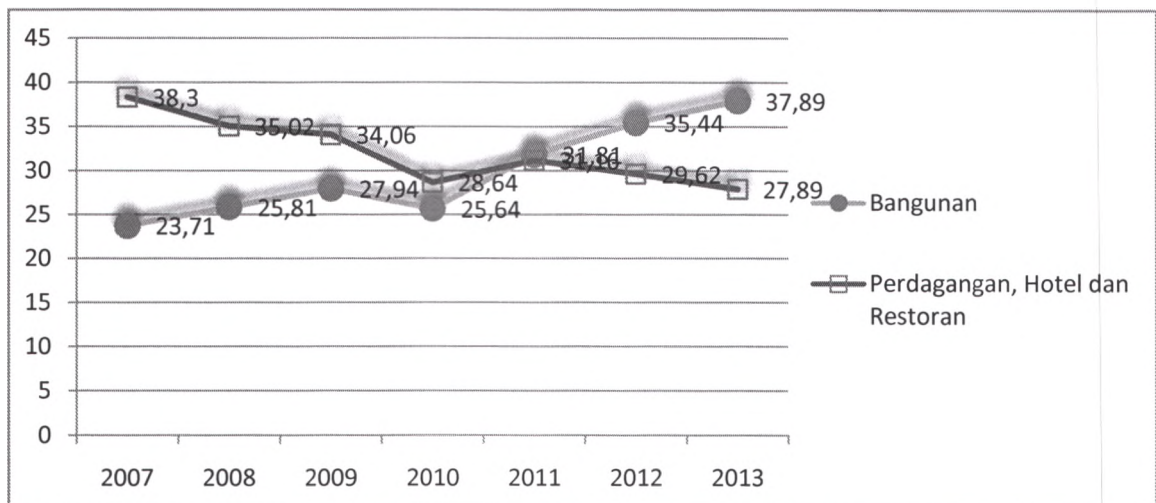




Jika dilihat tren periode yang lebih lama, mulai dari tahun 2007 hingga 2013 terlihat bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan, perkembangan kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa kota Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin menggeliatnya perkembangan perekonomian kota.

Namun jika dilihat perkembangan terakhir di tahun 2010-2013 yang menunjukkan bahwa adanya pergeseran kontribusi dimana sektor bangunan mengalami peningkatan dan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran mengalami perlambatan. Di lain pihak investasi yang ditanamkan pada sektor perdagangan hotel dan restoran mengalami peningkatan signifikan hal ini terlihat dari jumlah hotel dan penginapan serta kamar yang terjual juga terus menunjukkan peningkatan. diharapkan sektor ini di masa depan dapat memberikan sumbangsih yang lebih tinggi lagi terhadap perekonomian Kota Balikpapan, hal ini diharapkan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan.

**Grafik 2.2**  
**Tren Kontribusi Sektor Bangunan dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran**  
**Periode 2007-2013**



Dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Balikpapan ialah ekonomi yang berfokus pada perdagangan, jasa dan industri dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkembangnya industri di Kota Balikpapan tidak lepas dari

sporting dan keberadaan pendukung untuk industri berbasis mining, dan menjadikan salah satu faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah di Kota Balikpapan.

Sektor pariwisata juga merupakan andalan sektor jasa Kota Balikpapan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, membangkitkan kunjungan wisatawan, membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, serta menghidupkan kembali seni dan budaya tradisional Balikpapan. Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur merupakan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Kota Balikpapan ditetapkan sebagai kota MICE.

#### **b. Laju Inflasi**

Inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2013 sebesar 8,56%. Inflasi di Kota Balikpapan berada dibawah inflasi provinsi, dimana inflasi provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,65% dan Inflasi kota Balikpapan yang terendah di Kalimantan Timur. Inflasi di Kota Balikpapan ini meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,41%, kelompok bahan makanan, perumahan dan transportasi masih menjadi pemberi andil terbesar bagi inflasi kota Balikpapan dengan total menyumbang 78% dari inflasi keseluruhan kota Balikpapan di tahun 2013 selain hal tersebut kondisi khusus yang memicu inflasi ditahun 2013, antara lain kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah pada bulan juni 2013, dampak langsung dari kenaikan BBM bersubsidi tersebut adalah pada tarif angkutan. Sementara kenaikan tarif dasar listrik pada industri maupun rumah tangga yang dilakukan secara bertahap mulai awal 2013, turut pula memberikan dampak pada inflasi. Selain itu tersebut 95% pasokan kebutuhan pokok didatangkan dari luar Balikpapan, selain dipengaruhi oleh harga produksi barang itu sendiri, terutama juga sangat dipengaruhi oleh distribusi barang, infrastruktur bangkar muat di pelabuhan dan kondisi cuaca.

Untuk itu melalui Tim pengendali Inflasi Daerah Kota Balikpapan untuk mengendalikan inflasi telah diupayakan melalui kebijakan dan Program pemerintah kota yaitu:

- Instrumen untuk mengatasi inflasi pendidikan, Keputusan walikota untuk penggunaan seragam baru, bantuan sekolah swasta dari APBD;

- Menggalakkan kembali Gerakan Rumah Pangan Lestari, dengan memberikan pembinaan kepada seluruh rumah tangga untuk melakukan budidaya : untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagai income rumah tangga (dapat menghasilkan bibit sendiri);
- Publikasi harga komoditas melalui PIHPS Sahabat Balikpapan, masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat secara luas, kerjasama dengan beberapa media. Permintaan harga agar dapat tersedia pada jam 05.00;
- Operasi pasar untuk mengantisipasi gejolak harga di pasar;
- Peran dari Bulog Mart dan Pasar Tani sebagai penyeimbang harga di pasaran, pasar tani sedang mencari lokasi yang tepat untuk memotong mata rantai dari petani – konsumen;
- Koordinasi pembibitan dan penggemukan ternak sapi, kendala lahan yang terbatas. Termasuk lahan pertanian yang kecil sehingga akan dimasukkan dalam Rencana Detail Tata Ruang sehingga tidak akan bisa alih fungsi lahan;
- TPID menginisiasi kuota pengisian BBM bersubsidi (sepeda motor Rp.30.000, Mobil Rp.150.000-, kendaraan roda enam Rp.400.000,-, → masukan kepada Kementerian ESDM;
- Program 2014, Percepatan kawasan Pergudangan di Kariangau, packing plan;
- Peningkatan produksi tanaman padi ladang, pemanfaatan lahan pekarangan;
- Pengawasan lebih intensif kondisi stock distributor terutama untuk beberapa komoditas strategis seperti sembako, semen;
- Pemanfaatan gas metan dari sampah untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif;
- Pemantauan harga beras palawija – disinergikan dengan program operasi pasar;
- Jadwal pasar murah ramadhan, melibatkan pihak perbankan;

## **2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator (makro) lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

Tabel berikut menguraikan beberapa indikator makro strategis Kota Balikpapan untuk dapat melihat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Tabel 2.8  
Indikator Makro Kota Balikpapan

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2008	2009	2010	2011	2012	2012
1	IPM		77,31	77,86	78,33	78,83	79,38	79,45***
2	Angka Harapan Hidup AHH-o	Tahun	71,32	71,95	72,61	72,39	72,61	72,65***
3	Angka Melek Hurup (AMH)	%	98,32	98,37	98,76	98,76	98,86	99,03***
4	Pritas Daya Beli	(Ribu Rp.)	646,41	651,65	654,78	657,93	661,33	662,27***
5	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,03	10,05	10,08	10,28	10,46	19,54***
6	LPE (Konstan)	Persen	10,46	8,78	8,34	8,61	8,66	9,03***
7	LPE (Berlaku)	Persen	17,12	18,80	12,65	12,61	15,37	9,22***
8	PDRB (Berlaku)	(Juta Rp.)	15.580.564,47	17.467.621,67	19.997.414,64	22.882.879,62	26.399.947,62	28.834.705,87
9	PDRB (Konstan)	(Juta Rp.)	9.551.793,79	10.390.239,95	11.256.798,09	12.225.720,59	13.284.049,89	14.482.965,50
10	Inflasi	Persen	11,30	3,67	7,38	6,45	6,41	8,56
11	Pengangguran (mencari kerja)	Jiwa	15,210	15,079	16,152	34,773	24,963	22,564

Sumber: BPS Kota Balikpapan diolah

Ket : \*\*\*) Angka Proyeksi

Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel tersebut, secara umum indikator makro ekonomi Kota Balikpapan periode 2008-2013 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan

masyarakat Kota Balikpapan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Adapun penjelasan singkat data-data pada tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2008 IPM Kota Balikpapan sebesar 77,31, pada tahun 2013 diproyeksi mengalami peningkatan menjadi 79,45. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

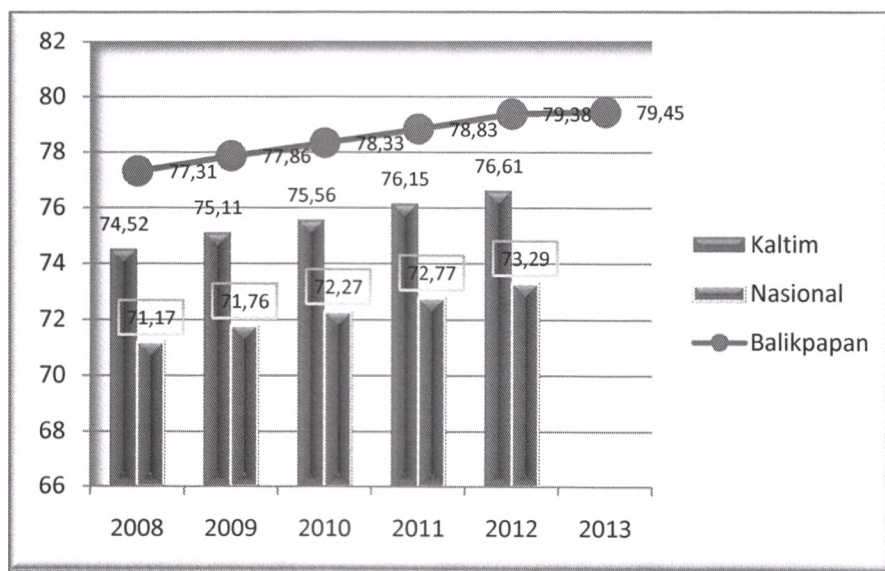
Ukuran yang umum dipakai untuk mengetahui status kemajuan pembangunan manusia adalah indeks pembangun manusia, indeks ini adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 (tiga) komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir (2) Pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tertimbang antara angka melek huruf penduduk usia dewasa dengan rata-rata pencapaian tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan (3) standar kehidupan layak yang diwakili oleh PDRB perkapita dan paritas daya beli perkapita.

Situasi pembangunan Manusia dimana Bidang pendidikan yang diwakili dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan. Salah satu penyebab adanya peningkatan dibidang pendidikan ialah semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan, dan adanya kebijakan dan program Pengurangan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Kota Balikpapan yang serta peningkatan aspek kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan sarana prasarana dalam hal pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang terpenting disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Peningkatan yang serupa juga terjadi di bidang kesehatan. Jika pada tahun 2008 nilai indeks ini berada pada nilai 71,52, pada tahun 2012 meningkat menjadi 72,61. Dan diproyeksi pada tahun 2013 menjadi 72,65, Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan menjadi lebih baik setiap tahunnya. Indeks ekonomi (paritas daya beli) juga mengalami meningkat selama periode 2008-2012, dimana pada tahun 2008 sudah berada di kisaran Rp. 646,41 meningkat pada tahun 2012 menjadi 661,33 dan diproyeksi tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 662.540.

**Grafik 2.3**

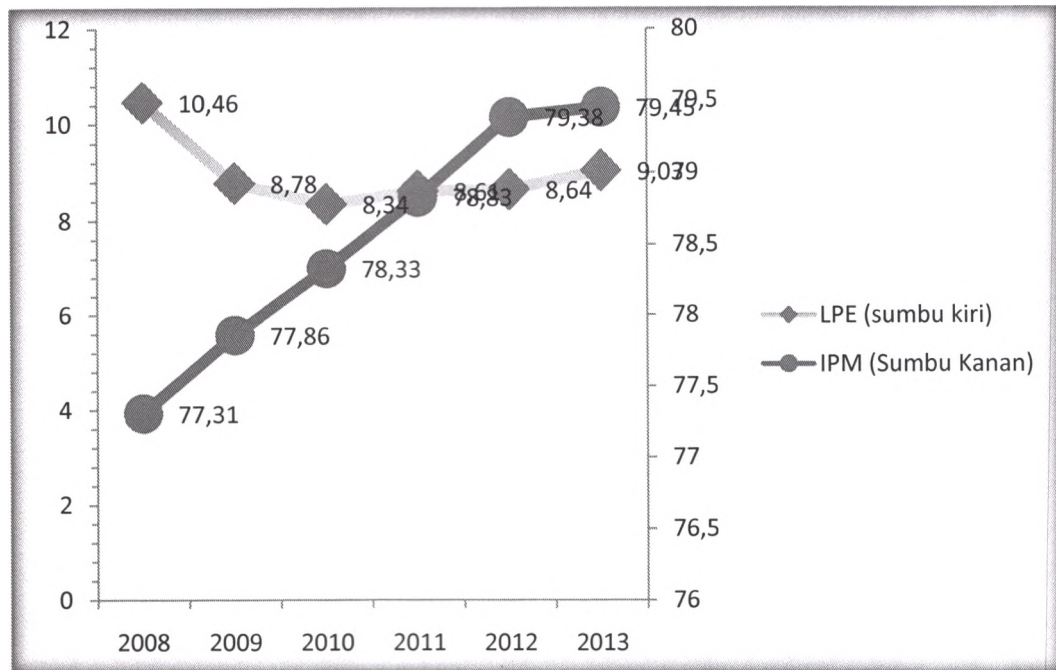
**Perbandingan IPM Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Tingkat Nasional Periode 2007-2011**



Jika dilakukan komparasi dengan tingkat nasional dan provinsi Kalimantan Timur, perkembangan IPM Kota Balikpapan relatif lebih baik. Pada tingkat nasional, IPM pada tahun 2008 hanya mencapai nilai 77,31 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 79,38 dan diproyeksi pada tahun 2013 meningkat menjadi 79,45. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2008, IPM Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai nilai 74,52 dan meningkat menjadi 76,61 pada tahun 2012 dan IPM Kota Balikpapan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur, ini memberikan indikasi bahwa potensi yang ada di Kota Balikpapan memiliki keunggulan yang relatif lebih baik dan patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam peningkatan pembangunan di segala bidang secara berkelanjutan.

Grafik 2.4

Tren IPM dan laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan tahun 2007-2012



Jika dilihat trennya, perkembangan kenaikan IPM Kota Balikpapan juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relation-ship*) antara modal manusia (*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (*human development*). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Di sisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, maka akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreatifitas dan produktivitas masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, LPE Kota Balikpapan dalam periode 2008-2013 mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2012 menurut mencapai 8,64% dan proyeksikan pada tahun 2013 sebesar 9,03. Besaran perekonomian yang diindikasikan dengan nilai PDRB juga mengalami perkembangan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Balikpapan pada tahun 2008 mencapai Rp.15,58 triliun dan meningkat menjadi Rp.26,39 triliun pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 204,42% dan di proyeksi pada tahun 2013 menjadi Rp. 28,83 triliun, Jika dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pada tahun 2008 nilainya mencapai Rp 9,55 triliun dan

meningkat menjadi Rp 13,28 triliun di tahun 2012, atau meningkat sebesar 153,16% dan diproyeksi pada tahun 2013 menjadi Rp. 14,48 triliun.

Indikasi kesejahteraan masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan pendapatan per kapita juga menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Jika pada tahun 2008 pendapatan per kapita baru mencapai Rp 21,36 juta pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 36,70 juta dan diproyeksikan pada tahun 2013 menjadi Rp.37,97 juta.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

##### **a. Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak/besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sesuai dengan jenjangnya. APS untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun di Kota Balikpapan cenderung meningkat. Hal ini berarti persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan semakin meningkat. Pada tahun 2012 APS usia 7-12 sebesar 99,23 persen yang berarti sudah 99,23 persen penduduk usia 7-12 tahun di daerah ini yang bersekolah, namun masih terdapat sisanya 0,41 persen tidak bersekolah. Begitu pula dengan APS usia 13-15 tahun 2012 sebesar 92,38 persen yang berarti sudah 92,38 persen penduduk usia 13-15 tahun di daerah ini yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 7,62 persen tidak bersekolah.

Selanjutnya APS usia 16-18 tahun sebesar 69,66 persen yang berarti sudah 69,66 persen penduduk usia 16-18 tahun di daerah ini yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 30,34 persen tidak bersekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008 s.d 2012**

<b>NO</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1.	APS SD/MI	99,14	97,33	99,21	99,59	99,23
2.	APS SMP/MTs	94,67	93,07	93,83	91,79	92,38



3.	APS SMA	75,66	69,40	70,79	61,03	69,66
----	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Kota Balikpapan, dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Tabel. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2012**

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	140	140	140	144	159
1.1.	Jumlah gedung sekolah	183	188	188	424	342
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55,207	54,486	54,486	75,805	71,889
1.3.	Rasio	56,78	55,21	55,53	145,42	
2	SMP/MTs	79	67	78	79	81
2.1.	Jumlah gedung sekolah	74	66	67	133	135
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	16,621	18,419	5,155	14,057	33,679
2.3.	Rasio	42,39	41,71	44,05	1,066,67	

**Tabel 2.11**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012**

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5=3/4) \times 10.000$	(6)	(7)	$(8=6/7) \times 10.000$
1	Balikpapan Timur	48	100,00	48,00	8	95,29	83,95
2	Balikpapan Barat	56	97,95	57,17	11	88,58	12,418
3	Balikpapan Tengah	52	100,00	52,00	11	100,00	1100,00
4	Balikpapan Selatan	112	100,00	112,00	22	87,63	25,105

5	Balikpapan Utara	75	97,87	76,63	17	95,62	1777,87
6	Balikpapan Kota	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	342	495,82	345,8	69	92,38	7469,14

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid di Kota Balikpapan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2013 Kota Balikpapan**

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	2.550	2.838	2.838	2.678	2.678	3.846
1.2.	Jumlah Murid	68.240	64.905	64.905	66.359	66.359	78.285
1.3.	Rasio	13,67	16,21	15,59	16,34	16,26	2443.7
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	1.473	1.569	1.569	1.577	1.608	1.638
2.2.	Jumlah Murid	14.646	26.063	26.063	10.775	27.140	28.062
2.3.	Rasio	12,40	12,99	12,76	12,50	16,88	2063.8

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan 2013**

NO	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
-1	-2	-3	-4	$(5=3/4) \times 10.000$	-6	-7	$(8=6/7) \times 10.000$
1	Balikpapan Timur	448	9.280	482.7	127	3.323	382.1
2	Balikpapan Barat	508	11.258	451.2	156	3.657	426.5
3	Balikpapan Tengah	724	13.499	536.3	123	2.791	440.7
4	Balikpapan Selatan	1.365	27.405	498.0	420	10.585	396.7
5	Balikpapan Utara	801	16.843	475.5	322	7.706	417.8
	Jumlah	3.846	78.285	2443.7	1.148	28.062	2063.8

## **b. Kesehatan**

Di bidang kesehatan jumlah kelahiran yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, dimana pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 87,43%, 91,20%, 85,52%, 90,95%, 92,47% dan 93,82. Sementara itu kelahiran yang ditolong oleh dukun terlatih

semakin menurun persentasenya yaitu sebesar 5,90%, 1,72%, 0,76%, 0,78%, dan 0,63%. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan lainnya termasuk meningkatnya jumlah tenaga kesehatan. Selain itu timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sebagai dampak langsung dari keberhasilan program penyuluhan yang telah dilakukan. Kondisi ini berdampak pada peningkatan indikator kesehatan masyarakat seperti angka Usia harapan hidup pada periode yang sama yaitu sebesar 71,73 tahun, 71,95 tahun, 72,17 tahun, 72,30 tahun. Selain itu menurunnya angka kematian bayi yaitu: 3,14 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran, menurun menjadi 2,41 bayi, 3,7 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran, 4,60 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran dan terakhir 5 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran.

## 2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Realisasi unit usaha /investor PMDN dan PMA Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.14  
Jumlah unit usaha PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2013 Kota Balikpapan

Tahun	PMDN	PMA	Total
1	2	3	(4=3+2)
2012	1	2	3
2013	-	15	15

Dimana realisasi pada tahun 2012 PMDN dan PMA sebanyak 3 investasi dan meningkat menjadi 15 pada tahun 2013. Dimana pada tahun 2013 realisasi yang menanamkan investasi hanya PMA.

### b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA tahun 2012-2013

**Tabel 2.15**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2013 Kota Balikpapan**

Tahun	Rencana (000.000 Rp)			Realisasi (000.000 Rp)		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Tenaga kerja	JumlahProyek	Nilai Investasi	Tenaga kerja
2012	31	1.540.887.000.000,00	627	4	158.200.000.000,00	258
2013	35	4.606.569.800.000,00	1.305	12	495.348.000.000,00	387

Jumlah Rencana nilai investasi pada tahun 2013 sebesar 4,5 Trilyun dengan realisasi sebesar 158,20 Milyar tumbuh sangat tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2012 dimana tumbuh sebesar 213% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 158,20 milyar.

Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN, semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 12 perusahaan PMA/PMDN berjumlah sebanyak 387 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 258 orang.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

##### **1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)**

**Tabel 2.16**  
**Angka Konsumsi Rumah Tangga (Ruta) perkapita Kota Balikpapan Tahun 2008 s.d 2012 dan proyeksi 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013***
Konsumsi Perkapita (Rp) (1/2 x 1.000.0000)	867.151,00	993.179,00	1.028.933,00	1.123.784	1.281.426	1.313.790

*Sumber BPS kota Balikpapan diolah*

*\*\*\* proyeksi*

Dari tabel diatas dapat dilihat angka konsumsi rumah tangga (ruta) perkapita kota Balikpapan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat rata-rata pengeluaran penduduk untuk makanan mencapai 550.409 rupiah per kapita sebulan lebih rendah dari pengeluaran bukan makanan dengan rata-rata pengeluaran 731.017 rupiah. Total pengeluaran secara rata-rata mencapai sekitar 1.281.426 rupiah. Pengeluaran non makanan yang lebih besar dibandingkan makanan merupakan ciri pengeluaran di wilayah perkotaan. Ini mengidentifikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Balikpapan semakin membaik. Dan pada tahun 2013 diprediksi pengeluaran perkapita rumah tangga kota Balikpapan sebesar 1.313.790.

## **2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat daya saing daerah. Berikut ini diuraikan fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kota Balikpapan.

### **a. Infrastruktur Perhubungan**

Sarana jalan raya adalah bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Balikpapan. Selain itu ada sarana perhubungan pelabuhan Semayang dan perhubungan udara Internasional Sepinggian. Sebagai sarana utama jalan raya di Kota Balikpapan, panjang jalan di Kota Balikpapan pada tahun 2011 adalah sepanjang 799,42 km dengan rincian sesuai status jalan sebagai berikut :

- Jalan Nasional : 115,0 Km
- Jalan Propinsi : 221,07 Km
- Jalan Kota : 463,35 Km

Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 97,65 km atau 84,91%, kondisi sedang sepanjang 15,33 Km atau 13,33% dan kondisi rusak 2 km. Untuk jalan Propinsi dalam kondisi baik sepanjang 146,43 km atau 66,23%, kondisi sedang sepanjang 51,43 Km atau 23,23% dan kondisi rusak 23,3 Km atau 10,49%. Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 305,42 km atau 65,91%, kondisi sedang sepanjang 96,99 Km atau 20,93% dan kondisi rusak 60,94 Km atau 13,15%.

Sebagai kota yang secara fisik berbatasan dengan laut, maka Kota Balikpapan memiliki beberapa fasilitas pelabuhan baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus. Pelabuhan umum terdiri dari Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Fery Kariangau, Pelabuhan Kampung Baru. Sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari Pelabuhan Pertamina, Pelabuhan Pendaratan Ikan Manggar, dan Pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan di Kawasan Industri Kariangau.

Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada di pusat kota saat ini menimbulkan bangkitan lalu-lintas yang cukup tinggi terlebih lagi adanya peningkatan bongkar muat barang dan penumpang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelabuhan ini hanya akan dioperasionalkan untuk pelabuhan penumpang. Sedangkan pelabuhan bongkar muat barang akan dikembangkan di Kariangau.

Bandar Udara Sepinggian saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun kapasitas bandaranya relatif terbatas dalam menampung penumpang. Oleh karena itu pengembangan bandara baik dari segi run way maupun terminal akan mampu meningkatkan pelayanan Bandara Udara Sepinggian.

Secara umum kondisi perhubungan Kota Balikpapan saat ini mulai menghadapi masalah serius dan semakin menjadi ancaman besar di masa datang bila tidak dilakukan terobosan penting. Terlebih lagi dengan perkembangan kota dan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Sehingga Sangat dibutuhkan sistem angkutan umum massal sebagai salah satu solusinya.

## **b. Sarana Lingkungan (Sanitasi, Drainase, Sampah)**

### **1. Air Limbah**

Berdasarkan laporan final Master Plan Air Limbah, perkiraan total produksi air limbah domestik (rumah tangga) untuk black dan grey water di Kota Balikpapan sampai tahun 2015 adalah sekitar 86.312 m<sup>3</sup>/hari. Untuk mengolah air limbah domestik Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai beberapa layanan yaitu Layanan IPAL Margasari, Layanan IPAL komunal dan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai MCK ++ berada di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Margo Mulyo RT 26 dikelola oleh KSM Tirta Guna dengan jumlah pengguna 83 KK sedangkan Kelurahan Margo Mulyo RT 25 dikelola oleh KSM Sendang Makmur dengan jumlah pengguna 70 KK.

## **2. Drainase**

Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung bermuara di teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pematuan kota Balikpapan. Tidak ada saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pematuan dan air buangan keluar daerah perkotaan. Semua saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase.

Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah sumber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m.

Kondisi drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga sering kali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan.

## **3. Persampahan**

Berdasarkan Master Plan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Balikpapan, pada tahun 2011 kondisi limbah padat (sampah domestik) di Kota Balikpapan yang dihasilkan perhari diperkirakan sebanyak 381 ton/hari dan jumlah sampah yang dapat diangkut dan dikelola DKPP Kota Balikpapan sebesar 250 ton/hari. Kondisi sanitasi kota juga sangat dipengaruhi keberadaan tempat pengumpulan sampah sementara (TPS). Standar pelayanan minimal pelayanan persampahan menetapkan dalam penyediaan sarana pengumpul untuk 1 m<sup>3</sup> wadah sampah melayani 200 KK, berdasarkan Masterplan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Balikpapan total kapasitas TPS berupa container dan TPS beton mencapai 1.403,85 m<sup>3</sup>/hari, sehingga nilai kecukupan mencapai 100%, sedangkan pelayanan terhadap penduduk mencapai angka 1 m<sup>3</sup>/88 KK. Hal ini memperlihatkan bahwa berdasarkan kapasitasnya, jumlah sarana pengumpulan sampah di Kota Balikpapan telah mencukupi kebutuhan.

Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar dengan sistem *sanitary landfill*. Untuk pengembangan TPA saat ini sedang dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan air lindi dan pembangunan cell 2 dan 3 yang akan mampu melayani 5 (lima) tahun kedepan. Program pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui pengembangan composting, memacu program 3R dan pengembangan bank sampah. selama tahun 2011 telah berhasil mengurangi produksi sampah sebesar 8,92% melalui program komposting sebesar 525 ton/bulan, *recycle* mencapai 564 ton/bulan dan penggunaan yang lain sebesar 86 ton/bulan.

Program pengembangan dan pengelolaan sanitasi yang meliputi air bersih, drainase, persampahan serta pola hidup bersih dan sehat selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan *clean land*, *clean water* dan *clean air* telah disusun secara terpadu dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Balikpapan 2012-2016.

### **c. Air Minum ( Air Bersih )**

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan dipenuhi dari beberapa sumber yaitu jaringan perpipaan yang dikelola PDAM, PT. Pertamina dan kawasan perumahan tertentu, hidrant umum yang dikelola PDAM, mobil tangki yang dikelola swasta, sumur dalam, sumur dangkal dan air hujan.

Sumber air baku saat ini sangat tergantung pada Waduk Manggar untuk pelayanan seluruh warga kota dan Waduk Pertamina di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain untuk memenuhi kebutuhan operasional kilang dan perumahan PT.Pertamina.

Tingkat cakupan layanan air bersih oleh PDAM saat ini mencapai 72,15% atau sekitar 77.708 sambungan rumah dengan kapasitas produksi PDAM 1.108 lt/dt dan presentasi kehilangan air bersih rata-rata pertahun 30,69%.

Kebutuhan air baku rata-rata pada tahun 2025 mencapai 2.179 lt/detik. Saat ini kapasitas air baku hanya 1.140 lt/dt. Untuk memenuhi kebutuhan air baku tersebut pembangunan Waduk Teritip dan Waduk Wain harus dipercepat. Jika kedua waduk tersebut terbangun maka akan menghasilkan air baku dengan kapasitas 420 lt/dt.



Program penyediaan air baku dan air bersih baik jangka pendek (2011-2015) maupun jangka panjang (2016-2020) khususnya yang dikelola PDAM akan dikembangkan sesuai dengan revisi master plan sistem penyediaan air bersih PDAM Kota Balikpapan Tahun 2005-2020.

**d. Sarana Pendidikan**

Sebagai Kota Pendidikan, Kota Balikpapan selalu menjadi tujuan utama para pelajar untuk mengenyam pendidikan, karena Kota Balikpapan memiliki kualitas yang baik dibanding dengan daerah disekitarnya. Sampai dengan Tahun 2013, Kota Balikpapan memiliki 147 TK/RA, 195 SD/MI, 69 SMP/MTs dan 52 SMA/SMK/MA yang tersebar di 6 Kecamatan (Sumber : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan).

Sebagai Kota Pendidikan, Kota Balikpapan memiliki 1 (satu) Politeknik Negeri (Politeknik Balikpapan) dan 13 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 7 Akademi (Sumber Balikpapan Dalam Angka Tahun 2012).

Akan tetapi penyebaran Lembaga Pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sarana prasarana pendidikan, maupun ketenagaan pendidikan, dimana hal ini akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan, dengan munculnya sekolah favorit dan sekolah yang kurang favorit.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan, diantaranya melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, antara lain melalui Role Sharing antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, akan tetapi kondisi sarana prasarana pendidikan belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Rekapitulasi Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2012**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TK/RA	525	157	4	4
SD/MI	1548	1369	136	43
SMP/MTs	777	721	45	11
SMA/SMK/MA	565	547	18	0

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan 2013 (data diolah)*

Dari kondisi tersebut, di masa datang patut diperhatikan mengenai sebaran sarana pendidikan dan penataan kawasan pendidikan. Hal ini dapat mengurangi pergerakan penduduk khususnya siswa/mahasiswa agar lebih efisien dan tidak terlalu lama dalam perjalanan menuju lokasi belajar. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan dan pengembangan sarana pendidikan juga dapat menjadi alternatif penting.

Dalam hal ketenagaan pendidikan, Kota Balikpapan memiliki Guru sebanyak 3.156 orang guru SD/MI, 1.638 orang guru SMP/MTs dan 1.741 orang guru SLTA/MA terbanyak adalah guru Sekolah Dasar dan guru SLTA. Rasio guru per sekolah semakin meningkat bila jenjang pendidikan semakin tinggi, karena kebutuhan bidang ilmu yang semakin spesifik.

Tingkat pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio siswa per kelas. Pada tingkat Taman Kanak-Kanak, rasio siswa per kelas sebanyak 35 orang, SD sebanyak 40 orang, SLTP sebanyak 47 orang, SLTA sebanyak 37 orang. Pada tingkat SLTP jumlah anak yang bersekolah relatif banyak bila dibandingkan dengan daya tampung, sehingga rasio per kelas melebihi 40 siswa. Pada tingkat SLTA, rasio ini semakin menurun, karena relatif lebih banyak yang tidak melanjutkan studi.

#### **e. Sarana Kesehatan**

Sarana Kesehatan Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2013 adalah 20 unit Puskesmas, 6 unit Puskesmas Perawatan, 13 unit Puskesmas Pembantu, 1 Unit UPTD Laboratorium dan Rontgen dan 1 unit UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan.

Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya adalah Praktek Dokter Umum 250 Orang, Praktek Dokter Gigi 16 Orang, Praktek Bidan 160 Orang, Praktek Dokter Spesialis 159 Orang, Balai Pengobatan Swasta 15 buah, Klinik Kesehatan 14 buah, Laboratorium Klinik 13 buah, Apotek sebanyak 129 buah, Toko Obat 75 buah.

Rumah Sakit di Kota Balikpapan berjumlah 11 unit, 4 unit diantaranya milik Pemerintah, yaitu RS Kanudjoso Djatiwibowo, RS DR. Hardjanto, RS Bhayangkari, dan Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu milik Pemerintah Kota Balikpapan, sedangkan Rumah Sakit Swasta berjumlah 7 unit, yaitu RS Pertamina Balikpapan, RS Restu Ibu, RS Siloam, RS Balikpapan Baru, RS Bersalin Permata Hati, dan RS Bersalin Kasih Bunda.

Memperhatikan perkembangan kota Balikpapan yang sangat pesat dan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi maka keberadaan sarana kesehatan Kota Balikpapan masih harus ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan permasalahan kesehatan perkotaan.

**f. Sarana Ekonomi**

Sarana ekonomi di Kota Balikpapan, khususnya untuk perdagangan dan jasa memiliki jenis beragam dan tumbuh dengan pola alamiah. Karena pertumbuhannya yang alami dan mengikuti kecenderungan pasar, maka beberapa pusat perdagangan skala besar dibangun dalam jarak terlalu dekat atau justru bersaing dengan pasar yang sudah ada. Usaha ritel dan grosir sudah menjadi tidak jelas lagi, sehingga persaingan dapat dikatakan kurang sehat. Toko-toko kecil sudah semakin terdesak oleh jaringan pertokoan besar dan pasar tradisional semakin terfokus pada produk-produk pertanian primer (*perishable goods*). Situasi seperti ini bagi ekonomi makro Kota Balikpapan dapat memunculkan potensi *crowding out* investasi, artinya investasi satu kegiatan tergeser oleh persaingan padahal belum mencapai titik keuntungan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya-biaya ekonomi di Kota Balikpapan.

Untuk itu pada perekonomian Kota Balikpapan diperlakukan aturan yang jelas dan tegas agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan produktif.

**g. Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka (tanpa bangunan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, jenis-jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Balikpapan dilihat dari segi kepemilikan dibagi menjadi 2 jenis RTH yaitu RTH Publik dan RTH Privat.

RTH privat merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat, misal: halaman rumah tinggal, perkantoran, tempat ibadah, sekolah atau kampus, hotel, rumah sakit, kawasan perdagangan (pertokoan, rumah makan), kawasan industri, stasiun, bandara, pelabuhan, dan lahan pertanian kota. Sedangkan RTH publik merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah) atau dapat diartikan sebagai lahan dengan tujuan penggunaan utamanya adalah ditanami berbagai jenis tetumbuhan untuk memelihara fungsi lingkungan, yang dikelola pemerintah kota dan dapat dipergunakan masyarakat umum, seperti taman rekreasi, taman olahraga, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau jalan, saluran umum tegangan ekstra tinggi (SUTET), bantaran kali, serta hutan kota konservasi, Hutan Kota wisata, Hutan Kota zona industri, Hutan Kota antar-zona permukiman, Hutan Kota tempat koleksi dan penangkaran flora dan fauna.

Ruang terbuka hijau publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan maupun Pemerintah Provinsi diantaranya yaitu semua jenis RTH jalur hijau, taman kota, makam, hutan kota dan hutan lindung. Selain kelima jenis RTH tersebut, RTH yang dimiliki oleh pemerintah kota yaitu RTH Kariangau, RTH Bendali I dan II, Kawasan Bantaran Sungai Jl. A. Yani Karang Jati, dan Kawasan RT.42 dan 55 Batu Ampar. Sedangkan ruang terbuka hijau privat (milik pribadi atau badan hukum) diantaranya yaitu Buffer Zone Pertamina Karang Jati (dikelola Pertamina), Kawasan Perumahan TNI AL Karang Jati (dikelola oleh TNI-AL), Hutan Kota Ponpes Syaichona Cholil (dikelola oleh pondok pesantren), Hutan Wisata Inhutani (dikelola PT.Inhutani), Hutan Kawasan Hutan Karangrejo dan Kawasan Hutan Prapatan (dikelola masyarakat). Selain ruang terbuka hijau diatas yang dikelola oleh pemerintah maupun pribadi atau badan hukum, juga terdapat RTH yang dikelola dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta yaitu Hutan Kota Gunung Komendur yang berlokasi di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota.

Sesuai RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032, 52% wilayah menjadi kawasan ruang terbuka hijau dan hanya 48% yang terbangun. Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan luas kawasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Kawasan Non budidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau, dapat dihasilkan luasan total Kawasan Non budidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang

ada di Kota Balikpapan yaitu 18.821,742 Ha atau 37,396% dari luas wilayah Kota Balikpapan (50.330,57 Ha). Untuk memenuhi prosentase 52%, maka arahan pengembangan kawasan non budidaya (ruang terbuka hijau) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**ARAHAN KAWASAN NON BUDIDAYA / LINDUNG KOTA BALIKPAPAN**

No.	Kawasan Non Budidaya/Lindung Ruang Terbuka Hijau	Luas	
		Ha	Prosentase Luas Terhadap Kota Balikpapan (%)
1	Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya		
	1. Hutan Lindung Sungai Wain	9,783.00	19.43
	2. Hutan Lindung DAS Manggar	4,998.99	9.93
	3. Kawasan Paruh Burung	1,449.098	2.88
	4. Kawasan Hutan Inhutani	2,723.322	5.41
	Sub Total	18,954.41	37.65
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	1. Kawasan Waduk	594.737	1.182
	a. Waduk Sungai Wain		
	b. Waduk Sungai Manggar		
	c. Bendali Sepinggan I		
	d. Bendali Sepinggan II		
	e. Bendali Batu Ampar		
	2. Pulau-pulau Kecil	130.348	0.259
	a. P. Benawa Besar		
	b. P. Benawa Kecil		
	c. P. Balang		
	d. P. Babi		
	e. P. Tukung		
	f. P. Lipan		
	g. P. Kelawanan		
	h. P. Tak Bernama		
	3. Buffer Zone Bendali	64.581	0.13
	4. Buffer zone hutan lindung	3,274.822	6.51
	5. Green belt waduk	199.46	0.40

	6. Sempadan sungai	121.317	0.24
Sub Total		4,385.26	8.72
3	Kawasan Suaka Alam		
	1. Kawasan Mangrove	1,302.42	2.588
	2. Wanawisata Inhutani	19.16	0.04
Sub Total		1,321.58	2.628
4	Ruang Terbuka Hijau		
	1. Tempat Pemakaman Umum (TPU)	99.25	0.19
	2. Taman dan Jalur Hijau	6.31	0.012
	3. Hutan Kota Eksisting	659.938	1.311
	4. Kawasan dengan Kemiringan > 40 %	678.543	1.35
Sub Total		1,444.041	2.86
5	Kawasan Non Budidaya dan RTH berdasarkan Peta Dasar	1,529.917	3,03
	Total Luas	27,635.213	54.90
<i>Sumber : Bappeda Kota Balikpapan (2009)</i>			

RTH pemakaman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada area pemakaman. Pemakaman umum tersebar di setiap Kecamatan di Kota Balikpapan. Pengelolaan pemakaman tersebut ada yang dikelola oleh pemerintah (Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman) namun ada juga yang dikelola oleh masyarakat setempat. Skala pelayanan pemakaman umum tersebut sebagian besar merupakan skala pelayanan lingkungan, namun ada juga yang berskala besar (kota).

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti sebagai sumber pendapatan.

RTH pemakaman umum di Kota Balikpapan juga merupakan salah satu sarana lain yang masih dapat dianggap mempunyai fungsi sebagai daerah terbuka hijau. Besar luas tanah pekuburan ini sangat tergantung dari sistem penyempurnaan jenazah yang dianut.

Sebaran pemakaman umum di Kota Balikpapan didasarkan pada data mengenai Jumlah dan Luasan Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan, dimana berdasarkan data dari DKPP Kota Balikpapan tersebut diketahui bahwa jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Balikpapan berjumlah 28 makam dan tersebar di seluruh wilayah kota dengan luas total 99,25 ha. Luas makam terbesar berada di Tempat Pemakaman Umum Terpadu di Kecamatan Balikpapan Utara (makam km.15) dengan luas total 48 ha.

Tabel 2.19  
Jumlah dan Luas Pemakaman Umum Kota Balikpapan

No	Wilayah Administrasi	Jenis Pemakaman Umum	Luas (ha)
1	Balikpapan Selatan	Makam Prapatan	1,5
		Makam Pasar Baru (3 buah)	2
		Makam Pupuk	1
		Makam Sepinggian	2
		Makam Gunung Bahagia	2
		Makam TMP Dharma Agung	2
Total		6	10,5
2	Balikpapan Timur	Makam Batakan	1,5
		Makam Patok Merah	1,5
		Makam Manggar	2
		Makam Lamaru	1,5
		Makam Lamaru Dalam	1
		Makam teritib	2
		Makam Gunung Tembak	0,75
Total		7	10,25
3	Balikpapan Tengah	Makam Gunung Guntur	1,5
Total		1	1,5
4	Balikpapan Utara	Makam km.0,5 (Gunung Samarinda)	4,5
		Makam km.2,5 (Kristen)	4,5

		Makam km.4	1
		Makam km. 5,5	2
		Makam Kariangau	3,5
		Makam km.8	1
		Makam Transad	1,5
		Makam km.11	2
		Makam Tiong Hoa (Cina)	1,5
		Makam km.15	48
	Total	10	21,5
5	Balikpapan Barat	Makam Gunung Empat	1
		Makam Gunung Pipa	1,5
		Makam Asrama Bukit	3
		Makam Baru Ulu	2
	Total	4	7,5
	Total Jumlah Makam dan Luas Makam	28 makam	99,25
Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan			

### 3. Fokus Iklim Berinvestasi

Letak dan kondisi geografis Kota Balikpapan yang sangat strategis adalah salah satu daya tarik minat investor untuk menanamkan modalnya, posisi strategis tersebut antara lain adalah:

- Terletak ditengah jaringan transportasi Trans Kalimantan dan Trans Nasional
- Pintu gerbang utama wilayah Kalimantan Timur dengan adanya Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggian dan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
- Tempat kedudukan Kodam VI/Mulawarman, POLDA Kaltim dan beberapa Kantor Pusat BUMN Wilayah Kalimantan
- Kota Embarkasi Haji Kelima di Indonesia
- Sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) ke sepuluh di Indonesia
- Pusat Industri pengilangan minyak untuk Kawasan Timur Indonesia
- Basis dari beberapa perusahaan asing yang bergerak dibidang pengeboran minyak dan gas bumi.



Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah diarahkan kepada penguatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan penguatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

Upaya pencapaian sasaran investasi di Kota Balikpapan sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur kota Balikpapan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti, jalan, pemukiman, air bersih, kebersihan kota, dan drainase kota. Demikian pula halnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya aktifitas masyarakat dalam pembangunan khususnya pengolahan lahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang baik, oleh karena itu upaya pengembangan infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Sarana dan Prasarana Daerah yang terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian suatu daerah adalah prasarana jalan karena berfungsi menunjang kelancaran arus barang dan jasa. Model transportasi di Kota Balikpapan meliputi transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menghubungkan pusat kota dengan seluruh wilayah Balikpapan, yang meliputi angkutan dalam kota dan antar kota di wilayah sekitar Balikpapan. Alat angkutan laut untuk melayani penyeberangan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota dan Kabupaten lain.

Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

<b>KELOMPOK KEGIATAN</b>	<b>JENIS USAHA</b>
Prasarana Wilayah	Perumahan, Saran Olahraga, Mess Karyawan, Taman, Jembatan, Coastal Road
Pariwisata	Hotel, Apartemen, Villa, Taman Rekreasi, Museum
Perdagangan	Pasar Induk, Penampungan Oli, Ruko, Mall, Supplier Barang (Spare Part alat berat)

Kesehatan	Rumah Sakit, Klinik, Apotik
Industri	Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan Kapal, Industri Pengolahan, Industri Aneka, Stock Pile, Kawasan Industri Kariangau (KIK)
Pertanian	Pertanian, perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan Terpadu
Telekomunikasi	Tower, Roof Top
Sumberdaya Energi	Pembangkit Listrik

## 2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Hingga tahun 2012 dan Realisasi RPJMD 2011 - 2016

Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 untuk implementasi tahun ke-1 sesuai dengan Agenda Pembangunan berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2012 dapat dijabarkan berdasarkan tabel berikut :

**MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING**  
**SASARAN 1 : SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN**  
**MENINGKATNYA KUALITAS/MUTU PENDIDIKAN**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	750	488	65.06%
	2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	100%	98%	98%
	3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	100%	98%	98%
	4. Angka putus sekolah			85%
	a. SD	0.80%	0.92%	89.8%
	b. SMP Sederajat	5.79%	6.38%	93.3%
	c. SMA Sederajat	27.21%	29.02%	
	5. Jumlah sekolah standar nasional			100%
	a. SD	9	9	120%
	b. SMP Sederajat	10	12	

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 1, yaitu meningkatnya kualitas/mutu pendidikan rata-rata mencapai **93.64 %**.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pencapaian sasaran 1 ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi tidak memenuhi target yang ditetapkan karena terbatasnya kuota sertifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Pusat. Program sertifikasi profesi merupakan program Pemerintah Pusat sehingga pembebanan anggaran berada pada APBN sehingga Pemerintah Kota Balikpapan tidak dapat mengalokasi penyelenggaraan sertifikasi profesi guru secara mandiri.
2. Pencapaian SPM baik pada SPM Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah belum mencapai target karena masih ada indikator SPM yang belum terpenuhi, yaitu masih adanya jumlah siswa dalam 1 rombongan belajar yang melebihi ketentuan Standar Pelayanan Minimal dan adanya sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA.

Pencapaian sasaran strategis kesatu jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	584	488
	2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	97%	98%
	3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	97%	98%
	4. Angka putus sekolah		
	a. SD	0.92	0.92
	b. SMP Sederajat	6.38	6.38
	c. SMA Sederajat	29.02	29.02
	5. Jumlah sekolah standar nasional		
	a. SD	9	9
	b. SMP Sederajat	10	12

Pencapaian sasaran strategis kesatu jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	1. Jumlah Tenaga Pendidik yang bersertifikat profesi	750	488
	2. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat dasar	100%	98%
	3. Persentase capaian SPM pendidikan tingkat menengah	100%	98%
	4. Angka putus sekolah		
	a. SD	0.80	0.92%
	b. SMP Sederajat	5.79	6.38%
	c. SMA Sederajat	27.21	29.02%
	5. Jumlah sekolah standar nasional		
	a. SD	9	9
	b. SMP Sederajat	10	12

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2013, pencapaian sasaran 1 meningkatnya kualitas/mutu pendidikan, terdapat 6 indikator yang belum mencapai target RPJMD dan 2 indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian dalam progress percepatan pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016.

**SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar			
	a. SD	112.3%	112.3%	100%
	b. SMP	102.8%	102.8%	100%
	c. SLTA	80.8%	80.8%	100%
	2. Angka Partisipasi Murni			

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	a. SD	90.75%	90.75%	100%
	b. SMP	69.41%	69.41%	100%
	c. SLTA	53.98%	53.98%	100%
3.	Jumlah Perpustakaan :			
	➤ Formal	140	140	100%
	➤ Informal	10	17	170%
4.	Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98.93%	98.95%	100%
5.	Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%	100%
6.	APK Pendidikan Usia Dini	45%	57.12%	126%
7.	Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%	100%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 2 yaitu meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan dan meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin rata-rata mencapai **108 %**.

Pencapaian indikator kinerja utama yang menonjol pada sasaran ke-2 ini adalah pada bertambahnya jumlah perpustakaan informal di Kota Balikpapan. Hal ini seiring dengan berkembangnya program-program pendidikan luar sekolah yang dimotori oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan/kepemudaan yang aktif.

Pencapaian sasaran strategis ke-2 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
2.	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar		
	a. SD	111.84	112.3%
	b. SMP	102.23	102.8%
	c. SLTA	80.57	80.8%
	2. Angka Partisipasi Murni		
	a. SD	90.01	90.75%
	b. SMP	69.25	69.41%
	c. SLTA	53.95	53.98%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	3. Jumlah Perpustakaan :		
	> Formal	124	140
	> Informal	10	17
	4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98.48%	98.95%
	5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%
	6. APK Pendidikan Usia Dini	36.55%	57.12%
	7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%	100%

Pencapaian sasaran strategis ke-2 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun ke-2	2013
1	2	3	4
2.	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar		
	a. SD	112.3%	112.3%
	b. SMP	102.62%	102.8%
	c. SLTA	80.8%	80.8%
	2. Angka Partisipasi Murni		
	a. SD	90.75%	90.75%
	b. SMP	69.41%	69.41%
	c. SLTA	53.98%	53.98%
	3. Jumlah Perpustakaan :		
	> Formal	140	140
	> Informal	10	17
	4. Persentase Tingkat literasi usia > 15 tahun	98.93%	98.95%
	5. Kurikulum SMK yang diintegrasikan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	100%	100%
	6. APK Pendidikan Usia Dini	45%	57.12%
	7. Rasio tingkat pendidikan dasar yang ditamatkan siswa Gakin	100%	100%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 2 telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	1. Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44.9	44.9	100%
	2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	182	173	105%
	3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%	67%	78.8%
	4. Persentase lembaga K3 di perusahaan	70%	66%	94.3%
	5. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3	35	36	103%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja rata-rata mencapai **97,66 %**.

Terdapat 1 indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh SKPD pemangku sasaran ke-3 yaitu penanganan K3 pada perusahaan di Kota Balikpapan. Pencapaian sasaran strategis ke-3 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	1. Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44.9	44.9
	2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	186	173
	3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%	67%
	4. Persentase lembaga K3 di perusahaan	82%	66%
	5. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	28	36

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	1. Persentase Angka beban tanggungan (Dependency ratio)	44.9	44.9
	2. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	186	173
	3. Persentase penggunaan peralatan K3 di perusahaan	85%	67%
	4. Persentase lembaga K3 di perusahaan	82%	66%
	5. Persentase jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3	28	36

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 4 : MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	1. UHH	72.3	72.61	100.42%
4.	2. AKI/AKB:			
	- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH	88/100.000KH	113.73%
	- Angka kematian balita	32/1.000KH	12/1.000KH	162.5%
	- Angka kematian Neonatal	-	8/1.000KH	-
		87%	93.82%	107.84%
	- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	50%	69.1%	138.2%
	3. Persentase ASI eksklusif			



Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-4 yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat rata-rata mencapai **124.45 %**.

Usia Harapan Hidup di Kota Balikpapan tahun 2013 mengalami peningkatan dari 72.3 naik menjadi 72.61. Salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan ini adalah terpenuhinya kualitas dan akses pelayanan dasar kesehatan yang terlihat pada pencapaian sasaran ke-5 RPJMD Kota Balikpapan.

Indikator kinerja utama yang juga mengalami peningkatan pencapaian pada sasaran ke-4 ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan sistem pengolahan data terpadu yang terintegrasi dari seluruh Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik kesehatan yang ada di Kota Balikpapan.

Sedangkan hal yang perlu diperhatikan pada sasaran ke-4 ini adalah terdapat 8/1.000 angka kematian neonatal sehingga Dinas Kesehatan pada tahun mendatang dapat merencanakan program kegiatan yang dapat membantu berkurangnya angka kematian neonatal.

Pencapaian sasaran strategis ke-4 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.	1. UHH	72.3	72.3
	2. AKI/AKB:		
	- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH	88/100.000KH
	- Angka kematian balita	32/1.000KH	12/1.000KH
	- Angka kematian Neonatal	0	8/1.000KH
	- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	87%	93.82%
	3. Persentase ASI eksklusif	50%	69.1%

Pencapaian sasaran strategis ke-4 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	4	4
4.	1. UHH	72.3	72.3
	2. AKI/AKB:		
	- Angka kematian ibu nifas	102/100.000KH	88/100.000KH
	- Angka kematian balita	32/1.000KH	12/1.000KH
	- Angka kematian Neonatal	0	8/1.000KH
	- Persalinan dengan Tenaga kesehatan	87%	93.82%
	3. Persentase ASI eksklusif	50%	69.1%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-4 yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27PKM ; 28 Klinik	27PKM ; 28 Klinik	100%
	2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18	17	94.44%
	3. Puskesmas perawatan mampu PONEB	5 PKM	6 PKM	120%
	4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%	70%	104%
	5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6 PKM	8 PKM	133.33%
	6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15 PKM	12 PKM	80%
	7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM	1 PKM	100%
	8. Jumlah jaminan kesehatan	150.000 jiwa	116.387 jiwa	122%
		1.000 jiwa		100%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	a. Jamkesda	17.360 jiwa	1.000 jiwa	100%
	b. JPK OR	93.475 jiwa	17.360 jiwa	93.79%
	c. Gakin			
	d. Jamkesmas	100 %	87.673 jiwa	4.96%
	9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	27 PKM	4.96%	100%
	10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I		27 PKM	

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-5 yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan rata-rata mencapai **113 %**.

Tahun 2013, pengguna layanan jamkesda mengalami penurunan yang berarti bahwa adanya peningkatan kesehatan di antara pemilik Jamkesda Kota Balikpapan. Sedangkan rendahnya presentase pelayanan kesehatan rujukan diakibatkan meningkatkan layanan kesehatan pada PKM, dimana telah dioperasikannya PKM 24 jam dan PKM rawat inap di Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-5 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27PKM ; 28 Klinik	27PKM ; 28 Klinik
5.	2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18	17
	3. Puskesmas perawatan mampu PONED	5 PKM	6 PKM
	4. Presentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%	70%
	5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6 PKM	8 PKM
	6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15 PKM	12 PKM
	7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM	1 PKM

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	8. Jumlah jaminan kesehatan		
	a. Jamkesda	150.000 jiwa	116.387 jiwa
	b. JPK OR	1.000 jiwa	1.000 jiwa
	c. Gakin	17.360 jiwa	17.360 jiwa
	d. Jamkesmas	93.475 jiwa	87.673 jiwa
	9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	4.96%
	10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM	27 PKM

Pencapaian sasaran strategis ke-5 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	1. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat I	27PKM ; 28 Klinik	27PKM ; 28 Klinik
5.	2. Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	18	17
	3. Puskesmas perawatan mampu PONED	5 PKM	6 PKM
	4. Persentase produksi sediaan farmasi & makanan yang memenuhi standar mutu & distribusi	67%	70%
	5. Presentase puskesmas dalam pelaksanaan PIO (Pelayanan Informasi Obat)	6 PKM	8 PKM
	6. Jumlah Fasilitas kesehatan dengan poli kesehatan remaja.	15 PKM	12 PKM
	7. Jumlah fasilitas kesehatan santunan lansia	1 PKM	1 PKM
	8. Jumlah jaminan kesehatan		
	a. Jamkesda	150.000 jiwa	116.387 jiwa
	b. JPK OR	1.000 jiwa	1.000 jiwa
	c. Gakin	17.360 jiwa	17.360 jiwa
	d. Jamkesmas	93.475 jiwa	87.673 jiwa
	9. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	4.96%
	10. Jumlah puskesmas yang memberikan fasilitas kesehatan rujukan TK.I	27 PKM	27 PKM

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-5 yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 6 : MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6.	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-6 yaitu meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-6 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6.	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73

Pencapaian sasaran strategis ke-6 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6.	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	73	73

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-6 yaitu meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 7 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRESTASI  
OLAHRAGA DAN OLAHRAGA TRADISIONAL**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
8.	1. Jumlah organisasi Cabang olahraga	45	45	100%
	2. Jumlah prestasi olahraga	45	45	100%
	3. Jumlah klub olahraga tradisional	3	3	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-7 yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi olah raga dan Olah raga Tradisional. rata-rata mencapai **100 %**

Pencapaian sasaran strategis ke-7 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	1. Jumlah organisasi Cabang olah raga	45	45
	2. Jumlah prestasi olah raga	45	45
	3. Jumlah klub olah raga tradisional	3	3

Pencapaian sasaran strategis ke-7 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	1. Jumlah organisasi cabang olah raga	45	45
	2. Jumlah prestasi olah raga	45	45
	3. Jumlah klub olah raga tradisional	3	3

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-7 yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi olah raga dan Olah raga Tradisional. telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 8 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISA SI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9.	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan			
	a. Nasional	20	11	55%
	b. Regional	25	22	88%
	2. Jumlah TKA / TPA	330	330	100%
	3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	113	113	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-8 yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama rata-rata mencapai **81 %**.

Perlu pembinaan lebih intensif agar prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan dapat meningkat pada tahun yang akan datang.

Pencapaian sasaran strategis ke-8 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>O.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan		
	c. Nasional	20	11
	d. Regional	25	22
	2. Jumlah TKA / TPA	330	330
	3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	113	113

Pencapaian sasaran strategis ke-8 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
8.	1. Jumlah prestasi masyarakat dalam lomba bidang keagamaan		
	a. Nasional	20	11
	b. Regional	25	22
	2. Jumlah TKA / TPA	330	330
	3. Jumlah Pembangunan fasilitas keagamaan	113	113

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-8 yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 9 : MENINGKATNYA KERUKUNAN INTRA DAN ANTAR UMAT BERAGAMA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
9.	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0	0	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-9 yaitu meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-9 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

]



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
9.	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-9 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
9.	1. Jumlah konflik masyarakat yang berlatar belakang Agama	0	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-9 yaitu meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**MISI 2 : MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI**  
**SASARAN 10 : MASYARAKAT MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN UMKM DAN KOPERASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
10	1. Jumlah Koperasi Aktif (%)	385	410	106.49%
	2. Jumlah UMKM Produktif	14.770	19.017	129%
	3. Jumlah Produk unggulan	2	2	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-10 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi rata-rata mencapai **111.96 %**.

Realisasi pencapaian sasaran pada sasaran ke-10 ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang telah berjalan dengan baik serta berhasilnya program kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan bekerjasama dengan tenaga ahli di bidangnya.

Pencapaian sasaran strategis ke-10 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
10	1. Jumlah Koperasi Aktif (%)	403	410
	2. Jumlah UMKM Produktif	17.686	19.017
	3. Jumlah Produk unggulan	6	2

Pencapaian sasaran strategis ke-8 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
10	1. Jumlah Koperasi Aktif (%)	385	410
	2. Jumlah UMKM Produktif	14.770	19.017
	3. Jumlah Produk unggulan	5	2

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-10 telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 11 : MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK UMKM DAN KOPERASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
11	1. Jumlah LKM	12	15	125%
	2. Jumlah BPR	0	0	0
	3. Persentase KUKM	65.46%	65.46%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-11 yaitu meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi rata-rata mencapai **75 %**.

Sampai dengan tahun 2013, Bank Perkreditan Rakyat yang dikelola Pemerintah Kota Balikpapan belum dapat diwujudkan. Proses pembentukan BPR dimaksud masih dalam tahap penyusunan draft Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Sementara itu, BPR yang dikelola pihak swasta telah berkembang di Kota Balikpapan.

Pada saat ini pencapaian sasaran strategis ke-11 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
11	1. Jumlah LKM	15	15
	2. Jumlah BPR	0	0
	3. Persentase KUKM	65.46%	65.46

Pencapaian sasaran strategis ke-11 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
11	1. Jumlah LKM	15	15
	2. Jumlah BPR	0	0
	3. Persentase KUKM	65.46%	65.46%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-11 yaitu meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

## **SASARAN 12 : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
12	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.522,5 Ton	56.763 Ton	97%
	2. Produksi hasil ternak	2.761,35 Ton	3.214 Ton	116.39%
	3. Produksi Budidaya Perikanan	8.222,8 Ton	8.875,3 Ton	107.93%

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-12 yaitu meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan rata-rata mencapai **107.1 %**.

Dari capaian seluruh indikator dalam sasaran ke-12 ini, terdapat 1 komponen indikator yang tidak terpenuhi yaitu produksi padi yang hanya mencapai 693 Ton dari target 1.057,5 Ton sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan produksi makanan pokok tersebut.

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meliputi produksi padi, produksi jagung, produksi papaya, produksi pisang, produksi nenas, produksi salak dan produksi sayuran dataran rendah. Untuk produksi hasil ternak meliputi daging sapi, daging ayam dan telur ayam. Sedangkan untuk produksi budidaya perikanan meliputi produksi rumput laut dan produksi ikan tangkap.

Pencapaian sasaran strategis ke-12 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
12	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.507 Ton	56.763 Ton
	2. Produksi hasil ternak	3.215,45 Ton	3.214 Ton
	3. Produksi Budidaya Perikanan	10.810,9 Ton	8.875,3 Ton

Pencapaian sasaran strategis ke-12 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
12	1. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	58.472,5 Ton	56.763 Ton
	2. Produksi hasil ternak	2.757,35 Ton	3.214 Ton
	3. Produksi Budidaya Perikanan	7.750,2 Ton	8.875,3 Ton

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-12 yaitu meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan telah mencapai target yang ditetapkan bahkan telah mampu melampaui target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 13 : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
13	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah	16.58%	16.58%	100%
	2. Persentase penduduk miskin	3.79%	3.79%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-13 yaitu meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-13 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
13	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah	16.58%	16.58%
	2. Persentase penduduk miskin	3.79%	3.79%

Pencapaian sasaran strategis ke-13 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke-2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
13	1. Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah	16.58%	16.58%
	2. Persentase penduduk miskin	3.79%	3.79%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-13 yaitu meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**MISI 3 : MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KKN DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL**

**SASARAN 14 : MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
14	1. Jumlah kelompok siskamling aktif	475	475	100%
	2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	12	12	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-14 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-14 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
14	1. Jumlah kelompok siskamling aktif	475	475
	2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	12	12

Pencapaian sasaran strategis ke-14 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
14	1. Jumlah kelompok siskamling aktif	475	475
	2. Jumlah kelurahan sadar hukum.	12	12

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-14 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 15 : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	3	4	5	6
15	Angka partisipasi pemilu	62%	62.25%	100.4%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-15 yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat rata-rata mencapai **100.4 %**. Jumlah pemilih Kota Balikpapan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Balikpapan adalah 406.260 pemilih.

Pencapaian sasaran strategis ke-15 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
15	Angka partisipasi pemilu	62	62.25

Pencapaian sasaran strategis ke-15 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
15	Angka partisipasi pemilu	82	62.25

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-15 yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan sehingga diperlukan program kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

**SASARAN 16 : MENINGKATNYA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
16	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	1	0	0
	2. Jumlah Masyarakat PMKS	549	490	110 %

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-16 yaitu meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial rata-rata mencapai **55 %**.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya tentang keberadaan panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah, sampai dengan tahun 2013 ini Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki panti sosial dan rehabilitasi tersebut.



Hal ini menjadi perhatian bagi segenap pemangku sasaran ini untuk segera memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran strategis ke-16 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
16	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	0	0
	2. Jumlah Masyarakat PMKS	907	490

Pencapaian sasaran strategis ke-16 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
16	1. Jumlah panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	0	0
	2. Jumlah Masyarakat PMKS	549	490

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran ke-16 yaitu meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi. Namun 1 indikator belum mencapai target RPJMD.

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-17 yaitu meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah mencapai target yang ditetapkan sehingga

diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi. Bahkan pencapaian tahun 2013 ini jauh lebih baik dari pencapaian target 2012.

**SASARAN 17 : MENINGKATNYA SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
17	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	100%	0	-

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-17 yaitu meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana rata-rata mencapai **0 %**.

Dalam rangka mencapai sasaran ke-17 ini, telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan, antara lain telah dilaksanakannya penguatan kelembagaan SKPD pemangku fungsi sasaran ke-17 ini yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah sosialisasi-sosialisasi tentang pencegahan bencana dan kebakaran, pembinaan organisasi kemasyarakatan, mengoptimalkan sarana, prasarana dan aparatur yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Diakui, sampai dengan tahun 2013 ini, Sistem informasi peringatan dini kejadian bencana belum dapat dilaksanakan secara sistemik namun berbagai usaha tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan target tersebut. Diharapkan dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan mampu membentuk sistem yang terpadu terkait penanggulangan dan penanganan bencana di Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-17 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
17	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-17 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
17	Terbentuknya sistem informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana	0	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-17 yaitu meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana belum mencapai target yang ditetapkan sehingga strategis untuk mencapai sasaran tersebut.

**SASARAN 18 : MENINGKATNYA PARTISIPASI PILAR MASYARAKAT/RELANAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
18	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	220	206	93.6%
	2. Jumlah Taruna siaga bencana	480	480	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-18 yaitu meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana rata-rata mencapai **96.8 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-18 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	3	4	5
18	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	206	206
	2. Jumlah Taruna siaga bencana	480	480

Pencapaian sasaran strategis ke-18 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	3	4	5
18	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	220	206
	2. Jumlah Taruna siaga bencana	480	480

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-18 yaitu meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana belum mencapai target yang ditetapkan tetapi diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 19 : MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERIZINAN INVESTASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
19	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	65	130	200%
	2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk	87%	78.3%	90%
	3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	63%	50.4%	80%
	4. Jumlah investor	75	138	184%
	5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	0	0	0

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-19 yaitu meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi rata-rata mencapai **110.8 %**.

Terdapat 1 indikator kinerja utama pada sasaran ke 19 ini yang tidak tercapai yaitu jumlah penghargaan citra pelayanan prima karena pada tahun 2013 Kementerian PAN dan RB tidak melaksanakan proses akhir pelaksanaan penilaian kinerja. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengusulkan 3 (tiga) Unit Pelayanan Publik yang mewakili Kota Balikpapan, yaitu BPMP2T, RS Bersalin Sayang Ibu dan SMK N I Balikpapan. Secara keseluruhan hasil Survey IKM pada SKPD/ Unit Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, 118 SKPD/Unit Pelayanan berada pada kategori **“Baik”** dan 12 SKPD/ Unit Pelayanan berada pada kategori **“Sangat Baik”**.

Pencapaian sasaran strategis ke-19 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
19	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	6	130
	2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk	80%	90%
	3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	70%	80%
	4. Jumlah investor	75	138
	5. Jumlah penghargaan citra pelayanan prima	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-19 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
19	1. Capaian IKM unit Pelayanan Publik	6	6
	2. Cakupan kepemilikan Kartu tanda penduduk	80%	80%
	3. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	70%	70%
	4. Jumlah investor	75	138
	5. Jumlah penghargaan citra pelayanan		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	prima	0	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-19 yaitu meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**MISI 4 : MENINGKATKAN INVESTASI, MEMENUHI EKSPEKTASI DUNIA USAHA, DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA**

**SASARAN 20 : MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERIZINAN INVESTASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
20	Rasio Ketersediaan daya listrik	178.668	178.668	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-20 yaitu meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-20 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
20	<b>Rasio Ketersediaan daya listrik</b>	178.668	178.668

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4

Pencapaian sasaran strategis ke-20 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
20	<b>Rasio Ketersediaan daya listrik</b>	178.668	178.668

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-20 yaitu meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 21 : BERKEMBANGNYA KAWASAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
21	1. Jumlah luas kawasan terbuka pada lahan industri	0.2%	0.2%	100%
	2. Persentase Pertumbuhan Industri	4.75%	4.75%	100%
	3. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	34.22T	34.22 T	100%
	4. Angka PDRB	48.45 T	48.45T	100%
	5. Jumlah Sarana Perdagangan	46	58	126%
	6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan	3	3	100%
	7. Jumlah pasar yang ditingkatkan	7	7	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	sarana dan prasarana			

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-21 yaitu berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan rata-rata mencapai **103.7 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-21 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
21	1. Jumlah luas kawasan terbuka pada lahan industri	4.2%	0.2%
	2. Persentase Pertumbuhan Industri	5.55%	4.75%
	3. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	23.35 T	34.22 T
	4. Angka PDRB	6.23T	48.45T
	5. Jumlah Sarana Perdagangan	46	58
	6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan	3	3
	7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	7	7

Pencapaian sasaran strategis ke-21 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
21	1. Jumlah luas kawasan terbuka pada lahan industri	0.2%	0.2%
	2. Persentase Pertumbuhan Industri	4.75%	4.75%
	3. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	34.22 T	34.22 T
	4. Angka PDRB	48.45T	48.45T
	5. Jumlah Sarana Perdagangan :		



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	6. Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan	58	58
		3	3
	7. Jumlah pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarana	7	7

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-21 yaitu berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 22 : MENINGKATNYA LAPANGAN USAHA DAN LAPANGAN KERJA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
22	1. Jumlah Unit Usaha	8.450	8.289	98%
	2. Penyerapan tenaga kerja	107.427	107.480	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-22 yaitu meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja rata-rata mencapai **99%**.

Pencapaian sasaran strategis ke-22 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
22	1. Jumlah Unit Usaha	17.981	8.289
	2. Persentase Penyerapan tenaga kerja	107.480	107.480

Pencapaian sasaran strategis ke-22 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPMJP Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
22	1. Jumlah Unit Usaha	17.981	8.289
	2. Persentase Penyerapan tenaga kerja	107.480	107.480

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-22 yaitu meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 23 : MENINGKATNYA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
23	1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.	2.214.991.437.841,-	2.421.958.180.024,97	109.3%
	2. Sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	4	5	125%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-23 yaitu Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah rata-rata mencapai **117,15 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-23 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
23	1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 2. Sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	43.799.812.820,77	2.421.958.180.024,97
		5	5

Pencapaian sasaran strategis ke-23 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
23	1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 2. Sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	51.248.954.189,00	2.421.958.180.024,97
		4	5

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-23 yaitu Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**MISI 5 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI**  
**SASARAN 24 : MENINGKATNYA KAPASITAS INSTITUSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
24	SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13	13	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-24 yaitu meningkatnya kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian pelaksanaan SPM di Kota Balikpapan telah dilaporkan dalam bentuk Laporan Percepatan Pencapaian SPM Tahun 2013 Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-24 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
24	SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13	13

Pencapaian sasaran strategis ke-24 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
24	SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	13	13

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-24 yaitu meningkatnya kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 25 : TERSUSUNNYA ROADMAP REFORMASI BIROKRASI**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
25	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah 2. Nilai akuntabilitas kinerja instansi	WTP	WDP	0%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pemerintahan (AKIP) SKPD	B	CC	0%
3.	Pemenuhan kebutuhan PNS			
4.	Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	195	116	59%
5.	Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional	1 : 9	1 : 9	100%
6.	Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi)	1 : 51	1 : 51	100%
7.	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat):	5 modul	3 modul	60%
	a. Diklat PIM II	6	5	83.33%
	b. Diklat PIM III	20	23	115%
	c. Diklat PIM IV	40	80	200%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-25 yaitu tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi rata-rata mencapai **79.81 %**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada capaian sasaran ke-25 ini adalah komitmen untuk meningkatkan opini terhadap laporan keuangan daerah dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kota Balikpapan. Walaupun terjadi peningkatan dari tahun 2012, namun masih perlu peningkatan dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Balikpapan.

Khusus penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi di Kota Balikpapan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun roadmap reformasi birokrasi dan saat ini telah dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut. Demikian juga dengan program PMPRB Kota Balikpapan, telah dilaksanakan dan dijadwalkan pengiriman hasil penilaian akan disampaikan pada tahun 2014.

Pencapaian sasaran strategis ke-25 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
25	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP
	2. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD	C	CC
	3. Pemenuhan kebutuhan PNS		
	4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	54	116
	5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional	1 : 11	1 : 9
	6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi)	1 ; 155	1 : 51
	7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat):	4 modul	3 modul
	d. Diklat PIM II	3	5
	e. Diklat PIM III	19	23
	f. Diklat PIM IV	40	80

Pencapaian sasaran strategis ke-25 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
26	1. Opini terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WDP
	2. Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) SKPD	B	CC
	3. Pemenuhan kebutuhan PNS		
	4. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	195	116
	5. Rasio PNS yang mengikuti diklat fungsional	1 : 9	1 : 9
	6. Peningkatan pemanfaatan SIMPEG (Sistem Informasi, Formasi dan Mutasi)	1 : 58	1 : 51
	7. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur (Diklat):	5 modul	3 modul
	a. Diklat PIM II	6	5
	b. Diklat PIM III		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun ke-2	2013
1	2	3	4
	c. Diklat PIM IV	20	23
		40	80

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-25 yaitu tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi, 3 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan indikator lainnya belum mencapai target namun diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**MISI 6 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF**

**SASARAN 26 : MENINGKATNYA MANAJEMEN DAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
26	1. Jumlah uji kir angkutan umum	50.000	51.995	103.99%
	2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS	100		
	a. Rambu	1.799m2	100	100%
	b. Marka Jalan	14	1.799m2	100%
	c. ATCS	14	14	100%
	3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)		14	100%
	3 km	3 km		
	4. Panjang jalan kota yang dibangun	15 km	7.9 km	263%
	5. Panjang jalan yang ditingkatkan	50 m	32.8 km	218.66%
	6. Panjang jembatan yang dibangun	500 m	53 m	106%
	7. Panjang jalan yang dipelihara	1 titik	625.8 m	125%
	8. Jumlah perbaikan simpang	350 m	1 titik	100%
	9. Panjang trotoar yang ditingkatkan (pemeliharaan)	4	1000 m	285.7%
	10. Jumlah halte angkutan umum	21	0	0%
	11. Jumlah area parkir	1	21	100%
	12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu		1	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-26 yaitu meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan rata-rata mencapai **164.4 %**.

Pencapaian realisasi sasaran ke-26, khususnya pada indikator kinerja utama nomor 4 sampai dengan 9 telah mencapai target bahkan telah melampaui target yang ditetapkan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah terserapnya secara maksimal anggaran program dan kegiatan tersebut.

Panjang jembatan yang dibangun adalah total panjang dari pembangunan 6 (enam) buah jembatan, yaitu jembatan mess perwira/saluran primer pandan sari (2 jembatan), jembatan RT.31 Kelurahan Manggar Baru, Jembatan RT. 10 Kelurahan Manggar, Jembatan RT. 8 Kelurahan Lamaru dan Jembatan Jalan AMD 36.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pencapaian sasaran ke-26 ini adalah pada indikator pembangunan halte angkutan umum yang pada tahun 2013 tidak terwujud karena adanya permasalahan dalam proses lelang.

Pencapaian sasaran strategis ke-26 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
26	1. Jumlah uji kir angkutan umum	46.550	51.995
	2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS		
	a. Rambu	100	100
	b. Marka Jalan	1.799	1.799m2
	c. ATCS	14	14
	3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)	14	14
	4. Panjang jalan kota yang dibangun	6.86 km	7.9 km
	5. Panjang jalan yang ditingkatkan	3.9 km	32.8 km
	6. Panjang jembatan yang dibangun	8 Bh	6 Bh
	7. Panjang jalan yang dipelihara	518 m	625.8 m
	8. Jumlah perbaikan simpang	2 Titik	1 Titik
	9. Panjang trotoar yang ditingkatkan	212 m	350 m
	10. Jumlah halte angkutan umum	4	0
	11. Jumlah area parkir	21	21
	12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	1	1



Pencapaian sasaran strategis ke-26 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
26	1. Jumlah uji kir angkutan umum	51.000	51.995
	2. Jumlah rambu jalan, marka jalan, dan ATCS		
	a. Rambu	100	100
	b. Marka Jalan	1.799m2	1.799m2
	c. ATCS	14	14
	3. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)	14	14
	4. Panjang jalan kota yang dibangun	3 km	7.9 km
	5. Panjang jalan yang ditingkatkan	15 km	32.8 km
	6. Panjang jembatan yang dibangun	5 Bh	6 Bh
	7. Panjang jalan yang dipelihara	500 m	625.8 m
	8. Jumlah perbaikan simpang	1 titik	1 titik
	9. Panjang trotoar yang ditingkatkan	350 m	350 m
	10. Jumlah halte angkutan umum	4	0
	11. Jumlah area parkir	25	21
	12. Jumlah fasilitas pelabuhan/ ruang tunggu	1	1

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-26 yaitu meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan, 1 indikator belum mencapai target sedangkan 13 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 27 : TERWUJUDNYA SARANA ANGKUTAN UMUM MASSAL**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
27	Jumlah Angkutan Umum	1922	1922	100

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-27 yaitu terwujudnya sarana angkutan umum massal rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-27 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
27	Jumlah Angkutan Umum	1922	1922

Pencapaian sasaran strategis ke-27 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
27	Terwujudnya sarana angkutan umum massal	1920	1922

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-27 yaitu terwujudnya sarana angkutan umum massal telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 28 : MENINGKATNYA CAKUPAN PELAYANAN AIR BERSIH/ AIR MINUM**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
28	1. Jumlah Produksi IPA	1157	1157	100%
	2. Jumlah ketersediaan air baku	1.105	1.105	100%
	3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73%	73%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-28 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/ air minum rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-28 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
28	1. Jumlah Produksi IPA	1157	1157
	2. Jumlah ketersediaan air baku	1.105	1.105
	3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73%	73%

Pencapaian sasaran strategis ke-28 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
28	1. Jumlah Produksi IPA	1.157	1157
	2. Jumlah ketersediaan air baku	1.106	1.105
	3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73%	73%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-28 yaitu meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 29 : TERSEDIANYA SISTEM JARINGAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) TERPADU**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
29	1. Cakupan pelayanan air limbah	100%	100%	100%
	2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	1	1	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-29 yaitu tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-29 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
29	1. Cakupan pelayanan air limbah	100%	100%
	2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	1	1

Pencapaian sasaran strategis ke-29 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
29	1. Cakupan pelayanan air limbah	100%	100%
	2. Jumlah instalansi pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat	1	1

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-29 yaitu Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 30 : BERKURANGNYA TITIK/ LOKASI BANJIR DAN LUAS WILAYAH BANJIR**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
30	1. Jumlah titik lokasi banjir	55	9	210%
	2. Jumlah bendali/ bozem	2	7	350%
	3. Panjang normalisasi sungai	1.000m	400m	40%
	4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	1.000m	3.136,25m	313.63%
	5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen	5.000m	3.093,67m	61.87%
	6. Panjang saluran drainase (primer, sekunder dan tersier) yang	2.500m	5.276m	211,04%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	ditingkatkan			
	7. Jalan inspeksi sungai	1.000m	0	-

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-30 yaitu berkurangnya titik/ lokasi banjir dan luas wilayah banjir rata-rata mencapai **169 %**.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian sasaran ke-30 antara lain normalisasi sungai dan pembangunan jalan inspeksi sungai yang mana pada tahun 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun jika dihitung dari awal tahun pencapaian RPJMD khususnya pada indikator normalisasi sungai telah mencapai target RPJMD dimana capaian tahun 2012 telah mencapai 8.088,95 m.

Berkurangnya titik banjir pada tahun 2013 ini merupakan hasil dari tercapainya program kegiatan normalisasi sungai, pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis ke-30 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
30	1. Jumlah titik lokasi banjir	55	9
	2. Jumlah bendali/ bozem	1	7
	3. Panjang normalisasi sungai	8.088,95	0
	4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	2995.56m	3.136,25m
	5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen	3.093,67m	3.093,67m
	6. Panjang saluran drainase (primer, sekunder dan tersier) ditingkatkan	3.280,56m	5.276m
	7. Jalan inspeksi sungai	0	0

Pencapaian sasaran strategis ke-30 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
30	1. Jumlah titik lokasi banjir	55	9
	2. Jumlah bendali/ bozem	1	7
	3. Panjang normalisasi sungai	1.000m	0
	4. Panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)	1.000m	3.136,25m
	5. Panjang saluran drainase pemukiman permanen	5.000m	3.093,67m
	6. Panjang saluran drainase (primer, sekunder dan tersier) ditingkatkan	2.000m	5.276m
	7. Jalan inspeksi sungai	1.000m	0

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-30 yaitu 1 indikator kinerja tidak tercapai pada tahun 2013 namun jika diakumulasi dengan pencapaian tahun 2012 maka telah mencapai target RPJMD. Sedangkan untuk indikator jalan inspeksi harus mendapat perhatian.

Untuk indikator lainnya telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 31 : MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DI KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAS I	%
1	2	3	4	5
31	1. Jumlah rumah tidak layak huni	6.747	6.782	99.48%
	2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	0.01%	0.01%	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-31 yaitu meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh rata-rata mencapai **99.74 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-31 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
31	1. Jumlah rumah tidak layak huni	6.799	6.782
	2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	0.04%	0.01%

Pencapaian sasaran strategis ke-31 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
31	1. Jumlah rumah tidak layak huni	6.747	6.782
	2. Persentase kawasan pemukiman kumuh	1.47%	0.01%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013 pencapaian ke-31 yaitu meningkatnya kualitas perumahan dikawasan pemukiman kumuh pada indikator 1 belum mencapai target yang ditetapkan namun diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Sedangkan untuk indikator 2, telah mencapai bahkan telah melampaui target RPJMD Tahun ke-31 Kota Balikpapan.

### **SASARAN 32 : TERWUJUDNYA PENYEDIAAN HUNIAN VERTIKAL (RUSUNAWA DAN RUSUNAMI)**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
32	1. Jumlah rusunami	1	1	100%
	2. Jumlah rusunawa	1	1	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-32 yaitu terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) rata-rata mencapai **100 %**.

Pembangunan rusunawa sampai dengan tahun 2013 ini masih menggunakan sumber dana dari APBN (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat) sedangkan APBD Kota Balikpapan dipergunakan untuk pengembangan rumah susun untuk membangun sarana, prasarana dan utilitas pendukungnya.

Pencapaian sasaran strategis ke-32 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
32	1. Jumlah rusunami	0	1
	2. Jumlah rusunawa	2	1

Pencapaian sasaran strategis ke-32 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
32	1. Jumlah rusunami	1	1
	2. Jumlah rusunawa	0	1

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-32 yaitu terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) pada indikator 2 telah mencapai target yang ditetapkan namun pada indikator 1 belum memenuhi target tetapi diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 33 : TERWUJUDNYA SANITASI SEHAT YANG DAPAT DIAKSES SELURUH LAPISAN MASYARAKAT**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
33	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97.15 %	97.15 %	10 0%



Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-33 yaitu terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-33 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
33	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97.15%	97.15%

Pencapaian sasaran strategis ke-33 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
33	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	97.15%	97.15%

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-33 yaitu terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 34 : TERSEDIANYA STRUKTUR DAN POLA RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
34	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan	0	0	0
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan	34	34	100%
	3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	3	4	133%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-34 yaitu Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan rata-rata mencapai **77.66 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
34	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan	1	0
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan	1	34
	3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	1	4

Pencapaian sasaran strategis ke-34 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
34	1. Produk hukum tentang rencana tata ruang Kota Balikpapan	1	0
	2. Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan	27	34
	3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	4	4

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-34 yaitu Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 35 : TERSEDIANYA TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
35	Luas wilayah budaya pesisir	10.16	10.33	101%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-35 yaitu tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil rata-rata mencapai **101 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-36 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
35	Luas wilayah budaya pesisir	749.2	10.33

Pencapaian sasaran strategis ke-35 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
35	Luas wilayah budaya pesisir	749.2	10.33

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-35 yaitu tersedianya Tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 36 : TERKENDALINYA PEMANFAATAN RUANG**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
36	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan	2%	2,9%	145%
	2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang	2%	2%	100%
	3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	300	472	157%
	4. Jumlah bangunan perumahan	654	154	23.5%
	5. Luas hutan lindung	14.78	14.781	100%
	6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	1 3	3	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-36 terkendalinya Pemanfaatan ruang rata-rata mencapai **104.25 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-36 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
36	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan	2,7%	2,9%
	2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang	82%	2%
	3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	300	472
	4. Jumlah bangunan perumahan	154	154
	5. Luas hutan lindung	14.781	14.781
	6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	393ha	3ha

Pencapaian sasaran strategis ke-36 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
36	1. Persentase bangunan ber IMB dengan satuan bangunan	2%	2,9%
	2. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang	84%	2%
	3. Jumlah fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	300	472
	4. Jumlah bangunan perumahan	654	154
	5. Luas hutan lindung	13.000	14.781
	6. Luas wilayah ruang terbuka hijau (RTH)	3	3

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-36 yaitu terkendalinya Pemanfaatan ruang telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 37 : MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
37	1. Akseptor aktif	70.09	83.728	119%
	2. Prevalensi Rate	6	75,25	100.47%
	3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	74,9 75,03	75,03	100%
	4. Tingkat kelestarian ber KB			
	a. 10 tahun		5.886	119%
	b. 15 tahun	5,878	2.845	101.5%
	c. 20 tahun	2,803 313	316	100.96%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-37 meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana rata-rata mencapai **106 %**.

Pencapaian sasaran ke-37 ini didukung dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Balikpapan ber-KB, dukungan APBD Kota Balikpapan dan APBN melalui asas dekonsentrasi maupun asas tugas perbantuan serta suksesnyanya pelaksanaan penyuluhan Program KB/KS dan pelayanan KB/KS.

Pencapaian sasaran strategis ke-37 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
37	1. Akseptor aktif	70.096	83.728
	2. Prevalensi Rate	78	75,25
	3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	78.14	75,03
	4. Tingkat kelestarian ber KB		
	a. 10 tahun	5.878	5.886
	b. 15 tahun	2.803	2.845
	c. 20 tahun	313	316

Pencapaian sasaran strategis ke-37 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
37	1. Akseptor aktif	70.096	83.728
	2. Prevalensi Rate	74.9	75,25
	3. Persentase partisipasi Gakin untuk berKB	75.03	75,03
	4. Tingkat kelestarian ber KB		
	a. 10 tahun	5.878	5.886
	b. 15 tahun	2.803	2.845
	c. 20 tahun	313	316

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-37 yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 38 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
38	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3	5	166.67%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-38 meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna rata-rata mencapai **166.67%**.

Pemanfaatan teknologi tepat guna yang dikembangkan antara lain : alat sangria, alat penguat signal internet, alat penggorengan amplang, alat penggorengan hemat energi dan alat perajang umbi.

Pembinaan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Teknologi di Kecamatan dan hasil pembinaan termaksud telah memperoleh hasil dimana alat penggorengan amplang telah berhasil meraih juara II Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.

Pencapaian sasaran strategis ke-38 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
38	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3	5

Pencapaian sasaran strategis ke-38 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
9	Jumlah inovasi Teknologi Tepat Guna	3	5

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-38 yaitu meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

### **SASARAN 39 : MENINGKATNYA KEMAMPUAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN LINGKUNGAN KERJA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
39	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3.420	3.420	100%
	2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10 : 13	10 : 13	100%
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan		46.07	100%
	4. Menurunnya kasus kekerasan dalam rumah Tangga	46.07 30	38	73.33%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-39 meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja rata-rata mencapai **91.11 %**.

Pada tahun 2013, tercatat peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini sebenarnya dampak dari sistem pendataan yang berjalan dengan baik dan telah dibentuknya Lembaga P2TP2A Kota Balikpapan sehingga penanganan kasus-kasus kekerasan semakin terkontrol dan dapat dibantu penanganannya.

Pencapaian sasaran strategis ke-39 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
39	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3.509	3.420
	2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10 : 14	10 : 13
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	46.07	46.07
	4. Menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	36	38

Pencapaian sasaran strategis ke-39 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
39	1. Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	3.420	3.420
	2. Rasio Pejabat PNS Perempuan dan laki-laki	10 : 13	10 : 13
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan	46.07	46.07
	4. Menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah Tangga	3	38

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-39 yaitu meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.



**SASARAN 40 : MENINGKATNYA KUALITAS ANAK**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
40	1. Jumlah prestasi anak:			
	a. tingkat propinsi	152	152	100%
	b. tingkat nasional	52	52	100%
	c. tingkat internasional	2	2	100%
	2. Jumlah PAUD	200	200	100%
	3. Jumlah TK			
	a. Negeri	1	1	100%
	b. Swasta	137	137	100%
	4. Jumlah anak terlantar	25	25	100%
	5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur	10	22	0%
	6. Angka anak jalanan	20	20	100%
	7. Jumlah fasilitas bermain anak	72	72	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-40 meningkatnya kualitas anak rata-rata mencapai **90 %**.

Angka kekerasan dan eksploitasi anak di bawah umur pada tahun 2013 ini, melebihi dari target yang ditetapkan bahkan kenaikannya mencapai 120%. Secara hitungan angka, hal ini menunjukkan penurunan kinerja namun kami menilai hal ini adalah positif mengingat telah aktifnya Lembaga P2TP2A Kota Balikpapan sehingga setiap kasus kekerasan sudah memiliki lembaga pelayanannya.

Pencapaian sasaran strategis ke-40 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
40	1. Jumlah prestasi anak:		
	a. tingkat propinsi	152	152
	b. tingkat nasional	52	52
	c. tingkat internasional	1	2
	2. Jumlah PAUD	200	200
	3. Jumlah TK		
	a. Negeri	1	1
	b. Swasts	137	137
	4. Jumlah anak terlantar	25	25
	5. Angka kekerasan dan eksploitasi	7	22

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	anak dibawah umur		
6.	Angka anak jalanan	20	20
7.	Jumlah fasilitas bermain anak	72	72

Pencapaian sasaran strategis ke-40 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
40	1. Jumlah prestasi anak:		
	a. tingkat propinsi	152	152
	b. tingkat nasional	52	52
	c. tingkat internasional	2	2
	2. Jumlah PAUD	200	200
	3. Jumlah TK		
	a. Negeri	1	1
	b. Swasts	37	137
	4. Jumlah anak terlantar	20	25
	5. Angka kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur	10	22
	6. Angka anak jalanan	20	20
	7. Jumlah fasilitas bermain anak	72	72

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-40 yaitu meningkatnya kualitas anak telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**MISI 8 : MEMPERKUAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SERTA MELESTARIKAN KERAGAMAN BUDAYA DAN KEGOTONGROYONGAN**

**SASARAN 42 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN, LAHAN DAN DAS**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
41	1. Luas kawasan hutan	16.809,49 Ha	16.809,49 Ha	100%
	2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha	50 Ha	100%
	3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35	2,35	100%
	4. Luas Konservasi kawasan mangrove	10 Ha	10 Ha	100%
	5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah	5 Ha	5 Ha	100%
	6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha	5 Ha	100%
	7. Luas hutan kota	40%	40%	100%
	8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	37%	37%	100%
	9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	294.671 m2	278.844 m2	94.6%
	10. Luas lahan Pemakaman	7	7	100%
	11. Jumlah DAS yang termonitoring	25	44	176%
	12. Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	50.000	40,460	80.92
		30%	30%	%
	13. Luasan penanaman Pohon	1Ha	1Ha	100%
	14. Angka data keanekaragaman hayati			100%
	15. Luas lokasi percontohan KEHATI			

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-41 terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS rata-rata mencapai **96.53 %**.

Pada sasaran ke-41 ini, yang menonjol adalah jumlah pemberian rekomendasi untuk ijin penggunaan air tanah yang mengalami penambahan mencapai 176%, sehingga harus terus dilakukan pengawasan dan pemantauan setiap tahun untuk mengantisipasi terjadinya subsidence/penurunan tanah akibat pemakaian yang berlebihan.

Terkait dengan lahan pemakaman khususnya pada areal pemakaman terpadu Km.15 Kecamatan Balikpapan Utara, terdapat 15.827m2 yang masih belum dapat dibebaskan karena adanya permasalahan status kepemilikan tanah, diharapkan pada tahun 2014 dapat diselesaikan.

Pencapaian sasaran strategis ke-41 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
41	1. Luas kawasan hutan	16.809,49 Ha	16.809,49 Ha
	2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha	50 Ha
	3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35	2,35
	4. Luas Konservasi kawasan mangrove	8.3 Ha	10 Ha
	5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah	5 Ha	5 Ha
	6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha	5 Ha
	7. Luas hutan kota	5 Ha	5 Ha
	8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	20%	40%
	9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	37%	37%
	10. Luas lahan Pemakaman	24.180 m2	278.844 m2
	11. Jumlah DAS yang termonitoring	13	7
	12. Jumlah rekomendasi untuk izin pengguna air tanah	50	44
	13. Luasan penanaman Pohon	31.551	40.460
	14. Angka data keanekaragaman hayati	100%	100%
	15. luas lokasi percontohan KEHATI	1ha	1ha

Pencapaian sasaran strategis ke-41 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
41	1. Luas kawasan hutan	16.809,49 Ha	16.809,49 Ha
	2. Luas rehabilitasi kawasan hutan	50 Ha	50 Ha
	3. Jumlah kegiatan Pengamanan kawasan hutan	2,35	2,35
	4. Luas Konservasi kawasan mangrove	10 Ha	10 Ha
	5. Luas Hutan kota yang terehabilitasi dan tidak bermasalah	5 Ha	5 Ha
	6. Luas Hutan Kota yang sudah di pagar	5 Ha	5 Ha
	7. Luas hutan kota	5 Ha	5 Ha
	8. Persentase terbangunnya Kebun Raya	40%	40%
	9. Persentase Ruang Terbuka hijau publik dan privat	3%	37%
	10. Luas lahan Pemakaman	294.671 m2	278.844 m2

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
	11. Jumlah DAS yang termonitoring	7	7
	12. Jumlah rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah	44	44
	13. Luasan penanaman Pohon	101 Ha	40,460 Ha
	14. Angka data keanekaragaman hayati	30%	30%
	15. Luas lokasi percontohan KEHATI	1Ha	1Ha

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-41 yaitu terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS terdapat 12 indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan dan terdapat 2 indikator yang belum mencapai target RPJMD namun demikian diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

#### **SASARAN 42 : MENINGKATNYA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
42	1. Cakupan pelayanan persampahan	100%	98%	98%
	2. Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195.54 8,02	123.664,87	136.76%
	3. Jumlah sarana dan prasarana TPA		5	125%
	4. Luas bangunan TPA	4	27.1ha	93%
	5. Jumlah kerja bakti masal	29.1ha 12 kali	10kali	83.33%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-42 meningkatnya kebersihan dan keindahan kota rata-rata mencapai **107** %.

Pencapaian sasaran strategis ke-42 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
42	1. Cakupan pelayanan persampahan	95%	98%
	2. Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195.548,02	123.664,87
	3. Jumlah sarana dan prasarana TPA	4	5
	4. Jumlah bangunan TPA	29.1ha	27.1 ha

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
	5. Jumlah kerja bakti masal	10 kali	10 kali

Pencapaian sasaran strategis ke-42 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
42	1. Cakupan pelayanan persampahan	100%	98%
	2. Volume pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA	195.548,02	123.664,87
	3. Jumlah sarana dan prasarana TPA	4	5
	4. Jumlah bangunan TPA	29.1ha	27.1ha
	5. Jumlah kerja bakti masal	10 kali	10 kali

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-42 yaitu meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat, telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 43 : MENINGKATNYA UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
43	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-	-	-
	2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik	3	2	66.66%
	3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	1500	2032	135%
	4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	5	5	100%
	5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	80	107	133.75%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	(UKL/UPL atau Amdal)			
6.	Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%	100%	100%
7.	Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%	100%	100%
8.	Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	40%	40%	100%
9.	Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	14	10	71.43%
10.	Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	93%	93%
11.	Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampah dengan TPA	65 Bank Sampah, 4 Rumah	65 Bank Sampah, 4 Rumah	100%
12.	Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	kompos 12 kegiatan	kompos 12 kegiatan	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-43 meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat rata-rata mencapai **91.65 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-43 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
43	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-	-
	2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik	2	2
	3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	2177	2032
	4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	-	5
	5. Persentase Badan usaha yang telah	97	107

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)		
6.	Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%	100%
7.	Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%	100%
8.	Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	46%	40%
9.	Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	10	10
10.	Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	93%
11.	Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos
12.	Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan

Pencapaian sasaran strategis ke-43 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
43	1. Persentase pengelolaan Gas Buang industri	-	-
	2. Jumlah stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik	3	2
	3. Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi	1500	2032
	4. Jumlah sumber tidak bergerak (industri, dll) yang telah dipantau tentang emisi cerobong	2	5
	5. Persentase Badan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL atau Amdal)	80	107



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
6.	Persentase Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah	100%	100%
7.	Persentase Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%	100%
8.	Persentase Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu	40%	40%
9.	Persentase Badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau (Proper)	10	10
10.	Persentase Peran aktif masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	93%	93%
11.	Jumlah sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos	65 Bank Sampah, 4 Rumah kompos
12.	Jumlah Penyuluhan LH kepada masyarakat	12	12 kegiatan

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-43 yaitu meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat, telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 44 : MENINGKATNYA UPAYA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA YANG ADA DI KOTA BALIKPAPAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
44	1. Jumlah grup seni dan budaya	76	80	105%
	2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	133.33%
	3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	8	160%
	4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	2	-	0%
	5. Jumlah benda, situs dan kawasan	15	25	166.67%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	cagar budaya yang dilestarikan			

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-44 meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan rata-rata mencapai **126.26%**.

Pembangunan sarana gedung seni dan budaya Kota Balikpapan berada pada tahapan pembangunan sehingga diharapkan tahun 2014 telah dapat digunakan.

Pencapaian sasaran strategis ke-44 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
44	1. Jumlah grup seni dan budaya	63	80
	2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	4
	3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7	8
	4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	-	-
	5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12	12

Pencapaian sasaran strategis ke-44 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
44	1. Jumlah grup seni dan budaya	76	80
	2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	28	4
	3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	8
	4. Jumlah sarana gedung seni dan budaya	5	-
	5. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	98	12

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-44 yaitu meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 45 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS DESTINASI PARIWISATA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
45	1. Jumlah wisata nusantara	599.9	616.25	103
	2. Jumlah wisata mancanegara	68	2	%
	3. Jumlah destinasi/obyek wisata	64.84	27.423	42.2
		8	14	9%
		13		108
				%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-45 meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata rata-rata mencapai **84.43 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-45 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2012	2013
1	2	3	4
46	1. Jumlah wisata nusantara	599.968	616.252
	2. Jumlah wisata mancanegara	64.848	27.423
	3. Jumlah destinasi/obyek wisata	13	14

Pencapaian sasaran strategis ke-45 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RPJMD Tahun Ke-2	2013
1	2	3	4
45	1. Jumlah wisata nusantara	21.938	616.252
	2. Jumlah wisata mancanegara	398.702	27.423
	3. Jumlah destinasi/obyek wisata	4	14

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-45 yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata 2 indikator telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan 1 indikator masih perlu mendapatkan perhatian sehingga pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

**SASARAN 46 : BERKEMBANGNYA USAHA-USAHA PENDUKUNG  
KEPARIWISATAAN**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
46	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	734	734	100 %

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-46 berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan rata-rata mencapai **100 %**.

Pencapaian sasaran strategis ke-46 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
46	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	655	734

Pencapaian sasaran strategis ke-46 jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun ke - 2 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target RPJMD Tahun Ke-2</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
46	Jumlah usaha pendukung kepariwisataan	640	734

Dibandingkan dengan RPJMD Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian ke-46 yaitu berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Balikpapan dapat dijabarkan dengan menggunakan Indikator Makro (Umum) sesuai RPJMD Kota Balikpapan (2011-2016) sebagai berikut:

**1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Kota Balikpapan menghasilkan capaian sebagai berikut:**

Struktur perekonomian yang ditunjukkan oleh beberapa indikator mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 sektor bangunan memberikan kontribusi sebesar 35,44% diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,62% dan diproyeksi pada tahun 2013 sektor bangunan masih memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan yang mencapai sebesar 37,89% diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,39

Indikator ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Balikpapan lebih banyak di sektor modern yang ditunjukkan oleh sektor industri, jasa dan perdagangan yang tinggi. Sementara untuk sektor pertanian pada tahun 2012 hanya memberikan kontribusi sebesar 2,94% dan diproyeksi pada tahun 2013 mengalami perlambatan sebesar 2,72%. Sejalan dengan pembangunan dibidang lain, sebaiknya pembangunan sektor pertanian juga terus diupayakan peningkatannya. Dengan meningkatnya hasil-hasil pertanian diharapkan kota Balikpapan tidak lagi sangat tergantung/mengurangi ketergantungan pada daerah lain untuk komoditas pertanian, sehingga kebutuhan penduduk akan komoditas pertanian dapat terpenuhi dengan harga terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di kota Balikpapan, dan menciptakan ketahanan pangan di kota Balikpapan serta terkendali inflasi.

**2. Indikator Pendapatan Per-Kapita, Kota Balikpapan menghasilkan capaian sebagai berikut:**

Pendapatan Per Kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah dan mencerminkan besarnya pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita masih bersifat semu dan mengandung inflasi didalamnya. Semu artinya pendapatan per kapita tersebut masih belum dapat dinikmati oleh setiap orang dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja, sedang inflasi merupakan suatu beban yang harus ditanggung oleh masyarakat/rumah tangga terhadap kenaikan relatif harga barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Berdasarkan uraian tersebut, secara ringkas dapat dikatakan bahwa jika pertumbuhan Pendapatan Per Kapita atas dasar harga berlaku lebih besar/kecil dari laju inflasi pada periode tahun yang sama, berarti pada tahun tersebut mencerminkan pendapatan riil atau daya beli masyarakat mengalami kenaikan/penurunan. Dimana pertumbuhan pendapatan perkapita kota Balikpapan pada tahun 2012 meningkat 15,45% dimana laju inflasi mencapai 6,41, arti daya beli masyarakat meningkat, dan pada tahun 2013 inflasi kota Balikpapan mencapai 8,56% dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 9,03. Untuk itu yang perlu di perhatikan bagaimana menjaga agar inflasi di kota Balikpapan di bawah 2 digit berkisar 5 + 1.

**3. Indikator Pengentasan Kemiskinan, Kota Balikpapan menghasilkan capaian sebagai berikut:**

- a. **Jumlah penduduk miskin** di Balikpapan pada Tahun 2012 sebanyak 19.700 jiwa (3,30 persen), meskipun hanya mengalami penurunan 0,09 persen dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 yang 19.819 jiwa (3,39 persen) akan tetapi angka tersebut telah merefleksikan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan yang ditargetkan dikarenakan persentasenya telah melampaui target RPJMD yang mengupayakan penurunan hingga mencapai kurang dari 3,5 persen.
- b. Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan juga **Tingkat Kedalaman dan Keparahan** dari kemiskinan itu sendiri. Pada Tahun 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan kemiskinan menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,26 pada keadaan tahun 2011 menjadi 0,71 pada tahun 2012. Demikian juga indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,03 pada tahun 2011 menjadi 0,24 pada tahun 2012, sehingga terdapat kenaikan sebesar 0,21 poin.

**4. Indikator Indeks Pembangunan Manusia, Kota Balikpapan menghasilkan capaian sebagai berikut:**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, angka IPM mencapai 78,83 dan tahun 2011 mencapai nilai 78,85, tahun 2012 meningkat menjadi 79,38 dan semua capaian mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 0,275 per tahun.

Pencapaian tersebut menempatkan Kota Balikpapan tetap pada posisi peringkat pertama di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan posisi 12 nasional.

## **BAB III**

### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2014 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Balikpapan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013**

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum dibagi ke dalam nilai atas dasar harga berlaku dan nilai atas dasar harga konstan (harga konstan tahun 2000). Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut:

##### **▪ PDRB Harga Berlaku**

Di antara sektor-sektor pembentuk PDRB di Kota Balikpapan, bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan, perkembangan kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa kota Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin menggeliatnya perkembangan perekonomian kota .

Sektor bangunan merupakan sektor yang mengalami kenaikan Berdasarkan Harga berlaku, pada tahun 2012 sektor ini mempunyai nilai sebesar Rp. 9.356.005,52 juta, Sektor ini mengalami pertumbuhan



sebesar 24,09 % dari tahun sebelumnya sebesar 28,53%. diproyeksi nilai sektor ini pada tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp. 10.925.943,25 juta, dan Rp. 12.759.316,53 juta, sedangkan untuk sektor Perdagangan Hotel dan restoran pada tahun 2012 sektor ini mempunyai nilai sebesar Rp. 7.820.840,34 atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,67% dari tahun sebelumnya sebesar 8,82 dan di proyeksikan nilai sektor ini pada tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp. 7.897.607,89 dan Rp. 8.410.961,29.

Dimana sektor Bangunan memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan Produk Domestik regional bruto kota Balikpapan yaitu sebesar 35,44% pada tahun 2012 dan diproyeksi meningkat pada tahun 2013 sebesar 37,89% dan 2014 sebesar 39,54% dan diikuti sektor Perdagangan Hotel dan restoran yaitu sebesar 29,62 % pada tahun 2012 dan diproyeksi pada tahun 2013 dan 2014 mengalami perlambatan sebesar 27,39 % dan 26,07 %. Dan bila dilihat dari nilai sektor Perdagangan Hotel dan restoran mengalami peningkatan dengan kata lain sektor Perdagangan Hotel dan restoran tetap tumbuh tapi lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Sektor ketiga penyumbang PDRB kota Balikpapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2012 adalah sebesar 1.905.199,15 juta rupiah, sehingga andilnya mencapai 14,71% Sektor ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan cenderung stabil dengan pertumbuhan rata-rata dari tahun 2008-2012 sebesar 15,17%. Apabila dilihat dari komponen penyusunnya, Nilai Tambah Bruto (NTB) yang disumbangkan dari sektor ini adalah berasal dari Sub Sektor Angkutan khususnya angkutan udara dimana sub sektor angkutan udara pada tahun 2012 memberi kontribusi kepada sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 48,47 dan proyeksi meningkat pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 50,84% dan 53,29% .

**Tabel 3.1**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Balikpapan Tahun 2008-2012 dan Proyeksi 2013-2014**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010 r)	2011 r)	2012 *)	2013 **)	2014 ***)
1 PERTANIAN	656.090,55	670.993,06	711.348,42	740.874,28	776.321,93	785.035,47	793.919,02
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	18.298,97	20.750,77	26.526,51	29.438,10	31.660,68	33.633,14	35.728,48
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	416.163,40	447.888,53	524.533,35	551.981,16	575.997,36	587.544,78	599.348,28
4 LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	273.377,86	295.683,81	332.535,71	432.050,89	471.116,06	653.259,34	911.280,55
5 BANGUNAN	4.020.949,64	4.881.071,23	5.866.067,68	7.279.238,72	9.356.005,53	10.925.943,25	12.759.316,53

6	PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	5.456.284,95	5.948.720,13	6.553.075,70	7.131.105,63	7.820.840,35	7.897.607,90	8.410.961,30
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.207.715,95	2.541.960,98	3.060.622,98	3.461.008,17	3.884.037,42	4.294.445,21	4.845.144,80
8	KEUANGAN,PERSE WAAN,DAN JASA PERUSAHAAN	1.311.097,28	1.451.461,75	1.603.953,56	1.773.958,93	1.905.199,15	2.007.642,71	2.156.713,73
9	JASA - JASA	1.220.585,87	1.283.015,56	1.318.750,73	1.483.223,74	1.578.769,15	1.649.594,08	1.756.109,56
<b>Total PDRB</b>		<b>15.580.564,47</b>	<b>17.541.545,82</b>	<b>19.997.414,64</b>	<b>22.882.879,62</b>	<b>26.399.947,62</b>	<b>28.834.705,88</b>	<b>32.268.522,26</b>

### ▪ PDRB Harga Konstan

PDRB harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar. Adapun tahun dasar yang ditetapkan adalah tahun 2000, mengingat kondisi perekonomian nasional pada tahun tersebut lebih baik dan lebih stabil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstandi Kota Balikpapan Tahun 2008-2012 dan Proyeksi 2013-2014**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010 r)	2011 r)	2012 *)	2013 **)	2014 ***)
1 PERTANIAN	476.564,95	469.844,87	476.511,51	481.484,65	486.828,36	492.273,55	496.457,88
2 PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	5.830,83	6.165,57	6.595,56	6.999,24	7.435,29	7.890,33	8.383,47
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	288.685,6	294.510,55	299.317,86	305.235,61	311.346,45	317.592,46	319.707,16
4 LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	122.258,75	125.882,85	135.806,98	176.331,24	189.907,11	204.531,98	212.814,80
5 BANGUNAN	2.039.692,66	2.398.196,35	2.805.332,95	3.287.413,22	3.820.302,90	4.460.203,64	5.224.682,54
6 PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	4.029.528,74	4.265.807,29	4.441.552,90	4.686.030,95	4.863.573,67	5.048.482,28	5.257.154,32
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.725.660,94	1.922.729,24	2.135.984,88	2.276.943,56	2.549.892,58	2.861.850,17	3.125.206,35
8 KEUANGAN,PERSEWA AN,DAN JASA PERUSAHAAN	432.393,2	251.813,58	489.746,19	518.713,79	547.363,87	577.692,77	599.220,87
9 JASA - JASA	431.178,12	445.198,11	465.859,27	486.568,35	507.399,67	512.448,32	514.649,52
<b>Total PDRB</b>	<b>9.551.793,79</b>	<b>10.390.239,95</b>	<b>11.256.708,09</b>	<b>12.225.720,59</b>	<b>13.284.049,89</b>	<b>14.482.965,50</b>	<b>15.758.276,92</b>

Keterangan : \*\* Proyeksi

Sumber BPS Kota Balikpapan

Sama halnya dengan PDRB harga berlaku, sampai dengan tahun 2012 sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB di Kota Balikpapan dengan peranannya sekitar 28,76% dan 36,61% berdasarkan harga konstan. Pada urutan ketiga adalah sektor angkutan dan komunikasi dengan peranan-nya sebesar 19.20%.

Secara keseluruhan PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2012 sebesar 13.284.049,88 juta rupiah atau meningkat sebesar 1.058.329,29 juta rupiah dari tahun sebelumnya atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,66%. Diproyeksikan pada tahun 2013 PDRB Kota Balikpapan berdasarkan harga Konstan sebesar 14.482.965,50 juta rupiah atau tumbuh 9,03% dan pada tahun 2014 sebesar 15.758.276,92 juta rupiah atau mengalami perlambatan sebesar 8,81%

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Besaran daya tumbuh yang diturunkan dari perubahan nilai PDRB Harga Konstan pada 2 (dua) titik waktu akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, karena indikator ini dapat memberikan implikasi pada kinerja perekonomian makro. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya percepatan, berarti pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Namun percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan (pengentasan masalah kemiskinan) dan penyediaan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), akan menjadi polemik tersendiri bagi pembangunan. Pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila laju pertumbuhan ekonominya tinggi, laju inflasinya rendah, penduduk miskin semakin berkurang dan tingkat pengangguran semakin rendah.

**Tabel 3.3**  
**Pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan Tahun 2008–2012 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-14 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (dalam satuan persen)**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013**)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	34,89	-1,41	1,42	1,04	1,11	1,12	0,85
Pertambangan dan Penggalian	6,30	5,74	6,97	6,12	6,23	6,12	6,25
Industri Pengolahan	1,38	2,02	1,63	1,98	2,00	2,01	0,67
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,99	2,96	7,88	29,84	7,70	7,70	4,05
Konstruksi & Bangunan	17,09	17,58	16,98	17,18	16,21	16,75	17,14
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,20	5,86	4,12	5,50	3,79	3,80	4,13
Angkutan dan Komunikasi	10,83	11,42	11,09	6,60	11,99	12,23	9,20

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,20	6,83	6,03	5,91	5,52	5,54	3,73
Jasa-jasa	4,82	3,25	4,64	4,45	4,28	1,00	0,43
Pertumbuhan Ekonomi	10,14	8,78	8,34	8,61	8,66	9,03	8,81
<i>Keterangan : ** Proyeksi</i>							
<i>Sumber BPS Kota Balikpapan</i>							

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini relatif cukup fluktuatif dan mengalami pasang surut meskipun pada empat tahun terakhir ini relatif cukup terjaga pertumbuhannya. Hal ini diduga sebagai dampak kontraksi perekonomian nasional dan adanya krisis keuangan internasional sehingga ikut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian di daerah. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan periode tahun 2008-2012 mencapai 8,60%. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 10,14 dikarenakan adanya peningkatan disektor pertanian dimana tanaman padi yang terdapat di Kota Balikpapan mengalami panen serentak dan terdapat moment nasional di Kota Balikpapan yaitu penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON), dan pada tahun 2009 mengalami perlambatan 1,36 point menjadi 8,78 % setelah itu yaitu sampai tahun 2012 pertumbuhan mengalami peningkatan walaupun kecil dan dapat dikatakan relatif stabil sementara pada tahun 2013 perekonomian di kota Balikpapan diharapkan dapat tumbuh. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan tersebut maka perlu adanya strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kembali gairah percepatan pertumbuhan ekonomi, guna mencapai keberhasilan pembangunan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Dengan kondisi tersebut, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor ekonomi yang mampu mengoptimalkan lahan dengan penyerapan tenaga kerja yang besar dan produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

### **c. Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB**

Kesembilan sektor yang ada, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sektor utama, yaitu: (i) Sektor Primer, (ii) Sektor Sekunder, dan (iii) Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Kelompok Sektor Sekunder terdiri dari sektor Industri Pengolahan, Listrik dan Air, serta Bangunan. Kelompok Sektor Tersier terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa.

**Tabel 3.4**  
**Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Balikpapan Tahun**  
**2008-2012 dan Proyeksi 2013-2014 (%)**

<i>Lapangan Usaha</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013**)</i>	<i>2014**)</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Pertanian	4,21	3,83	3,56	3,24	2,94	2,72	2,46
Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11
Industri Pengolahan	2,67	2,55	2,62	2,41	2,18	2,04	1,86
Listrik, Gas & Air Bersih	1,75	1,69	1,66	1,89	1,78	2,27	2,82
Konstruksi & Bangunan	25,81	27,83	29,33	31,81	35,44	37,89	39,54
Perdagangan, Hotel dan Restoran	35,02	33,91	32,77	31,16	29,62	27,39	26,07
Angkutan dan Komunikasi	14,17	14,49	15,31	15,12	14,71	14,89	15,02
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,41	8,27	8,02	7,75	7,22	6,96	6,68
Jasa-jasa lainnya	7,83	7,31	6,59	6,48	5,98	5,72	5,44
Total	100	100	100	100	100	100	100
<i>Keterangan : ** Proyeksi</i>							
<i>Sumber BPS Kota Balikpapan</i>							

Pada tabel III memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 terjadi. Pergeseran peranan yang mengalami peningkatan adalah sektor konstruksi dan bangunan terhadap sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Sementara sektor yang lainnya berfluktuatif dan masih dapat dikatakan relatif stabil

Pada beberapa tahun terakhir ini, di Kota Balikpapan terdapat sedikit pergeseran struktur ekonomi pada kelompok sektor yaitu pada kelompok sektor tersier menuju ke sekunder hal ini dikarenakan adanya pergeseran pada sektor konstruksi dan bangunan terhadap perdagangan, hotel dan restoran.

Besarnya presentase Kontribusi kedua sektor tersebut (sektor sekunder & sektor teriser) terhadap perekonomian kota Balikpapan, ini menunjukkan kota Balikpapan menuju pada kota yang modern atau menuju kota metropolitan.

**Tabel 3.5 dan tabel 3.6**  
**menggambarkan peranan ketiga kelompok sektor tersebut dalam mendukung**  
**pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, baik menurut harga berlaku maupun harga**  
**konstan.**

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013**)</b>	<b>2014**)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
Primer	674.389,52 (4,33)	691.743,83 (3,94)	737.874,93 (3,69)	770.312,38 (3,37)	807.982,61 (3,06)	818.668,61 (2,84)	829.647,50 (2,57)
Pertanian	656.090,55	670.993,06	711.348,42	740.874,28	776.321,93	785.035,47	793.919,02
Pertambangan dan Penggalian	18.298,97	20.750,77	26.526,51	29.438,10	31.660,68	33.633,14	35.728,48
Sekunder	4.710.490,90 (30,23)	5.624.643,57 (32,06)	6.723.136,7 4 (33,62)	8.263.270,7 7 (36,11)	10.403.118, 94 (39,41)	12.166.747,3 7 (42,19)	14.269.945, 36 (44,22)
Industri Pengolahan	416.163,40	447.888,53	524.533,35	551.981,16	575.997,36	587.544,78	599.348,28
Listrik, Gas dan Air Bersih	273.377,86	295.683,81	332.535,71	432.050,89	471.116,06	653.259,34	911.280,55
Konstruksi dan Bangunan	4.020.949,64	4.881.071,23	5.866.067,6 8	7.279.238,7 2	9.356.005,5 3	10.925.943,2 5	12.759.316, 53
Tersier	10.195.684,0 5 (65,44)	11.225.158,4 2 (63,99)	12.536.402, 97 (62,69)	13.849.296, 47 (60,52)	15.188.846, 07 (57,33)	15.849.289,9 0 (54,97)	17.168.929, 39 (53,21)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.456.284,95	5.948.720,13	6.553.075,7 0	7.131.105,6 3	7.820.840,3 5	7.897.607,90	8.410.961,3 0
Angkutan dan Komunikasi	2.207.715,95	2.541.960,98	3.060.622,9 8	3.461.008,1 7	3.884.037,4 2	4.294.445,21	4.845.144,8 0
Keuangan, Persewaan dan js. Pershn	1.311.097,28	1.451.461,75	1.603.953,5 6	1.773.958,9 3	1.905.199,1 5	2.007.642,71	2.156.713,7 3
Jasa-jasa	1.220.585,87	1.283.015,56	1.318.750,7 3	1.483.223,7 4	1.578.769,1 5	1.649.594,08	1.756.109,5 6
Total	15.580.564,4 7	17.541.545,8 2	19.997.414, 64	22.882.879, 62	26.399.947, 62	28.834.705,8 8	32.268.522, 26

**Keterangan : \*\* Proyeksi**  
**Sumber BPS Kota Balikpapan, data diolah**

Kurun waktu lima tahun terakhir 2008-2012, pada tahun 2008 kontribusi sektor primer mencapai 4,33 % hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian mencapai sebesar 51,40% setelah tahun 2008 yaitu dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor primer cenderung mengalami perlambatan dimana rata-rata pertumbuhan kelompok primer lebih kurang 4,62% per tahun. Pada kelompok sektor sekunder, rata-rata pertahun mencapai 21,91 % Pada kelompok sektor terakhir atau sektor tersier mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,48%. Kelompok sektor tersier masih menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kota Balikpapan begitu pula dengan prediksi tahun 2013-2014. Berturut – turut pada tahun 2013 dan 2014, kelompok ini bisa menyumbang /memberi kontribusi PDRB Kota Balikpapan sebesar 54,97% dan 53,21%. Penurunan kontribusi pada tahun 2013-2014 disebabkan karena adanya peningkatan kontribusi kelompok sekunder yang meningkat kontribusinya dari sebesar 39,41% berdasarkan harga berlaku pada tahun 2012 , diprediksikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 42,19 % dan pada tahun 2014 sebesar 44,22%. Peningkatan kontribusi sektor sekunder ini banyak disumbang oleh sektor listrik, gas dan air bersih yang pada tahun 2013 -2014 diprediksikan mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 38,,66% dan 39,50% berdasarkan harga berlaku.

Struktur perekonomian daerah telah mengalami pergeseran kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB di Kota Balikpapan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kelompok sektor berfluktuatif. Pada tahun 2012, sektor primer mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 807.982,61 juta, sementara berdasarkan harga konstan, kontribusi yang diberikan oleh sektor primer tersebut sebesar Rp. 494.263,65 juta.

Pada tahun 2012 pertumbuhan kelompok primer berdasarkan harga berlaku sebesar 4,89 % sementara pertumbuhan berdasarkan harga konstan tahun sebesar 1,18%. Pertumbuhan untuk sektor ini cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 diprediksi sektor ini mengalami perlambatan sebesar sebesar 1,32% dan tahun 2014 diprediksi mengalami perlambatan 1,34% berdasarkan harga berlaku dengan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor primer pada tahun 2013 sebesar 818.668,61 juta dan tahun 2014 diprediksi sebesar 829,647,50 juta rupiah.

Tidak demikian dengan sektor sekunder dimana kelompok sektor sekunder mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 sektor ini mengalami peningkatan sebesar 2,99 digit point dari tahun sebelumnya sehingga pertumbuhannya pada tahun 2012 sebesar 25,90 %. Pada tahun 2012 berdasarkan harga berlaku sementara berdasarkan harga konstan sebesar 14,66%. Prediksi pada tahun 2013 dan 2014 dengan kontribusi yang diberikan oleh kelompok sektor ini sebesar 12.166,747,37 juta rupiah dan 14.269.945,36 juta rupiah sehingga pertumbuhannya pada tahun 2013 mengalami perlambatan sebesar 16,95% dan pada tahun 2014 diprediksi mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 0,33 point sehingga pada tahun 2014 diprediksi mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 17,29% berdasarkan harga berlaku. Dipredikasikan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan kelompok sektor sekunder pada tahun 2013 adalah sektor bangunan, yang mana pada tahun 2013 diprediksi memberi kontribusi sebesar 37,89%, Prediksi tahun 2014 sektor bangunan tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang paling tinggi, sektor ini memberi kontribusi sebesar 39,54%

Kelompok sektor tersier terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa. Pertumbuhan sektor tersier yang positif ini membuat sektor sekunder yang beberapa tahun terakhir ini mengalami sedikit penurunan. Sektor tersier mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,48% berdasarkan harga berlaku atau sebesar 6,35% per tahun berdasarkan harga konstan. Kontribusi yang diberikan sektor ini pada tahun 2012 berdasarkan harga berlaku sebesar 15.188.846,07 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 1.339.549,60 juta rupiah. Sektor ini tumbuh sebesar 9,67 % atau mampu memberikan kontribusi pada PDRB Kota Balikpapan sebesar 57,53%.

Berdasarkan harga konstan sektor primer ini berkontribusi terhadap PDRB sebesar 63,75% atau 8.468.229,78 juta rupiah. Nilai ini meningkat 499.973,14 juta rupiah dari tahun sebelumnya dan meningkat sebesar 0.50 point dari kontribusi yang disumbangkan pada tahun 2011. Pada tahun 2013 berdasarkan harga berlaku diprediksi kelompok sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 15.849.289,90 atau mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Balikpapan sebesar 54,97%. Kelompok sektor ini mengalami pertumbuhan melambat sebesar 4,35%. Sektor ini



mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 10,48 % berdasarkan harga berlaku atau sebesar 6,29% berdasarkan harga konstan sedang prediksi tahun 2014 sektor tersier memberikan kontribusi sebesar 17.168.929,39 juta rupiah. Pada tahun 2012 Kontribusi terbesar sektor tersier ini disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu memberikan kontribusi sekitar 29,62%. Pada tahun 2013 dan 2014 diprediksi kelompok sektor tersier mengalami sedikit penurunan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan, yang semula pada tahun 2012 sebesar 57,97% menurun menjadi 54,97% dan 53,21%. Penurunan peranan sektor tersier tersebut pada tahun 2011 disebabkan meningkatnya kembali sektor sekunder.

Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 yang bergerak positif dan, membawa harapan keadaan perekonomian di Kota Balikpapan pada tahun-tahun mendatang jauh lebih baik dan terkendali. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 8,66% pada tahun 2013 meningkat sebesar 9,03% sementara pada tahun 2014 diprediksi perekonomian di Kota Balikpapan mengalami perlambatan sebesar 8,81 % walaupun pertumbuhannya melambat tetapi nilai PDRB nya mengalami peningkatan 15.758.276,92 juta rupiah dari prediksi tahun 2013 sebesar 14.482.965,50 juta rupiah.

**Tabel 3.6**  
**Struktur Perekonomian Pembentuk PDRB Berdasar Kelompok Sektor Ekonomi di Kota Balikpapan atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2008- 2012 dan proyeksi Tahun 2013-2014 (dalam Rp juta dan persen)**

<i>Sektor Ekonomi</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013**)</i>	<i>2014**)</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Primer	482.395,78 (5,05)	476.010,44 (4,58)	483.107,07 (4,29)	488.483,88 (4,00)	494.263,65 (3,72)	500.163,88 (3,45)	504.841,35 (3,20)
Pertanian	476.564,95	469.844,87	476.511,51	481.484,65	486.828,36	492.273,55	496.457,88
Pertambangan dan Penggalian	5.830,83	6.165,57	6.595,56	6.999,24	7.435,29	7.890,33	8.383,47
Sekunder	2.450.637,01 (25,66)	2.818.589,75 (27,13)	3.240.457,7 9 (28,79)	3.768.980,0 7 (30,83)	4.321.556,4 6 (32,53)	4.982.328,08 (34,40)	5.757.204,5 0 (36,53)
Industri	288.685,60	294.510,55	299.317,86	305.235,61	311.346,45	317.592,46	319.707,16

Pengolahan							
Listrik, Gas dan Air Bersih	122.258,75	125.882,85	135.806,98	176.331,24	189.907,11	204.531,98	212.814,80
Konstruksi dan Bangunan	2.039.692,66	2.398.196,35	2.805.332,95	3.287.413,22	3.820.302,90	4.460.203,64	5.224.682,54
Tersier	6.618.761,00 (69,29)	7.095.639,76 (68,29)	7.533.143,23 (66,92)	7.968.256,64 (65,18)	8.468.229,78 (63,75)	9.000.473,54 (62,15)	9.496.231,07 (60,26)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.029.528,74	4.265.807,29	4.441.552,90	4.686.030,95	4.863.573,67	5.048.482,28	5.257.154,32
Angkutan dan Komunikasi	1.725.660,94	1.922.729,24	2.135.984,88	2.276.943,56	2.549.892,58	2.861.850,17	3.125.206,35
Keuangan, Persewaan dan js. Pershn	432.393,20	461.905,12	489.746,19	518.713,79	547.363,87	577.692,77	599.220,87
Jasa-jasa	431.178,12	445.198,11	465.859,27	486.568,35	507.399,67	512.448,32	514.649,52
Total	9.551.793,79	10.390.239,95	11.256.708,09	12.225.720,59	13.284.049,89	14.482.965,50	15.758.276,92

#### d. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat kemakmuran/kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Meski nilai yang diperoleh belum tentu mencerminkan nilai yang benar-benar diperoleh masyarakat, setidaknya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat. Sementara yang dimaksud pendapatan, adalah Nilai Tambah Bruto/ NTB (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Pendapatan Perkapita
(1)	(2)
2008	21.369.170
2009	24.030.199

2010 r)	27.654.236
2011*)	31.795.728
2012	33.231.080
2013**	34.731.228
2014**	36.299.096
<i>Keterangan : ** Proyeksi</i>	
<i>Sumber: BPS Kota Balikpapan, Analisis, data diolah</i>	

Pendapatan per kapita penduduk Kota Balikpapan dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan dapat dilihat dari tabel diatas dimana diprediksi tahun 2013 dan 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 14,16%

#### **e. Perkembangan Harga (Inflasi)**

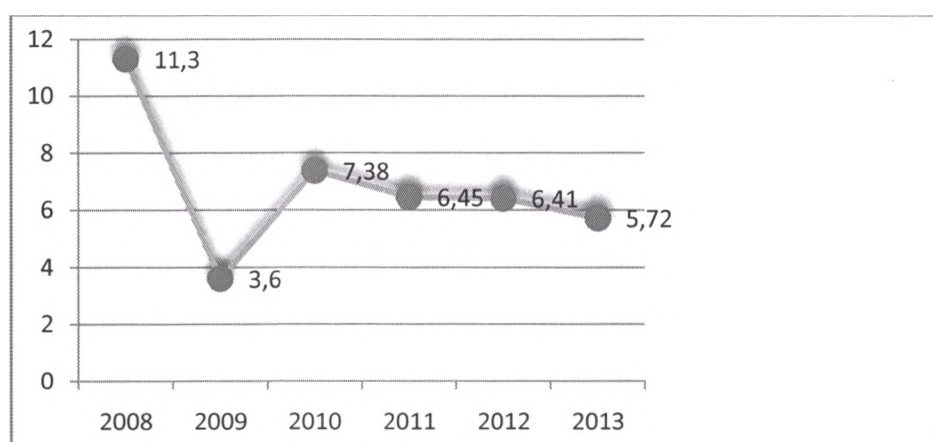
Inflasi adalah kenaikan harga - harga secara umum dan terus menerus. Inflasi ini akan menggambarkan besarnya perubahan harga barang - barang dan jasa yang beredar di pasaran. Inflasi sering dihitung dengan mempergunakan Indek Harga Konsumen (IHK) atau Cunsomer Price Index (CPI). Inflasi merupakan hasil perbandingan indek harga akibat dari kenaikan harga. Besarnya inflasi dapat digambarkan dengan perkembangan PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) tiap tahun dan IHK.

Tahun	Inflasi
(1)	(2)
2008	11,30
2009	3,60
2010	7,38
2011	6,45
2012	6,41
2013**	5,72
2014**	5,10

Sumber: Sumber: BPS Kota Balikpapan, Analisis, data diolah

Kondisi perekonomian pada tahun 2012 mengalami percepatan sebesar 0.05 digit point apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut sebesar 8,66%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,66%, tingkat inflasi di Kota Balikpapan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2011, dimana inflasi pada tahun 2012 sebesar 6,41%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diprediksi mengalami percepatan pertumbuhan, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan sebesar 9,03 % sementara tingkat inflasi diprediksi juga akan menurun menjadi 5,72% dan pendapatan perkapita tumbuh sebesar 14,16%, dengan terjadinya penambahan pendapatan perkapita untuk prediksi tahun 2013 dan 2014 dan bahkan diatas laju inflasi kota Balikpapan pada tahun 2013 yang mencapai 5,72% berarti telah terjadi penguatan daya beli masyarakat kota Balikpapan sebesar 8,44% dan begitu pula prediksi tahun 2014 dengan laju inflasi sebesar 5,10% dan pertumbuhan mencapai 8,81% berarti telah terjadi penguatan daya beli masyarakat kota Balikpapan sebesar 9,06% sehingga dengan demikian diharapkan kondisi perekonomian di Kota Balikpapan juga akan lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Grafik 3.1**  
**Laju Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2008 - 2012 dan Proyeksi Tahun 2013-2014**



Kondisi perekonomian di Kota Balikpapan secara umum tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian di tingkat atasnya atau kondisi perekonomian global. Berbagai instrumen yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian antara lain: stabilitas nilai tukar rupiah; fluktuasi tingkat suku bunga SBI; harga minyak dunia serta kebijakan ekonomi nasional terkait dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

#### **f. Investasi**

Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena multiplier effect dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

PDRB sektor investasi dibentuk oleh dua sektor utama, yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan stok (Perubahan stok ini meliputi persediaan barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi). Pembentukan modal tetap bruto meliputi berbagai macam pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang dihasilkan di suatu wilayah (region) atau impor yang selanjutnya dipergunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Perhitungan PMTB ini dapat diperoleh berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh tiap - tiap lapangan usaha atau juga berdasarkan arus barang.

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013**)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Investasi	4.561.487,5 8	4.615.429,86	5.053.869,06	5.673.296,93	12.044.469,3 7	12.375.610,6 1	12.718.733,1 8
.Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.158.559,2 5	4.311.137,77	4.535.437,65	4.783.708,39	8.228.616,72	8.368.241,50	8.510.235,45
Perubahan Stok	402.928,33	304.292,09	518.431,41	889.588,54	3.815.852,66	4.007.369,12	4.208.497,73

Secara rata-rata pertumbuhan investasi selama kurun waktu tahun 2008 - 2012 sebesar 6,33 % per tahun, sedangkan secara kumulatif mencapai 36,88 %. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Stok Barang memiliki kontribusi 84,79 % dan 8,05 % terhadap kegiatan investasi kota Balikpapan yang mencapai 14,75 % pada tahun 2012.

#### **g. Perdagangan Internasional (Exspor)**

Nilai ekspor atas dasar harga berlaku Kota Balikpapan tahun 2013 diproyeksi sebesar Rp. 39.956.939 juta rupiah, lebih tinggi dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 38.469.089 juta rupiah dan tahun 2014 nilai ekspor atas dasar harga berlaku diproyeksi sebesar 16.467.034 juta rupiah dan import sebesar 8.169.881 juta rupiah. dimana tahun 2013 dan 2014 ekspor maupun impor diproyeksi dengan pertumbuhan sebesar 4 % .

Jika dihitung atas dasar harga konstan, nilai ekspor pada tahun 2013 diproyeksi sebesar Rp. 15.906.785 juta rupiah, lebih tinggi dari ekspor tahun 2012 sebesar Rp. 15.365.597 juta rupiah dan pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 41.502.333 juta rupiah. Sementara itu, nilai impor atas dasar harga konstan Tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 14.019.297 juta rupiah melampaui nilai ekspor pada tahun 2012 sebesar 13.436.703 juta rupiah dan pada tahun 2014 diproyeksi sebesar 8.619.881 juta rupiah. Seperti hal Ekspor maupun import menurut harga berlaku begitu pula Ekspor maupun import menurut harga konstan tahun 2013 dan 2014 diproyeksi dengan pertumbuhan sebesar 4 %.

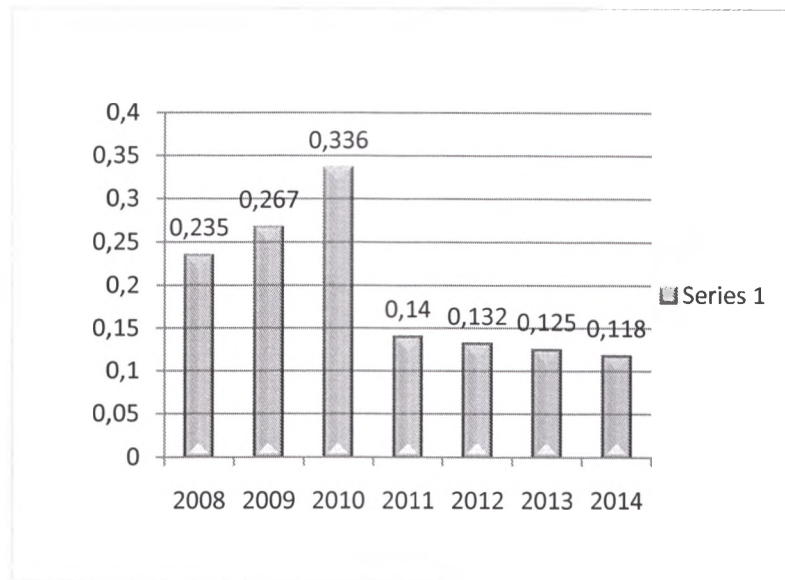
#### **h. Indeks Gini (Gini Ratio / Gini Index)**

Ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 tergolong rendah, meskipun Indeks Gini sedikit meningkat dari 0,267 di tahun 2009 menjadi 0,33 di tahun 2010 (nilai gini antara 0,20 - 0,35 menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang/pemerataan pendapatannya relatif sama, Todaro P. Michael, 1994). Sebagai salah satu wilayah perkotaan biasanya dicirikan dengan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten, karena masyarakat di kota mempunyai kondisi sosial ekonomi yang relatif lebih heterogen dibandingkan wilayah kabupaten. Wilayah perkotaan ditandai dengan banyaknya lapangan kerja formal yang memberikan pendapatan/upah yang berbeda untuk jenis pekerjaan tertentu.

Jika kita lihat tingkat pemerataan pendapatan yang dicapai di Kota Balikpapan relatif baik. Penilaian indikator ini dengan menggunakan Indeks Gini Ratio, dimana angka koefisien gini Ratio kota Balikpapan dari selama periode 2008-2012 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien gini rasio maka kota Balikpapan berada diketimpangan sedang pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 dan tahun 2011 -2012 dibawah 0,31 yang disebut menuju ketimpangan rendah, yang berarti bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan. walaupun

distribusi pendapatan masih terkonsentrasi pada golongan berpendapatan menengah dan tinggi dan pada tahun 2013-2014 diproyeksi berada  $G < 0,3$  untuk itu dapat dilihat grafik gini ratio berikut:

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Indeks Gini Kota Balikpapan Tahun 2008 - 2012 dan pridiksi 2013-2014**



### **Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014**

Melihat perkembangan perekonomian Kota Balikpapan Tahun 2008-2012, proyeksi perekonomian 2013-2014 bagaimana prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

#### **a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2013**

Pada dua tahun mendatang, diperkirakan perekonomian Kota Balikpapan masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan isu perekonomian Indonesia terutama isu kenaikan BBM. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, industri, Perdagangan, jasa. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

- Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
- Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.
- Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi yang ramah lingkungan bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Balikpapan, di samping menciptakan lapangan kerja.
- Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Balikpapan.
- Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Balikpapan sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.



## **b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014**

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Balikpapan. Berdasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2012 dan perkiraan 2013 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka Prospek perekonomian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2013 -2014 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai Produk domestik regional Bruto dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 9,03 pada tahun 2013 dan 8,81 pada tahun 2014;
- Inflasi pada Tahun 2013-2014 diperkirakan pada kisaran dibawah dua digit yaitu sekitar 5%.
- PDRB Harga Berlaku pada tahun 2013-2014 diperkirakan sebesar Rp.28.834.705,87juta. Dan Rp 32.268.522,25 Juta;
- PDRB Harga Konstan pada tahun 2013-2014 diperkirakan sebesar Rp. 14.482.965,50 juta dan Rp. 15758276,92 Juta;

## **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat

memenuhi kebutuhan primernya/basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas
- Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2014 di Kota Balikpapan diarahkan untuk:

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2014, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan *good governance*, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai budaya. (3) Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam tabel 2.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Balikpapan Tahun 2011-2013**  
**(dalam Satuan Rupiah)**

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2011	REALISASI TAHUN 2012	REALISASI TAHUN 2013	TAHUN ANGGARAN 2014
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>231.674.530.575,89</b>	<b>340.503.244.597,14</b>	<b>470.465.949.932,97</b>	<b>450.420.951.741,00</b>
1.1.1	Hasil Pajak daerah	170.370.071.078,00	261.094.566.470,47	340.998.751.947,69	298.029.544.611
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.442.311.854,00	43.287.221.029,00	57.378.640.539,94	71.482.371.579
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.875.961.842,68	13.191.116.874,76	17.191.752.156,80	29.500.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	23.986.185.801,21	22.930.340.222,91	54.896.805.288,54	51.409.035.551
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.151.703.793.532,00</b>	<b>1.338.672.315.591,00</b>	<b>1.281.536.428.792,00</b>	<b>1.176.771.223.989</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	875.545.969.532,00	783.883.093.082	831.216.372.792,00	718.799.721.989
1.2.2	DAU	268.229.224.000,00	385.085.246.000,00	427.133.126.000,00	449.982.262.000
1.2.3	DAK	7.928.600.000,00	13.459.300.000,00	23.186.930.000,00	7.989.240.000
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>415.610.143.290,00</b>	<b>433.792.294.200,00</b>	<b>669.955.801.300,00</b>	<b>450.234.920.300</b>
1.3.1	Hibah	3.000.000.000,00	0	0	8.900.000.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0		0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	192.223.656.000,00	219.690.340.000,00	336.773.634.300,00	241.017.600.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	88.147.637.290,00	63.214.153.000,00	93.623.367.000,00	93.623.367.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	132.238.850.000,00	150.887.801.200,00	239.558.800.000,00	106.693.953.300
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.798.988.467.397,89</b>	<b>2.205.153.356.919,20</b>	<b>2.421.958.180.024,97</b>	<b>2.077.427.096.030</b>

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Balikpapan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Balikpapan diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Balikpapan selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Balikpapan.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Balikpapan. Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Balikpapan telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 5) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 6) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;



- 7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- 9) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 10) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 11) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 12) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 13) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Balikpapan.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tren yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2011-2014 di Kota Balikpapan, dapat dilihat pada tabel III.16 sebagai berikut.

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5=3/4
01.	2011	231.674.530.575,89	1.798.988.467.397,89	12,84
02.	2012	340.503.244.597,14	2.205.153.356.919,20	15,41
03.	2013	470.465.949.932,97	2.421.958.180.024,97	19,41
04.	2014	450.420.951.741,00	2.077.427.096.030,00	21,66

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, tren kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2014 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Balikpapan selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan.

Peran Pajak Daerah di Kota Balikpapan terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Balikpapan sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2010-2012 tingkat kontribusinya mengalami peningkatan. diproyeksi 2014 kontribusinya mengalami peningkatan besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut berikut:

No.	Tahun	Pajak ( Rp )	PAD ( Rp )	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6) = ((3)/(4))
01.	2010	88.442.340.406,00	143.796.987.896,96	61,51
02.	2011	170.370.071.078,00	231.674.530.575,89	73,54
03.	2012	261.094.566.470,47	340.503.244.597,14	76,68
04.	2013	340.998.751.947,69	470.465.949.932,97	72,34

05.	2014	298.029.544.611	450.420.951.741,00	66,22
-----	------	-----------------	--------------------	-------

## **b. Dana Perimbangan**

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), maka BPHTB sudah murni menjadi Pajak Daerah di Kota Balikpapan sejak tahun 2011.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Balikpapan dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana

perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2012) rata-rata berkisar 64,54 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan mulai tahun 2011 mengalami penurunan. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel III.8 sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2010-2012 Target 2013 dan Proyeksi 2014 (dalam rupiah dan persen)**

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2010	884.535.994.856,00	1.243.280.145.452,69	71,15
02.	2011	1.151.703.793.532,00	1.798.988.467.397,89	64,02
03.	2012	1.338.672.315.591,00	2.205.153.356.919,20	63,36
04.	2013	<b>669.955.801.300,00</b>	2.421.958.180.024,97	52,91
05.	2014	1.176.771.223.989,00	2.077.427.096.030,00	56,62

### **C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Balikpapan bersumber dari:

- 1) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- 3) Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Balikpapan. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam

bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2010 - 2012 terus mengalami kenaikan, adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel III. 9 sebagai berikut.

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2006-2011**

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2010	254.947.162.700,00	1.243.280.145.452,69	20,51
02.	2011	415.610.143.290,00	1.798.988.467.397,89	23,10
03.	2012	433.792.294.200,00	2.205.153.356.919,20	19,63
04.	2013	396.448.836.000,00	2.421.958.180.024,97	16,35
05.	2014	450.234.920.300,00	2.077.427.096.030,00	21,66

Dari berbagai pertimbangan di atas, target Pendapatan Daerah di Kota Balikpapan Tahun 2014 dan proyeksi 2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9**  
**Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Balikpapan Target Tahun 2012 dan Proyeksi 2014 (dalam Satuan Rupiah)**

NO	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2014	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2015
(1)	(2)	(4)	(5)
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>450.420.951.741,00</b>	<b>454,319,000,000.00</b>
1.1.1	Hasil Pajak daerah	298.029.544.611	302,945,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	71.482.371.579	68,303,000,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	29.500.000.000	31,500,000,000.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	51.409.035.551	51,571,000,000.00
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.176.771.223.989</b>	<b>1,168,780,000,000.00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	718.799.721.989	718,780,000,000.00
1.2.2	DAU	449.982.262.000	450,000,000,000.00
1.2.3	DAK	7.989.240.000	-

1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>450.234.920.300</b>	<b>338,624,000,000.00</b>
1.3.1	Hibah	8.900.000.000	3,000,000,000.00
1.3.2	Dana Darurat	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	241.017.600.000	242,000,000,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.623.367.000	93,624,000,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	106.693.953.300	-
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.077.427.096.030</b>	<b>1,961,723,000,000.00</b>

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Balikpapan selama kurun waktu 2014-2015, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kota Balikpapan berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Balikpapan antara lain dengan:
  - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan.
  - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:
    - i. Meningkatkan SDM pelayanan untuk mengoptimalkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)
    - ii. Meningkatkan sarana dan prasarana dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    - iii. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan dan penerapan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi di Kota Balikpapan
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program

intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
  - c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
  - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
  - f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu /terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kota Balikpapan.
  5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
  6. Menegakan hukum/*law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)
  7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
  8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Balikpapan.
  9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/



- kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
  11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
  12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
  13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Balikpapan, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

#### **3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.**

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa mekanisme perencanaan pembangunan Daerah, melalui tahapan dengan kegiatan Musrenbang, selanjutnya terhimpun Rencana Kerja Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Di dalam RKPD tersebut termuat belanja daerah yang dilaksanakan oleh SKPD, dengan diklasifikasikan dalam belanja menurut urusan pemerintahan yang terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib terdiri dari :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan terdiri dari :

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan; dan
- g. industri

Kebijakan umum belanja daerah Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, rencana belanja daerah pada tahun 2015 sebesar Rp.2.959.740.595.670,80,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.647.252.346,20 dari tahun 2014 sebesar Rp. 3,003,387,848,017.00 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 862,190,000,000.00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.097.550.595.670.8;
2. Kebijakan alokasi anggaran belanja tahun 2014 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016. Oleh karena itu program pembangunan Kota Balikpapan tahun 2015 diprioritaskan untuk mencapai target RPJMD Tahun 2011-2016, dengan diselaraskan pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun

2015, serta mengacu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018.

3. Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
4. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:
  - a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
  - b. Mengefektifkan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan untuk menjamin program dan kegiatan yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya.
5. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah melalui:
  - a. Pengembangan dan pemantapan sistem informasi keuangan daerah melalui dari perencanaan anggaran, penatausahaan hingga pelaporan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
  - b. Peningkatan kualitas aparat pengelola keuangan daerah.
  - c. Penciptaan pola pengawasan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel.

**a. Kebijakan Belanja Pegawai.**

Belanja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 747.390.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 55,362,578,329.00 dari Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 692.027.421.671.

**b. Kebijakan Belanja Bunga**

Untuk Belanja Bunga sudah tidak ada lagi, karena telah dilunasi pada Tahun Anggaran 2010.

**c. Kebijakan Belanja Hibah**

Belanja hibah pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 dan pagu tersebut disediakan untuk pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

**d. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial**

Demikian pula dengan belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 dan bantuan ini diberikan bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya suatu resiko sosial di masyarakat.

**e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Dalam rangka mengantisipasi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, maka pada tahun anggaran 2015 disediakan pagu belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

**3.2.2.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena fungsi penerimaan pembiayaan Daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran.

Berdasarkan penerimaan tahun 2014, maka penerimaan pembiayaan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.031.517.595.670.80,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah) dialokasikan sebesar Rp.33.500.000.000,- dan Pembayaran Pokok Utang sudah tidak ada lagi.

**BAB IV**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015**

**4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan adalah Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut di atas selanjutnya dirumuskanlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut:

**MISI-1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN**

Tujuan-1 :

Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan ;
2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan ;
3. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin ;
4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Tujuan-2 :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat ;
2. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan ;
3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Tujuan-3 :

Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.

Sasaran :

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan ;
2. Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga ;
3. Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi.

Tujuan-4 :

Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama;
2. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.

**MISI-2 : MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT.**

Tujuan-1 :

Mengembangkan Kewirausahaan UMKM dan Koperasi.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi ;
2. Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi ;
3. Meningkatnya peran lembaga keuangan dan kemitraan dalam pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi ;
4. Meningkatkan Permodalan.

Tujuan-2 :

Memantapkan kemandirian Ekonomi masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan ;
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ;
3. Terwujudnya Ketahanan pangan.

**MISI-3 : MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KKN DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL.**

Tujuan-1 :

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban ;
3. Meningkatnya pemahaman pengusaha/tenaga kerja terhadap peraturan/perundangan ketenagakerjaan;
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja ;
5. Meningkatnya peran Organisasi Kedaerahan, Paguyuban dan

Forum Komunikasi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan-2 :

Meningkatkan kesadaran hukum dan pemberantasan KKN.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Perda dan Produk hukum lainnya;
2. Meningkatnya pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan;
3. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum;
5. Meningkatnya partisipasi politik Masyarakat.

Tujuan-3 :

Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial ;
2. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tujuan-4 :

Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana.

Sasaran :

1. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana ;
2. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.

**MISI-4 : MENINGKATKAN INVESTASI, MEMENUHI EKSPEKTASI DUNIA USAHA, DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA.**

Tujuan-1 :

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

Sasaran :

1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan investasi ;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi ;
3. Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat.

Tujuan-2 :

Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya investasi dan produk sektor unggulan daerah;
2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan-3 :

Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

Sasaran :

1. Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja;
2. Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja.

Tujuan-4 :

Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya sumber sumber pendapatan daerah;
2. Meningkatnya Sumber Pembiayaan Daerah dari Pihak ketiga;
3. Meningkatnya peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.

**MISI-5 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI.**

Tujuan-1 :

Meningkatkan pelayanan publik yang prima

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas SDM dan Kinerja Pengelola Pelayanan Publik ;



3. Meningkatkan Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pelaksanaan e-Government;
4. Meningkatkan citra pelayanan publik.

Tujuan 2 :

Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan.

Sasaran :

1. Terwujudnya Gran Strategi dan Road Map Reformasi Birokrasi;
2. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
4. Meningkatnya Kapasitas/kemampuan Sumber Daya Aparatur;
5. Terbentuknya struktur kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif.

**MISI-6 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF.**

Tujuan-1 :

Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan.

Sasaran :

1. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi kota;
2. Manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan;
3. Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM);
4. Terwujudnya Rencana Induk Transportasi (RIT) yang menunjang pemerintah kota dalam membangun sarana transportasi secara global.

Tujuan-2 :

Menyediakan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.

Sasaran :

1. Tersedianya sumber-sumber air baku yang memadai ;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum ;
3. Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) terpadu.

Tujuan 3 :

Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota

Sasaran :

Mengurangi titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan.

Tujuan 4 :

Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan permukiman kumuh ;
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) ;
3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 5 :

Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

**MISI-7 :           MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN  
SERTA PERLINDUNGAN ANAK.**

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
3. Meningkatnya keluarga harmonis.

Tujuan 2:

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Tujuan 3:

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

Sasaran :

1. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja;
2. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kesadaran hukum kaum perempuan.

Tujuan 4 :

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

Sasaran :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak;
2. Meningkatkan peran keluarga dalam perlindungan anak ;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik untuk tumbuh kembang anak;
4. Meningkatkan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri ;
5. Meningkatkan kesejahteraan anak.

**MISI-8 : MEMPERKUAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SERTA MELESTARIKAN KERAGAMAN BUDAYA DAN KEGOTONGROYONGAN.**

Tujuan 1 :

Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)

Sasaran :

1. Meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar;
2. Terwujudnya pembangunan Kebun Raya Balikpapan dan hutan kota (foresting the city);
3. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota;

4. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat.

Tujuan 2 :

Mengembangkan dan melestarikan heterogenitas budaya

Sasaran:

1. Meningkatnya upaya pelestarian ragam seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan;
2. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya berciri khas Balikpapan;
3. Melestarikan dan mengembangkan jiwa kegotongroyongan Masyarakat.

Tujuan 3:

Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
2. Terwujudnya citra masyarakat dalam berbudaya kepariwisataan;
3. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan.

#### **4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2015 menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah **“Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”**,

Sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2015 adalah :

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 - 6,3 persen;
- Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5%;
- Tingkat kemiskinan menurun sampai menjadi sebesar 9-10 %;
- Tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,7 - 5,9 %.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

- A. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2011-2016 yang belum tercapai;
- B. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2015;
- C. Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP tahun 2015);
- D. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 Prioritas Pembangunan mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Penekanan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2014 seperti dijabarkan pada tabel berikut:

No	Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan 2015
1	Pengendalian Banjir	Pengurangan titik banjir dari 12 titik menjadi 3 titik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan pembangunan drainase</li> <li>2. Normalisasi daerah aliran sungai</li> </ol>
2	Pengembangan Pelayanan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya ketersediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum (ketersediaan air baku adalah 1186Ltr/Hari sedangkan kebutuhan adalah 1588Ltr/Hari)</li> <li>• Pelayanan air bersih belum optimal</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kelanjutan Pembangunan Waduk.</li> <li>4. Pemeliharaan waduk manggar</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana air bersih</li> </ul>
3	Pengembangan Pelayanan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya pelayanan air limbah (tahun 2013 SR IPAL sebanyak 1384 SR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana air limbah</li> </ul>
4	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem pelayanan perizinan</li> <li>• Perwujudan investasi yang mengarah keunggulan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>• Peningkatan nilai investasi</li> </ul>
5	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi	Peningkatan koperasi Aktif Peningkatan produk unggulan daerah

6	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok	Kerjasama antar daerah pemasok bahan pangan
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya sebaran sarana prasana pelayanan Kesehatan</li> <li>• Belum optimal kualitas pelayanan kesehatan</li> <li>• Masih tingginya angka kematian bayi dan balita</li> <li>• Adanya balita kekurangan gizi dan tingginya kesakitan penyakit menular</li> <li>• Masih adanya KLB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan prasarana dan sarana pendukung pelayanan kesehatan</li> <li>• Penambahan dan pemerataan jumlah tenaga medis.</li> <li>• Pencegahan penyebaran penyakit menular</li> </ul>
8	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidik</li> <li>• Belum meratanya sarana prasarana Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan prasarana dan sarana pendukung Pendidikan</li> <li>• Penambahan dan pemerataan jumlah tenaga Pendidikan</li> </ul>

Berdasarkan isu strategis tersebut maka, maka RKPD Kota Balikpapan 2015 ditetapkan dengan tema : “Pembulatan Pelaksanaan RPJMD 2011-2016”.

Selanjutnya tema di atas dijabarkan dalam Program Prioritas Pembangunan pada tabel berikut:

No	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator	Target 2015	Pagu	SKPD
1	Pengendalian Banjir	Program pengendalian banjir	Pengendalian Banjir I	Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong :  1. Penataan Drainase Jl.P.Antasari 2. Drainase Depan BSB (Gorong-gorong) 3. Revitalisasi Bendali Telagasari Tahap III 4. Jalan Inspeksi Sungai Ampal (Tahap II) 5. Drainase Sekunder Sutoyo 6. Drainase Samping SMKN. 3 Kel. Gunung Bahagia (Tahap II) 7. Drainase RT.62, 05 & 80 Kel.Batu Ampar 8. Drainase Skunder Inhutani	8 Paket	77,001,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pengendalian Banjir II	Peningkatan Saluran Drainase :  1. Drainase RT. 113, RT. 114 Kel. Sepinggan (Lama) 2. Drainase RT. 24, Kel. Sepinggan 3. Drainase Sekitar Kantor KP3 Pel. Semayang (Jl Yoes Soedarso) 4. Drainase RT.39 s/d 48 Kel.Klandasan Ulu 5. Drainase RT.77 & RT.68, Kel. Batu Ampar 6. Pengerukan Sedimen Bendali Kampung Timur 7. Drainase Sekunder Straat	15 Paket	42,999,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

				III/RPH 8. Drainase Jl.Tepo Kel.Karang Joang (Tahap IV) 9. Drainase RT. 10 (kiri-kanan), Kel. Manggar 10. Drainase Jl. Giri Mulyo, Kel. Karang Joang 11. Drainase Primer Telindung, Kel. Muara Rapak & Kel. Batu Ampar 12. Drainase Sekunder Simpang Jl.DI Panjaitan - Jl.S.Parman 13. Drainase RT.23 & RT.24, Kel.Manggar 14. Peningkatan Sungai Primer Sepinggan, Kel. Sepinggan 15. Perbaikan Sungai Sepinggan (Bendali Melawai s/d Muara)			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Bencana Banjir di Kota Balikpapan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Bencana Banjir di Kota Balikpapan	1 dokumen pelaporan	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Pengembangan Pelayanan Air Minum	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kajian Penyusunan Perda Pengelolaan Air Minum	Dokumen Kajian Penyusunan Perda	1 Dokumen	350,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	Pengembangan Pelayanan Air Limbah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Air Limbah	- Izin Pembuangan Air Limbah Baru/Perpanjangan - Sosialisasi Perijinan Air Limbah	20 Ijin 1 Paket	175,000,000	BADAN LINGKUNGAN HIDUP



			Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3	a. Terlaksananya Verifikasi Teknis Kinerja Perusahaan  b. Terdokumentasinya Hasil Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan c. Verifikasi Izin tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 d. Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	16 Perusahaan  10 Buku  36 Perusahaan  10 Izin	100,000,000	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
4	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Terselenggaranya perluasan informasi investasi di dalam dan luar negeri, tersedianya database potensi sumber daya daerah, tersedianya bahan dan informasi pelayanan publik	100%	2,736,738,800	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan iklim dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal	Tercapainya fasilitasi perizinan pada kegiatan penanaman modal/investasi di Kota Balikpapan (92 unit usaha)	95%	1,000,000,000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
			Penyusunan perda pendukung investasi di Kota Balikpapan	Tersusunnya 2 Perda/Perwali (Perda/Perwali tentang rekreasi dan hiburan umum, Perda/Perwali tentang uang jaminan pembongkaran reklame dan Perda/Perwali tentang insentif)	95%	250,000,000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Peningkatan SDM/Bimtek Aparatur	Terlaksananya pendampingan dan bimtek pelayanan bagi aparatur BPMP2T Kota Balikpapan	100%	600,000,000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN

						TERPADU
	Program Pengembangan Pelayanan Perijinan	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu	90%	967,645,132	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan-Peraturan dan Pelayanan Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu	100%	129,214,460	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		Sistem dokumentasi dan pengarsipan data elektronik	Adanya aplikasi yang mengelola system pengarsipan secara fisik dan elektronik	90%	154,134,500	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		Survey kepuasan konsumen bidang pelayanan perizinan	Adanya Buku dan CD Survey Kepuasan Konsumen bidang pelayanan perizinan	95%	102,376,623	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		Update website informasi dan pengaduan	Tersedianya system informasi pelayanan perizinan yang mengakomodir perubahan proses bisnis perizinan dan pelayanan public BPMP2T Kota Balikpapan	95%	250,000,000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		Penyediaan bahan/materi/media/informasi layanan perizinan dan investasi	Terlaksananya pengadaan sarana/media informasi layanan perizinan dan investasi	95%	99,820,000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

5	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Pengembangan pelayanan perizinan	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perizinan antara lain Izin Gangguan, Izin Reklame dan Izin Pariwisata	95%	196,500,000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
			Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan kegiatan bidang usaha, penanaman modal/investasi di Kota Balikpapan	95%	300,000,000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
			Peningkatan Pengawasan Barang Perdagangan	-Pengawasan Barang Beredar (SNI) dan Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) -Terawasinya komoditi Perdagangan	-10 komoditi Pengawasan Barang dan Jasa (SNI) -Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus	431,025,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
			Pelaksanaan Kegiatan Kemetrolgian	-Pendampingan Tera Ulang - Operasional Ukur Ulang - Pengawasan UTTP - Pengembangan SDM Kemetrolgian -Verifikasi Standar Metrologi -Terjaminnya kebenaran ukuran komoditi Perdagangan dan kebenaran alat Ukur	-'8500 Pendampingan Tera Ulang, -Operasional Ukur Ulang, -Pengawasan UTTP -1 kali Verifikasi Standar Metrologi	405,983,600	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	Terlaksananya diklat dan pembelajaran bagi UMKM	147 Orang	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	penyertaan promosi dan pelatihan keterampilan produk industry bersama DEKRANASDA kota Balikpapan	- Terlaksananya pembinaan dan promosi produk UKM/IKM Kota Balikpapan - Terlaksananya Pelatihan Batik - Terlaksananya Pelatihan Bordir - Terlaksananya Pameran luar daerah - Terlaksananya Kunjungan Pameran / studi banding	-1 kali 25 IKM -1 Kali 25 IKM - 2 kali 12 Ikm - Kunjungan luar daerah 2 kali	700,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Penyertaan dan partisipasi aktif dalam pameran industry kecil dan mikro	- Terlaksananya pameran dan promosi produk UKM/IKM Kota Balikpapan - Terlaksananya pameran dan promosi produkUKM/IKM Kota Balikpapan - Terlaksananya keikutsertaan pawai Pembangunan kendaraan hias dan Festival lampion Terlaksananya keikutsertaan Pamer	-2 kali pameran luar daerah, 1 kali pemeran dalam daerah, Pameran di tenggarong dan samarinda,	350,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Peningkatan produk unggulan Kota Balikpapan	-- Terlaksananya Festival panganan dan lomba desain cinderamata. - Terlaksananya lomba desain Batik khas Balikpapan dan lomba Bordir	-35 peserta, 3 hari	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Pengadaan lahan gedung DEKRANASDA dan UKM center	-Terlaksananya pengadaan lahan gedung Dekranasda dan UKM center di Kota Balikpapan	1 Paket	2,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan Tata Laksana Perdagangan Luar Negeri	1. Peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA) 2. Partisipasi aktif dan penyertaan pameran produk unggulan UKM produk ekspor Kota Balikpapan 3. sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri 4. Pengembanga	2 kali, 4 kali, 1 kali, 50 Buku	630,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

			informasi pasar perdagangan luar negeri			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM di Kota Balikpapan	1. Bimbingan teknis bagi gakin 2. survey dana bergulir 3. temu usaha kemitraan UKM	10 Bulan bimtek 200 orang , temu usaha 50 orang survey dana bergulir 200 orang	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		Pameran Hari Koperasi Nasional dan Pameran Undangan Insedentil	Terlaksana Pameran Koperasi dan UMKM di Balikpapan Terlaksana keikutsertaan pameran diluar daerah	1 pameran 2 lokasi	700,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Penyuluhan Pendirian Koperasi - Operasional Dekopinda - Sosialisasi Pertumbuhan Koperasi - Bimtek dan Magang bagi gerakan Koperasi	- 30 koperasi/orang, - 10 Orang, - 180 Orang, - 20 Orang / koperasi	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		Peningkatan jumlah koperasi aktif	1. Diklat Koperasi 2. Pendataan Koperasi 3. Bimtek pengembangan usaha koperasi 4. Pertemuan teknis dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM	160 Orang,533 unit,20 Orang,Ess II, III, IV	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Kualitas Kelancaran Distribusi Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga	-Penyebaran informasi harga pangan strategis -Monitoring harga pasar dan distribusi bahan pokok -Bazar pasar Ramadhan - Penyusunan Profil Perdagangan dalam Negeri	12 Bulan 47 Komiditi, 12 Bulan 5 pasar (120 kali), 12 hari 6 tempat, 20 buku / Dokumen	400,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

			<p>Efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>Pengadaan lahan KIKHP dan kelautan (lanjutan)</p> <p>Peningkatan kualitas industry existing di kawasan industry kecil Sumber dan incubator industry dan bisnis</p>	<p>-pasar lelang komoditi, misi dagang dan Pameran produk dalam Negeri - Pengawasan tata niaga dan kelembagaan - penyertaan Pelatihan dan Bimtek - Sosialisasi dan harmonisasi kebijakan Perdagangan dalam Negeri</p> <p>-Terlaksananya pengadaan lahan kawasan Industri kecil hasil pertanian dan kelautan Kec Balikpapan Timur</p> <p>-penyertaan pengelola KIKS dalam diklat/Bimtek -Pelatihan Alih Teknologi Tepat Guna bagi IK KIKS, IIB dan Kota Balikpapan</p> <p>-Pelatihan dan Penerapan Good House Keeping bagi IK KIKS, IIB dan Kota Balikpapan - Peningkatan daya saing produk melalui Gugus Kendali Mutu bagi Industri di KIKS dan IIB - Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi IK KIKS dan IIB Kota Balikpapan -Diversifikasi Teknologi dan Proses Produksi bagi Inkubator Industri dan Bisnis Kota Balikpapan Tingkat Lanjut -Gelar Inovasi produk dan Teknologi IK KIKS, IIB dan Kota Balikpapan -Pemeliharaan fasilitas umum Inkubator Indusri dan Bisnis -Kompetisi Penyusunan konsep usaha bidang Industri kecil</p>	<p>- 6 kali pasar lelang, misi dagang dan pameran produk, - 40 perusahaan, - 12 orang, - 6 kali sosialisasi</p> <p>+ - 3 hektar</p> <p>-2 Orang x 3 diklat, 20 Orang x 1 diklat, 30 Orang x 1 diklat, 20 GKM, 30 Orang x 1 diklat, 9 IIB, 1 Pameran di KIKS, 9 IIB , 20 Orang</p>	<p>650,000,000</p> <p>2,000,000,000</p> <p>500,000,000</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI</p> <p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI</p> <p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI</p>
--	--	--	---	---	---	--	--

	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Penyusunan Media Indagkop, Publikasi di Media Cetak dan Elektronik. Penyusunan Leaflet/Brosur Indagkop	Terlaksana Pembuatan media indagkop Balikpapan Terlaksana Pembuatan Brosur / leaflet indagkop Balikpapan Terlaksananya Pemuatan berita Disperindagkop dimedia massa Terlaksana Publikasi Indagkop dimedia cetak dan elektronik -Terlaksananya Pembuatan Wabsite Disperindagkop. -Terlaksananya pembuatan jaringan LAN Disperindagkop	300 Examp , 2500 lembar, 1 paket, 1 paket	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		pembuatan website informasi dan jaringan computer disperindagkop		1 Paket	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program kapasitas IPTEK system industri	Pelatihan bagi IKM	-Terlaksananya Pelatihan Kemasan bagi IKM dan Bantuan Kemasan -Terlaksana Pelatihan animasi dan desaing web -Terlaksana Pelatihan produk olahan mangrove dan Papink -Terlaksananya Pemutakhiran Data Industri Balikpapan	-30 IKM, 200 IKM, 20 Peserta,	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		Evaluasi dan pemutakhiran data industry Kota Balikpapan		-200 IKM	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		Peningkatan sumber daya pelaku industry kecil menengah	Terlaksananya bimtek diluar daerah Terlaksananya pelatihan desain kerajinan Terlaksananya pelatihan HKI Terlaksana pengawasan penerapan SNI	-5 daerah 2 aparat 20 ikm 1 jenis iKerajinan dan 3 olahan pangan	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

6	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Pengawasan Barang Perdagangan	-Pengawasan Barang Beredar (SNI) dan Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) -Terawasinya komoditi Perdagangan	-10 komoditi - Pengawasan Barang dan Jasa (SNI) -Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus	431,025,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
			Pelaksanaan Kegiatan Kemetrologian	-Pendampingan Tera Ulang - Operasional Ukur Ulang - Pengawasan UTTP - Pengembangan SDM Kemetrologian -Verifikasi Standar Metrologi -Terjaminnya kebenaran ukuran komoditi Perdagangan dan kebenaran alat Ukur	-'8500 Pendampingan Tera Ulang, -Operasional Ukur Ulang, -Pengawasan UTTP -1 kali Verifikasi Standar Metrologi	405,983,600	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ketahanan pangan	Laporan	1 Dokumen	250,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN
			Operasional program beras miskin (RASKIN)	Laporan	1 Dokumen	500,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN
			Penyusunan Regulasi Ketahanan Pangan	Terlaksananya penyusunan regulasi ketahanan pangan	Draft regulasi	-	BAGIAN PEREKONOMIAN
			Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	Laporan	1 Dokumen	125,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	Terlaksananya diklat dan pembelajaran bagi UMKM	147 Orang	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI



Program Peningkatan Ketahanan Pangan	implementasi pelaksanaan regulasi ketahanan pangan	Sosialisasi	1 paket	125,000,000	BAGIAN PEREKONOMI AN
	Penyusunan data informasi harga bahan kebutuhan pokok dan harga sembako	Laporan	1 Dokumen	100,000,000	BAGIAN PEREKONOMI AN
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah	Laporan	1 Dokumen	250,000,000	BAGIAN PEREKONOMI AN
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	penyertaan promosi dan pelatihan keterampilan produk industry bersama DEKRANASDA kota Balikpapan	- Terlaksananya pembinaan dan promosi produk UKM/IKM Kota Balikpapan - Terlaksananya Pelatihan Batik - Terlaksananya Pelatihan Bordir - Terlaksananya Pameran luar daerah - Terlaksananya Kunjungan Pameran / studi banding	-1 kali 25 IKM -1 Kali 25 IKM - 2 kali 12 lkm - Kunjungan luar daerah 2 kali	700,000,000	DINAS PERINDUSTRI AN, PERDAGANGA N DAN KOPERASI
	Penyertaan dan partisipasi aktif dalam pameran industry kecil dan mikro	- Terlaksananya pameran dan promosi produk UKM/IKM Kota Balikpapan - Terlaksananya pameran dan promosi produkUKM/IKM Kota Balikpapan - Terlaksananya keikutsertaan pawai Pembangunan kendaraan hias dan Festival lampion Terlaksananya keikutsertaan Pamer	-2 kali pameran luar daerah, 1 kali pemeran dalam daerah, Pameran di tenggarong dan samarinda,	350,000,000	DINAS PERINDUSTRI AN, PERDAGANGA N DAN KOPERASI
	Peningkatan produk unggulan Kota Balikpapan	-- Terlaksananya Festival panganan dan lomba desain cinderamata. - Terlaksananya lomba desain Batik khas Balikpapan dan lomba Bordir	-35 peserta, 3 hari	300,000,000	DINAS PERINDUSTRI AN, PERDAGANGA N DAN KOPERASI
	Pengadaan lahan gedung DEKRANASDA dan UKM center	-Terlaksanya pengadaan lahan gedung Dekranasda dan UKM center di Kota Balikpapan	1 Paket	2,000,000,000	DINAS PERINDUSTRI AN, PERDAGANGA

	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pendataan tenaga listrik di Kota Balikpapan Penyusunan dokumen penghematan energy dan komunikasi Kota Balikpapan	Terlaksananya pendataan ketenagalistrikan di kota Balikpapan Laporan	Bahan laporan  1 Dokumen	-  80,000,000	N DAN KOPERASI  BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PEREKONOMIAN
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan Tata Laksana Perdagangan Luar Negeri	1. Peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA) 2. Partisipasi aktif dan penyertaan pameran produk unggulan UKM produk ekspor Kota Balikpapan 3. sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri 4. Pengembangan informasi pasar perdagangan luar negeri	2 kali, 4 kali, 1 kali, 50 Buku	630,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM di Kota Balikpapan	1. Bimbingan teknis bagi gakin 2. survey dana bergulir 3. temu usaha kemitraan UKM	10 Bulan bimtek 200 orang , temu usaha 50 orang survey dana bergulir 200 orang	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Pameran Hari Koperasi Nasional dan Pameran Undangan Insedentil		Terlaksana Pameran Koperasi dan UMKM di Balikpapan Terlaksana keikutsertaan pameran diluar daerah	1 pameran 2 lokasi	700,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	
Pemantauan dan evaluasi pertumbuhan usaha perekonomian rakyat Pengembangan permodalan perbankan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)		Laporan  Sosialisasi	1 Dokumen  1 Paket	125,000,000  100,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PEREKONOMIAN	

	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Penyuluhan Pendirian Koperasi - Operasional Dekopinda - Sosialisasi Pertumbuhan Koperasi - Bimtek dan Magang bagi gerakan Koperasi	- 30 koperasi/orang, - 10 Orang, - 180 Orang, - 20 Orang / koperasi	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		Peningkatan jumlah koperasi aktif	1. Diklat Koperasi 2. Pendataan Koperasi 3. Bimtek pengembangan usaha koperasi 4. Pertemuan teknis dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM	160 Orang, 533 unit, 20 Orang, Ess II, III, IV	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Kualitas Kelancaran Distribusi Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga	-Penyebaran informasi harga pangan strategis -Monitoring harga pasar dan distribusi bahan pokok -Bazar pasar Ramadhan - Penyusunan Profil Perdagangan dalam Negeri	12 Bulan 47 Komiditi, 12 Bulan 5 pasar (120 kali), 12 hari 6 tempat, 20 buku / Dokumen	400,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		Efisiensi perdagangan dalam negeri	-pasar lelang komoditi, misi dagang dan Pameran produk dalam Negeri - Pengawasan tata niaga dan kelembagaan - penyertaan Pelatihan dan Bimtek - Sosialisasi dan harmonisasi kebijakan Perdagangan dalam Negeri	- 6 kali pasar lelang, misi dagang dan pameran produk, - 40 perusahaan, - 12 orang, - 6 kali sosialisasi	650,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Penataan Struktur Industri	Pengadaan lahan KIKHP dan kelautan (lanjutan)	-Terlaksananya pengadaan lahan kawasan Industri kecil hasil pertanian dan kelautan Kec Balikpapan Timur	+ - 3 hektar	2,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

		Peningkatan kualitas industry existing di kawasan industry kecil Sumber dan incubator industry dan bisnis	-penyertaan pengelola KIKS dalam diklat/Bimtek -Pelatihan Alih Teknologi Tepat Guna bagi IK KIKS, IIB dan Kota Balikpapan -Pelatihan dan Penerapan Good House Keeping bagi IK KIKS, IIB dan Kota Balikpapan - Peningkatan daya saing produk melalui Gugus Kendali Mutu bagi Industri di KIKS dan IIB - Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi IK KIKS dan IIB Kota Balikpapan -Diversifikasi Teknologi dan Proses Produksi bagi Inkubator Industri dan Bisnis Kota Balikpapan Tingkat Lanjut -Gelar Inovasi produk dan Teknologi IK KIKS, IIB dan Kota Balikpapan -Pemeliharaan fasilitas umum Inkubator Indusri dan Bisnis -Kompetisi Penyusunan konsep usaha bidang Industri kecil	-2 Orang x 3 diklat, 20 Orang x 1 diklat, 30 Orang x 1 diklat, 20 GKM, 30 Orang x 1 diklat, 9 IIB, 1 Pameran di KIKS, 9 IIB , 20 Orang	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Penyusunan Media Indagkop, Publikasi di Media Cetak dan Elektronik. Penyusunan Leaflet/Brosur Indagkop	Terlaksananya Pembuatan media indagkop Balikpapan Terlaksananya Pembuatan Brosur / leaflet indagkop Balikpapan Terlaksananya Pemuatan berita Disperindagkop dimedia massa Terlaksananya Publikasi Indagkop dimedia cetak dan elektronik	300 Examp , 2500 lembar, 1 paket, 1 paket, 1 paket	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
		pembuatan website informasi dan jaringan computer disperindagkop	-TerlaksananyaPembuatan Wabsite Disperindagkop. -Terlaksananya pembuatan jaringan LAN Disperindagkop	1 Paket	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Asuransi Gedung Pasar	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Pasar	5 pasar	500,000,000	DINAS PASAR

Program kapasitas IPTEK system industri	Pelatihan bagi IKM	-Terlaksananya Pelatihan Kemasan bagi IKM dan Bantuan Kemasan -Terlaksananya Pelatihan animasi dan desaing web -Terlaksananya Pelatihan produk olahan mangrove dan Papink	-30 IKM, 200 IKM, 20 Peserta,	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Evaluasi dan pemutakhiran data industry Kota Balikpapan	-Terlaksananya Pemutakhiran Data Industri Balikpapan	-200 IKM	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Peningkatan sumber daya pelaku industry kecil menengah	Terlaksananya bimtek diluar daerah Terlaksananya pelatihan desain kerajinan Terlaksananya pelatihan HKI Terlaksananya pengawasan penerapan SNI Laporan	-5 daerah 2 aparat 20 ikm 1 jenis iKerajinan dan 3 olahan pangan	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	1 Dokumen	250,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar di Balikpapan	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Pasar	6 Pasar	DINAS PASAR
Program Peningkatan Kebersihan,Keamanan dan Ketertiban Pasar	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	- Terlaksananya Pembayaran Honorarium Operasional Tramtib - Terlaksananya Pembayaran penambahan jam Kerja Petugas Kebersihan - Terlaksananya kegiatan pembersihan pasar berdasarkan kelebihan waktu dan volume pekerjaan - Terlaksananya pengadaan sarana Kebersihan pasar - Terlaksananya Pemeliharaan sarana Kebersihan pasar - Terlaksananya kegiatan sterilisasi pasar	125 orang, 61 orang, 165 orang, 16 unit, 45 unit, 3 pasar	1,926,300,000	DINAS PASAR

7	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	Pengembangan Potensi Pasar	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Pasar	5 paket	500,000,000	DINAS PASAR	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Esensial Pengadaan Peralatan Kesehatan	Tercukupinya perbekalan kesehatan termasuk obat daftar esensial	100	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA	
				Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan	100	6,500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja	Terlaksananya peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan	90	350,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA	
				Terlaksananya Upaya kesehatan kerja	90	350,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA	
				Operasional Puskesmas 24 Jam	Terlaksananya operasional puskesmas 24 jam	100	6,500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
				Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di puskesmas	Terlaksananya kegiatan Operasional di tiap-tiap puskesmas/UPT	100	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
				Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu	Terlaksananya Operasional Peningkatan Palayanan Kesehatan Masyarakat	-	1,300,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
				Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji	90	250,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
				Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	Terlaksananya penanganan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA	90	250,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan lansia			85	500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA		
Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)	Terlaksananya upaya kesehatan gigi sekolah (UKGS)	90	350,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA				

		Pembinaan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Terlaksananya pembinaan hasil tanaman obat keluarga (TOGA)	90	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	90	425,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Sadar Hidup Sehat	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam peningkatan sadar hidup sehat	90	1,797,842,500	DINAS KESEHATAN KOTA
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)	85	500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Penunjang Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya penunjang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	90	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyehatan Lingkungan	Terlaksananya penyehatan lingkungan	90	900,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)	Terlaksananya peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)	100	850,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya peningkatan imunisasi	90	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Terlaksananya surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	90	400,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS HIV/AIDS	Terlaksananya pemberantasan penyakit kulit/kelamin/IMS dan HIV/AIDS	85	600,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, KECACINGAN, DIARE dan KUSTA	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta)	90	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	Terlaksananya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	90	450,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pemeberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	Telaksananya pemberantasan penyakit DBD dan zoonosis	90	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Terlaksananya peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	100	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Penerapan Akreditasi Puskesmas dan Kalibrasi Alat Laboratorium	Terlaksananya akreditasi puskesmas dan kalibrasi alat laboratorium	90	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Standar Internasional di RSKBSI	12 Bulan	350,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
	Audit Akuntan Publik	Terlaksananya Audit Akuntan Publik	1 paket	100,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
	Pendampingan BLUD	Terlaksananya BLUD Penuh	12 Bulan	200,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
	Perhitungan Angka Kredit Tenaga Fungsional	Tercapainya Penilaian Kinerja Pegawai Fungsional Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Balikpapan	90%	14,300,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
	SIM Rumah Sakit	Tersedianya Aplikasi SIM Rumah Sakit	1 paket	75,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
	Promosi Rumah Sakit	Terlaksananya Kegiatan Promosi Rumah Sakit	1 paket	150,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan kesehatan jiwa dan mata untuk masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan mata untuk masyarakat	90	600,000,000



Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Pembangunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah)	Terlaksananya pembangunan puskesmas di Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah	3 puskesmas	8,225,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskemas	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	100	350,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya	Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas dan pustu, jaringannya	100	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik	100%	2,000,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	Terlaksananya manajemen desentralisasi kesehatan	90	250,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya upaya preventif dan promotif kesehatan di puskesmas	100	5,400,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program PPK BLUD	100	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Pemantapan Koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Terlaksananya pemantapan koordinasi BPJS	100	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80	550,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka kesehatan ibu dan anak	85	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Operasional Kasus KDRT, KTT, KTA dan Trafficking di Puskesmas	Angka kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas	90	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA

		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan remaja	90	450,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Peningkatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya peningkatan gizi masyarakat	90	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Operasional dan Pemeliharaan Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan bidang pengembangan dan sumber daya kesehatan	100	158,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan	Terlaksananya bimbingan teknis perencanaan dan evaluasi program kesehatan	100	250,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan melalui pengiriman program pelatihan	90	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Balikpapan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan RSUD Balikpapan	100	125,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Operasional RSUD Balikpapan	Terlaksananya operasional RSUD Balikpapan	100	15,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD	Terlaksananya pemantapan pelaksanaan sistem akuntansi puskesmas BLUD	90	450,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan	Terlaksananya akreditasi tenaga fungsional kesehatan	90	350,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
		Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas	Terlaksananya peningkatan kapasitas kinerja puskesmas	90	600,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit BLUD RSKB Sayang Ibu	Pelayanan Rumah Sakit BLUD Khusus Bersalin Sayang Ibu	Tercapainya pelayanan BLUD RSKB Sayang Ibu	12 Bulan	7,200,000,000	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU

8	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pelatihan Tutor PAUD Non Formal	Terdidiknya Tutor PAUD	25 orang 3 hari 1 paket 40 orang tutor	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini	Terlaksananya penguatan dan peningkatan mutu lembaga PAUD	12 orang 11 bulan 1 paket 40 lembaga Paud	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Operasional Penyaluran Bantuan Tutor PAUD Non Formal	Tersedianya tutor PAUD	12 orang 12 bulan 1 paket	2,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya pembangunan pagar sebagai prasarana penunjang sekolah pendidikan dasar	3 Orang 1 paket 4 bulan	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya kembali lokal belajar	3 Orang 1 paket 9 bulan	14,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya pembangunan UKS	3 Orang 1 paket 6 bulan	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan	3 Orang 1 paket 6 bulan	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan meubelair sekolah	Pengadaan Meubelair layakpakai	3 Orang 1 paket 9 bulan	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan SD - SMP Terpadu Kel.Batu Ampar (Ban.Keu.Propinsi) LANJUTAN	Terlaksananya pembanguan TK,SD,SMP dan SMA/SMK terpadu kelurahan Batu ampar	2 orang 1 paket 9 bulan	-	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah	Rehabilitas gedung dan lingkungan sekolah	2 orang 1 paket 6 bulan sdn dan smpn	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terlaksannanya akreditasi sekolah SD	100 sekolah 50 orang 3 bulan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
	Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Akhir Sekolah SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP Kota Balikpapan	Peserta Un lulus 100%	15 orang 1paket 12 bulan 19.500 siswa	950,000,000	DINAS PENDIDIKAN		

		Olimpiade Sains SD dan SMP	Peserta menjadi juara lomba ditingkat kota	10 orang 1 paket 1 bulan 6 siswa	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan SMP Negeri 23 Balikpapan (Bantuan Provinsi) LANJUTAN	Terlaksananya pembangunan SMPN 23 Balikpapan	2 orang 1 paket 9 bulan	7,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		-	Tercapainya pendampingan Bantuan operasional sekolah	15 sekolah 15 orang 1 bulan 12 gugus/36 sekolah	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penambahan kamar mandi / WC dan saluran drainase SD dan SMP Negeri	Terlaksananya pembangunan KM/WC	3 Orang 1 paket 4 bulan SDN dan SMPN	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pelaksanaan tim pengembang kurikulum/TPK jenjang SD, SMP Kota Balikpapan	Peningkatan profesionalisme guru dan mutu lulusan UN	10 orang 1 paket 2 bulan TPK kota	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pelaksanaan PPDB SD dan SMP tahun 2014	Terlaksananya PPDB SD dan SMP tahun 2014	1 paket	225,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pembinaan dan pemantapan dalam penerapan kurikulum 2013	Pemahaman dan pendalaman kurikulum bagi guru	200 guru 10 orang 1 paket 2 bulan	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penguatan metode pembelajaran (Lesson Study SD, SMP)	200 guru dapat menerapkan leasson study dalam proses belajar mengajar	15 orang 1 paket 4 bulan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pendidikan Dasar 9 Tahun (SMP Negeri)	Meningkatnya tingkat kelulusan siswa di sekolah serta meningkatnya minat belajar siswa di sekolah dan menurunnya resiko putus sekolah	1 paket 12 bulan 18.109 siswa	18,131,400,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pendidikan Menengah	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Bimbingan teknis penguatan program kesiswaan	15 orang 1 paket 30 hari	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Olimpiade Sains SMA	OSN berjalan dengan baik	30 sekolah 8 orang siswake nasional	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Pembinaan Siswa Berprestasi	Terselenggaranya pemberian dana pembinaan kepada siswa peraih nilai UN tertinggi kota Balikpapan	65 siswa peraih nilai UN tertinggi	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Revitalisasi Gedung / RKB SMA N 3	pembangunan RKB SMAN 3 Balikpapan	10 orang 1 paket 12 bulan	4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan RKB 3 Tingkat (12 RKB), Lapangan Upacara/Olahraga, gedung Serbaguna dan Pagar SMK N 6	Lanjutan pembanguan RKB SMKN 6 Balikpapan	10 orang 1 paket 12 bulan	10,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Operasional Satuan Tugas Penyaluran Biaya Pendidikan Bagi Penyaluran Siswa Keluarga Miskin	Operasional satuan tugas penyaluran biayapendidikan bagi siswa dari keluarga miskin	40 orang 1 paket 1 tahun	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Verifikasi dan Validasi Proses Uji Kompetensi Siswa	Verifikasi dan validasi proses uji kompetensi siswa	1 paket 6 bula 7000 siswa 40 orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Tenaga Kependidikan (Laboran dan Bengkel)	Bimbingan teknis penguatan program tenaga kependidikan (Laboran/Bengkel)	20 orang 1 paket 20 hari	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pembuatan Bozem SMKN 6	Bozem SMKN 6	10 orang 1 paket 12 bulan	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Alat praktik/peraga siswa	10 orang 1 paket 12 bulan	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	rehab	10 orang 1 paket 12 bulan	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Kompetisi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Cepat tepat UUD 1945, cepat tepat UU II, PKS/LKS SMK, Ost SMK, LOmba-lomba lain SMA/SMK	50 sekolah	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Operasional EDOTEL SMKN 4 Balikpapan	operasional Edotel SMKN 4 Balikpapan	40 orang 1 paket 1 tahun	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah	Pembangunan sarana penunjang sekolah SMA SMK	10 orang 1 paket 12 bulan 5 sekolah	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah (Dana Pendamping Block Grant/BIS/School Grant SLTA)	Dana pendamping	10 orang 1 paket 12 bulan 15 sekolah	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	Pra UNAS, UNAS, dan Uji Kompetensi	8000 siswa kelas XII SMA, SMK/MA	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Bengkel SMKN 6 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Bengkel Teknik kapal niaga SMKN 5 Balikpapan	10 orang 1 paket 12 bulan	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Peralatan Bengkel SMKN 6 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Pengadaan simulator nautika kapal niaga SMKN 5 Balikpapan	10 orang 1 paket 12 bulan	-	DINAS PENDIDIKAN
Bimtek Delapan Standar Nasional Pendidikan	BIMTEK 8 SNP, Pengawasan terhadap pencapaian SNP di SLTA	20 orang 1 paket	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Terlaksananya penyaluran biaya pendidikan non formal	5 orang 12 bulan 1 paket 664 tutor	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan dan Pembinaan Kursus/Kelembagaan	Terlaksananya pendataan dan pelatihan pembinaan kursus dan kelembagaan	25 orang 3 hari 1 paket 70 orang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Tutor Kejar Paket A,B dan C	Peserta pelatihan lebih terampil dalam mengajar paket A,B, dan C	22 orang 5 hari 1 paket 60 orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Uji Kompetensi	Terlaksananya uji kompetensi tata busana, bahasa inggris dan TRP	10 orang 3 hari 1 paket 50 orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	operasional SKB	SKB BARAT	750,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	Operasional SKB Timur	SKB TIMUR	750,000,000	DINAS PENDIDIKAN

		Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	OPERASIONAL SKB TENGAH	SKB TENGAH	750,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	OPERASIONAL SKB UTARA	SKB UTARA	750,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	OPERASIONAL SKB SELATAN	SKB SELATAN	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Balikpapan	Kreatifitas peserta lebih meningkat	45 orang 5 hari 1 paket 162 orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Jambore Pendidikan Non Formal	Kreativitas peserta lebih meningkat	55 orang 12 hari 1 paket	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Ujian Nasional Program Paket A,B,C dan C Kejuruan	Terlaksananya UN paket A,B,C dan C kejuruan	25 orang 20 hari 1 paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Hari Anak Nasional (HAN) dan pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Taman Kanak-kanak Se-Kota Balikpapan	Terlaksananya HAN Porseni dan Persami Jumbara	40 orang 6 hari 1 paket 400 orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Operasional Rumah Pintar	Operasional rumah pintar	100%	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	seleksi berkas folio sosialisasi program sertifikasi pemberkasan ke propinsi pengiriman peserta diklat PLPG	40 orang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Melanjutkan Pembiayaan untuk program S1 bagi guru kader lama tahun sebelumnya pembiayaan untuk S1 kader guru	20orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terselenggaranya pelaksanaan pemberian penghargaan bagi guru, kepek, dan pengawas sekolah	45 orang 2 bulan	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah	Terselenggaranya pelatihan pengembangan jaringan komputer sekolah	115 orang 1 paket 15 hari 100 orang tata usaha sekolah	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Guru Kesenian	Terlaksananya pelatihan guru kesenian	50 orang 1 paket 6 bulan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Guru Olahraga	Terlaksananya pelatihan guru olah raga sekota Balikpapan	50 orang 3 hari 1 paket	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Guru	Terlaksananya pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis TIK bagi guru SD,SMP,SMA, dan SMK Negeri/Swasta	215 orang 1 paket 20 hari 200 orang guru	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Gugus TK dan SD	Terlaksananya lomba gugus TK & SD Negeri/Swasta	15 orang 15 sekolah 1 bulan 12 gugus /36 sekolah 3gugus	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Penilaian Kinerja dan Keprofesian Berkelanjutan	Terlaksananya Pendidikan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dan guru	210 orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Induksi Guru Pemula	Terlaksananya induksi guru bagi guru pemula	12 orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Program Tata Usaha Sekolah	Bimbingan Teknis penguatan program tata usaha sekolah	15 orang 1 paket 30 hari	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMA, MA dan SMK	Pelaksanaan bedah kurikulum 2013 oleh mgmp	350 orang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelaporan Keuangan dan Verifikasi BOSDA/BOSPROV	Terlaksananya tertib administrasi keuangan disdik	12 orang 1paket 12 bulan	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	Terleksananya Kuis kihajar tingkat kota Balikpapan	320 orang 1 paket 15 hari	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS/MPSPD)	Terlaksanya sosialisasi EDS	12 orang 1paket 7 hari 321 sekolah	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Tambahan Penghasilan Guru PENDAIS	Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan	1 paket 12 bulan 174 guru	1,879,200,000	DINAS PENDIDIKAN



Pelaksanaan Forum Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan	Terselenggaranya pelaksanaan forum pengawas sekolah	12 orang 1 paket 20 hari 90 orang pengawas	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas dan UPTD	Terlaksananya laporan kegiatan dan UPTD	12 orang 1 paket 7 hari 125 dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Kompetensi dan Layanan Guru Bimbingan Konseling	Bimbingan Teknis penguatan kompetensi dan layanan guru BK	40 orang 1 paket 1 tahun 150 guru BK	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Bimtek Pengolahan Data Sekolah	Terlaksananya Bimtek pengolahan data sekolah	490 orang 1 paket 15 hari	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan seni budaya dan olahraga anak didik/Pentas PAI SD,SLTP dan SLTA	Terselenggaranya prestasi PAI tingkat SD, SLTP dan SLTA di sekolah	32 orang 1 paket 3 hari	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMK	Terselenggaranya festival seni siswa nasional SD, SMP, dan SMA	90 orang 1 paket 12 hari	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMU dan SMK	Terselenggaranya O2sn tingkat SD,SMP, SMA dan SMK	300 orang 14 hari 4 paket 15 cabor 250 siswa	1,150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	Terlaksananya lomba sekolah sehat Tk,SD,SMP,SMA,SMK	15 orang 1 bulan 1 paket 72 sekolah	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya kompetisi olahraga guru-guru tingkat kota,provinsi dan nasional	25 orang 14 hari 1 paket 5 cabor/200guru 5 cabor/50 guru 5 cabor/20 guru	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Terselenggaranya proses pekan olahraga nasional	11 orang 12 bulan 1 paket 30 siswa	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan seni budaya dan olahraga Anak didik/liga pendidikan Indonesia	Pertandingan liga pendidikan Indonesia tingkat kota,propinsi dan nasional	10 orang 15 hari 1 paket 40 sekolah	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN

		Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	Proses pelaksanaan kegiatan Hardiknas	80 orang 15 hari 1 paket	575,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SLB	Di selenggarakan pekan olahraga bagi pelajar cacat sehingga di dapatkan bibit atlit tingkat pelajar cacact	35 orang 6 hari 1 paket 4 cabor	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penyuluhan UKS Tingkat TK s/d SLTA Kota Balikpapan	Penyuluhan UKS tingkat TK S/D SLTA se kota Balikpapan	15 orang 3 hari 1 paket 150 sekolah	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pelatihan Pengurus OSIS SMP/SLTA	Terselenggaranya pelatihan pengurus OSIS SMP dan SLTA	15 orang 3 hari 1 paket 210 siswa	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya Informasi kebijakan pendidikan melalui media massa	10 orang 1 paket 12 bulan	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi percepatan penyaluran BOSDA/BOSDA DIKMEN	12 orang 1 paket 11 bulan	125,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Dana Pendamping Block Grant / School Grant SD-SMP	Terlaksananya pendampingan terhadap APBN/APBD Prop terkait sapras sekolah (fisik/non fisik)	5 orang 1 paket 9 bulan	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Pengadaan Kalender Pendidikan	Pembuatan kalender hari efektif belajar	700 lembar	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah	Terselenggaranya pendataan aset di dinas pendidikan	198 orang 1 paket 4 bulan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pembinaan Pengelola Data Sekolah	Terlaksananya pembinaan pengelola data sekolah	12 orang 1 paket 12 bulan 321 sekolah	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penyempurnaan Kurikulum Muatan Lokal PKLH	Peningkatan profesionalisme guru dan mutu lulusan UN	10 orang 1 paket 2 bulan	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal	Terlaksananya pengolahan data pokok pendidikan formal	1 paket	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website	Optimalisasi perangkat jaringan komputer di dinas pendidikan	5 orang 1 paket 12 bulan	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN

		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya surat penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dan pamong	25 orang 10 bulan 800 orang	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru Tahun 2014	Penyusunan daftar kebutuhan guru tahun 2014	SDN 135 DOKUMEN SMPN 22 DOKUMEN SMAN 9 DOKUMEN SMKN 5 DOKUMEN	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggaranya penanganan terhadap kasus pendidik dan tenaga kependidikan (pp53/2010)	12 orang 10 bulan 20 kasus	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Penyusunan Buku Profil Pendidikan	Tersedianya buku profil pendidikan	50 orang 1 paket 3 bulan	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Lomba Situs Web Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK	Terlaksananya lomba	15 orang 1 paket 15 hari	85,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru	Terlaksananya validasi guru penerima tambahan penghasilan	1 paket 2 smester dan 4 triwulan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan/Keuangan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya peningkatan kapasitas staf pengelola kegiatan keuangan	1 paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Kompetensi/Kualitas Guru	Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Pelaksanaan Forum Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan	12 orang 1 paket 20 hari	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)	Biaya Operasional SDLB Negeri Balikpapan	Meningkatnya tingkat kelulusan siswa SD di semua sekolah dasar	1 paket 12 bulan 45.160 siswa	21,665,245,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program BOS (Kota) Pendidikan Menengah	Biaya Operasional SMALB Negeri Balikpapan	Meningkatnya tingkat kelulusan siswa tingkat SMAN	1 paket 12 bulan 21.107 siswa SMAN	16,667,000,000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pengembangan Tenaga Kependidikan	Penguatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah	Bimbingan teknis penguatan kompetensi kepala sekolah dan calon kepala sekolah	20 orang 1 paket 20 hari	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2015 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.

2. Program Prioritas II :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 serta indikatornya.

3. Program Prioritas III:

Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD, masing-masing program diuraikan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana yang tercantum pada lampiran RKPD Tahun 2015 ini.

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2015 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stake holder*) melalui Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Balikpapan ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Balikpapan, juga diusulkan ke APBD Propinsi Kalimantan Timur dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Balikpapan selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita - cita masyarakat Kota Balikpapan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Balikpapan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015 dengan sebaik - baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2015, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD)
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program / kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD HIRADE

NIP 196108061990031004